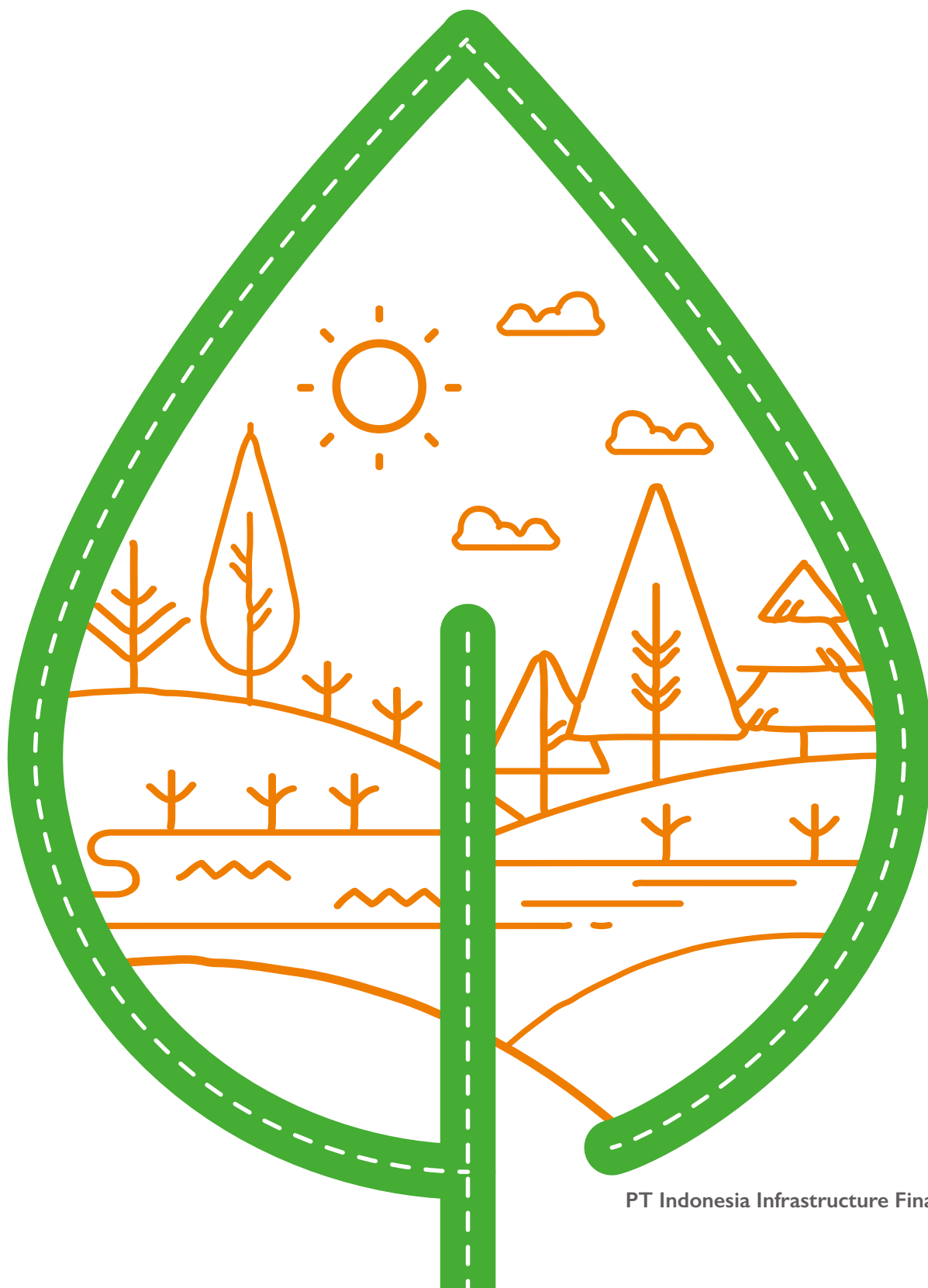


Creating Greater Contributions towards Sustainable Development



Daftar Isi

Table of Content

2	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	62	Kinerja Operasional Operational Performance
6	Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy	72	Kinerja Lingkungan Environmental Performance
21	Ikhtisar Keberlanjutan Sustainability Highlights	84	Ketenagakerjaan Employment
24	Profil Perusahaan Company Profile	96	Kinerja Sosial Social Performance
32	Laporan Direksi Report of the Board of Directors	102	Indeks Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 POJK Index No. 51/POJK.03/2017
38	Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	105	Indeks Isi GRI GRI Content Index –WITH REFERENCE

DISCLAIMER

Laporan Keberlanjutan ini memuat pernyataan kinerja aspek keberlanjutan seperti kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta memungkinkan adanya perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Keberlanjutan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin adanya hasil tertentu yang pasti tercapai berdasarkan informasi yang disajikan.

Laporan Keberlanjutan ini memuat kata “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Indonesia Infrastructure Finance yang menjalankan bisnis di bidang pembiayaan dan jasa konsultasi untuk proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Ada kalanya kata “IIF” dan “Perusahaan” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Indonesia Infrastructure Finance secara umum.

This Sustainability Report contains performance statements on sustainability aspects such as economic, environmental, social and governance performance. These statements involve prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments to differ materially from those reported.

Prospective statements in this Sustainability Report are prepared based on numerous assumptions concerning current and future conditions of the Company and the business environment where the Company conducts its business. The Company offers no guarantee that all information presented herein will bring about specific results as expected.

This Sustainability Report contains the word “Company” which is defined as PT Indonesia Infrastructure Finance which engages in the business of financing and advisory services for commercially viable infrastructure projects. The words “IIF” and “Company” are also used for convenience to refer to PT Indonesia Infrastructure Finance in general.



Berkontribusi Lebih Besar untuk Pembangunan Berkelanjutan

Creating Greater Contributions towards Sustainable Development



Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup kompleks dengan berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi IIF untuk terus maju dan melanjutkan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. IIF tetap mencatatkan pertumbuhan “double digit growth” dengan tetap memastikan adanya pengelolaan yang mumpuni terhadap berbagai risiko dan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai.

Pembiayaan IIF terhadap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada tahun ini, terdapat pembiayaan baru untuk proyek pengembangan pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi, yang diharapkan dapat mendukung target SDG 9.1 yakni untuk mengembangkan infrastruktur regional dan lintas batas, serta mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. IIF juga membiayai salah satu kawasan industri yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target SDG 8.

Berbagai peran dan inisiatif IIF dalam mendukung pembangunan berkelanjutan turut mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal yang ditunjukkan dengan berbagai penghargaan terkait keberlanjutan yang diterima di 2022. Selain itu, IIF juga dipercaya menjadi tuan rumah untuk peluncuran *ESG Framework and Manual* Kementerian Keuangan yang merupakan serangkaian dari *G20 Side Event*. Tahun 2022 ini juga merupakan tahun di mana IIF mengembangkan cakupan jasa konsultasinya dengan menyediakan jasa konsultasi terkait ESG. IIF juga terus berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepedulian dan pengetahuan terkait perlindungan sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

2022 has been quite a complex year, with the various challenges faced by the Company. However, this does not hinder IIF from progressing and contributing to sustainable development. IIF keep records the double digit growth, while ensuring that the Social and Environmental risks and impacts of each financed projects are adequately managed.

IIF's financing of infrastructure projects in Indonesia is expected to significantly contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This year, IIF is providing new financing for port and telecommunications projects. These projects are aligned with SDG 9.1 targets, which will support the development of regional and cross-border infrastructure, promote economic growth, increase employment opportunities, and enhance human welfare, with a focus on affordable and equitable access. IIF also provides financing to an industrial estate project which is expected to create decent work and economic opportunities for all, in alignment with SDG 8 target.

IIF's various roles and initiatives in contributing to sustainable development have succeeded in gaining external recognition by receiving multiple awards related to sustainability. In addition to the achievement, IIF was entrusted to host the launch of the Ministry of Finance's ESG Framework and Manual which is a series of the G20 Side Event. This year IIF also expands its scope of consulting services by providing ESG advisory services. IIF continues to play an active role in contributing to increasing awareness and knowledge related to social and environmental safeguards in infrastructure development.



Tentang Laporan Keberlanjutan

About the Sustainability Report



Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan IIF terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menyampaikan kinerja dan kontribusi Perseroan dalam mewujudkan usaha yang berkelanjutan, termasuk dukungan percepatan pertumbuhan perekonomian nasional melalui pembiayaan infrastruktur.

This report is prepared as a form of IIF's commitment and compliance with applicable laws and regulations, as well as to convey the Company's performance and contribution in realizing a sustainable business, including support for accelerating national economic growth through infrastructure financing.



Laporan Keberlanjutan IIF merupakan upaya IIF untuk menyampaikan komitmen, kinerja, dan kegiatan usaha keberlanjutan serta dukungan percepatan pertumbuhan perekonomian nasional melalui pembiayaan infrastruktur. Laporan ini juga menjelaskan berbagai kebijakan dan inisiatif yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Global atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Laporan Keberlanjutan ini diterbitkan setiap tahunnya bersamaan dengan penerbitan Laporan Tahunan dengan periode pelaporan 1 Januari 2022-31 Desember 2022. Laporan ini merupakan laporan keempat yang dipublikasikan IIF, di mana Laporan Keberlanjutan sebelumnya dapat diakses di laman web IIF (<https://iif.co.id/en/investor/financial-informations/sustainability-report/>). **[GRI 2-3]**

STANDAR PELAPORAN

Laporan Keberlanjutan ini disusun sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan IIF terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang kewajiban perseroan untuk menyampaikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setiap tahun dan Peraturan OJK (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Adapun struktur dan isi laporan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

This Sustainability Report aims to communicate IIF's commitment, performance, and sustainable business activities, while supporting the acceleration of nation's economic growth through infrastructure financing. This report also outlines various policies and initiatives aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs).

IIF publishes its Sustainability Report annually along with the publication of its Annual Report with a reporting period covering January 1, 2022 to December 31, 2022. This is the fourth report published by IIF, whereas the previous Sustainability Report can be accessed on IIF's website (<https://iif.co.id/en/investor/financial-informations/sustainability-report/>). **[GRI 2-3]**

REPORTING STANDARDS

This Sustainability Report is prepared to manifest IIF's commitment and compliance with applicable laws and regulations, namely Law No. 40 of 2007 concerning the corporate obligation to submit an annual Social and Environmental Responsibility Report and OJK Regulation (POJK) No. 51/POJK. 03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. The structure and contents of the report refer to OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Selain berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut, IIF juga menyusun Laporan Keberlanjutan ini berdasarkan panduan Global Reporting Initiative (GRI) 2021 dengan opsi "With Reference".

CAKUPAN DAN BATASAN LAPORAN

Cakupan dan batasan pada laporan ini difokuskan pada tiga aspek utama yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. IIF tidak memiliki entitas anak perusahaan sehingga laporan keuangan dan batasan topik material hanya mencakup entitas PT Indonesia Infrastructure Finance dan tidak termasuk induk perusahaan maupun proyek-proyek yang dibiayai. [GRI 2-2]

Meski demikian, IIF tetap berupaya mengungkapkan pencapaian dan dampak tertentu dari proyek-proyek yang dibiayai seperti dampak ekonomi tidak langsung maupun perhitungan energi beberapa proyek. IIF telah mempertimbangkan secara menyeluruh asumsi-asumsi tertentu dan telah memutuskan untuk memasukkan data keberlanjutan dari proyek-proyeknya dalam laporan ini untuk memperlihatkan dampak keberlanjutan dari proyek.

Pada proses validasi data, IIF belum menggunakan *assurance* eksternal sehingga proses validasi masih dilakukan secara internal. Pada laporan tahun ini terdapat penyesuaian kembali terkait dengan data pengurangan emisi dari proyek-proyek Energi Terbarukan yang dibiayai oleh IIF, dimana perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode IPCC. Oleh karena itu, data dari tahun-tahun sebelumnya dihitung ulang dan disajikan kembali dalam laporan ini. [GRI 2-4] [GRI 2-5]

PENENTUAN MATERIALITAS

Dalam menentukan materialitas, IIF berpedoman pada empat prinsip di GRI yaitu Inklusivitas Pemangku Kepentingan, Konteks Keberlanjutan, Materialitas, dan Kelengkapan. Perseroan juga menggunakan Prinsip Sosial dan Lingkungan (*Social & Environment* (S&E)) IIF serta melibatkan berbagai unit dan departemen yang menjadi landasan untuk mempertimbangkan dampak serta topik-topik keberlanjutan yang relevan terhadap pemangku kepentingan. Adapun materialitas pada laporan ini ditentukan melalui tahapan sebagai berikut: [GRI 3-1]

1. Identifikasi

Sejumlah isu dan topik keberlanjutan yang relevan diidentifikasi melalui diskusi dengan unit dan departemen untuk mengetahui dampak serta topik yang sesuai dengan ketersediaan informasi, kapasitas IIF, dan preferensi dari berbagai pemangku kepentingan.

2. Prioritas

Tinjauan internal diadakan untuk memprioritaskan topik sesuai dengan dampak dan pengaruhnya.

3. Validasi

Validasi atas isu dan topik yang muncul tersebut dilakukan melalui diskusi dengan manajemen puncak Perseroan, para pemimpin senior, hingga tingkat pelaksana kerja. Beberapa isu yang termasuk dalam daftar topik material untuk laporan ini adalah etika bisnis, tata kelola perusahaan, masalah lingkungan dan sosial.

Besides using the above regulations as guidelines, IIF has also prepared this Sustainability Report based on the 2021 Global Reporting Initiative (GRI) guidelines with the option "With Reference."

SCOPE AND LIMITATION OF THE REPORT

The scope and limitations of this report are focused on three main aspects: economic, environmental, and social. IIF does not have subsidiaries, meaning that the financial statements and material topic boundaries only cover the PT Indonesia Infrastructure Finance entity and exclude the parent company or the projects it finances. [GRI 2-2]

However, IIF continues to disclose certain achievements and impacts from the funded projects, such as indirect economic impacts and energy calculations for several projects. IIF has thoroughly taken into account certain assumptions and has decided to include the sustainability data from the projects in this report to show the projects' sustainability impact.

As for the data validation process, IIF has not used the service of any external party for assurance, so the validation process is still carried out internally. In this report, there are adjustments related to the emission reduction data from Renewable Energy projects financed by IIF, where calculations are made using the IPCC method. Therefore, data from previous years is recalculated and restated in this report. [GRI 2-4][GRI 2-5]

MATERIALITY DETERMINATION

To define materiality, GRI offers four principles that can be used to determine the reporting content, which includes Stakeholder Inclusiveness, Sustainability Context, Materiality, and Completeness. The Company also uses the IIF Social and Environmental Principles and involves various units and departments to help consider the impacts and topics relevant to its stakeholders' decisions. The materiality of this report is determined through the following stages: [GRI 3-1]

1. Identification

Several relevant issues and topics were identified through discussions with various units and departments to determine the impacts and topics in accordance with the availability of information, IIF's capacity, and the preferences of various stakeholders.

2. Priority

Internal reviews were held to prioritize certain topics depending on their impacts and influences.

3. Validation

Issues and topics were validated through discussions with the Company's top management, senior team leaders, up to the functional level. Some of the issues included in the list of material topics of this report are business ethics, corporate governance, and environmental and social issues.

TOPIK MATERIAL

Dalam menentukan topik material, IIF menggunakan metode *materiality assessment* sesuai dengan panduan Standar GRI, yang kemudian masing-masing topik dikategorikan sebagai *Most Important*, *More Important*, dan *Important*. Matriks materialitas, isi, dan batasan untuk Laporan Keberlanjutan IIF tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut adalah daftar topik material Laporan Keberlanjutan 2022: **[GRI 3-2]**

- 1 Dampak Ekonomi Tidak Langsung
Indirect Economic Impact
- 2 Anti-Korupsi
Anti-Corruption
- 3 Energi
Energy
- 4 Air dan Efluen
Water and Effluent
- 5 Keanekaragaman Hayati
Biodiversity
- 6 Emisi
Emissions
- 7 Ketenagakerjaan
Employment
- 8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Occupational Health and Safety
- 9 Pelatihan dan Pendidikan
Training and Education

MATERIAL TOPIC

In determining material topics, IIF applies the materiality assessment method in accordance with the GRI Standard guidelines, where each topic is categorized as *Most Important*, *More Important*, and *Important*. The materiality matrix, content, and boundaries for the 2022 IIF Sustainability Report have stayed the same from the previous year. The following is the list of material topics for the 2022 Sustainability Report: **[GRI 3-2]**



No.	Topik Material [GRI 3-2] Material Topic	Penjelasan Topik Material [GRI 3-2] Description of Material Topic
1	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Proyek-proyek yang dibiayai IIF akan memiliki dampak ekonomi tidak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Topik ini menjadi salah satu topik utama bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan. The projects that IIF finances will have indirect economic impacts on the development and improvement of the welfare of the communities residing around the projects. This topic has become one of the main topics for the Company and its stakeholders.
2	Anti-Korupsi Anti-Corruption	IIF memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan proyek-proyek infrastruktur telah dilakukan secara transparan tanpa adanya konflik kepentingan yang dapat berujung pada tindak korupsi dan tindakan-tindakan tidak berintegritas lainnya. Oleh karena itu, IIF memasukkan topik anti-korupsi sebagai salah satu topik material dalam laporan ini. IIF ensures that the entire financing process in our infrastructure projects has been carried out transparently without any conflicts of interest that could have otherwise led to corruption and other fraudulent acts. Therefore, IIF includes the topic of anti-corruption as one of the material topics in this report.
3	Energi Energy	Salah satu fokus utama pemerintah dalam aksi perubahan iklim adalah mengurangi emisi karbon, termasuk upaya dalam mencapai <i>net-zero emission</i> pada 2060. Sehingga pengelolaan dan penggunaan energi dalam kegiatan operasional Perseroan serta proyek-proyek yang dibiayai menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan. One of the government's main focuses in climate change action is reducing carbon emissions, including efforts to reach <i>net-zero emissions</i> by 2060. Hence, the energy management and utilization in the Company's operational activities as well as financed projects become an important concern for stakeholders.
4	Air dan Efluen Water and Effluent	Adanya potensi polusi dan kelangkaan air di beberapa wilayah di Indonesia merupakan risiko yang perlu untuk dikelola sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi IIF untuk memastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang dibiayai telah mengikuti standar dan aturan yang berlaku dalam upaya menjaga kualitas dan kuantitas air yang digunakan atau berada di sekitar lokasi proyek. The potential risk of water pollution and scarcity in some regions of Indonesia needs to be managed in accordance with applicable standards and regulations. This becomes IIF's responsibility to ensure that all projects financed comply with applicable standards and regulations to maintain water quality and quantity used or around project sites.

No.	Topik Material [GRI 3-2] Material Topic	Penjelasan Topik Material [GRI 3-2] Description of Material Topic
5	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	IIF menyadari pentingnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengelolaan terhadap jasa ekosistem dan sumber daya alam secara berkelanjutan dari lokasi proyek-proyek yang dibiayai. Untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap keanekaragaman hayati, IIF memastikan klien untuk dapat melakukan kajian dampak proyek pada semua tingkatan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari proses penilaian sosial dan lingkungan. IIF recognizes the importance of biodiversity protection and conservation, as well as the sustainable management of ecosystem services and natural resources of the projects' locations that IIF finances. In order to avoid and minimize adverse impacts on biodiversity, IIF encourages its clients to conduct an impact assessment on all levels of biodiversity as an integral part of the social and environmental assessment process.
6	Emisi Emission	Tingkat emisi gas rumah kaca (GHG) berpotensi untuk menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. IIF berkomitmen untuk meningkatkan upaya dalam mengurangi emisi GHG dari proyek yang dibiayai sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Prinsip S&E No. 3 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Perubahan Iklim. The levels of greenhouse gases (GHG) emission in the atmosphere pose a significant risk to the wellbeing of both present and future generations. IIF is committed to enhance the efforts to reduce the GHG emission from the financed project as part of compliance to S&E Principle No. 3 on the Pollution Prevention and Abatement and Climate Change.
7	Ketenagakerjaan Employment	IIF berkomitmen untuk membuka kesempatan kerja tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, dan agama. IIF melakukan rekrutmen secara transparan dan adil tanpa membedakan latar belakang tertentu. IIF is committed to providing job opportunities regardless of gender, ethnicity, race, and religion. IIF conducts recruitment in a transparent and fairly manner without prejudice against certain backgrounds.
8	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (OHS)	IIF menyadari bahwa kegiatan pembangunan proyek harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja. IIF juga memastikan bahwa seluruh proyek yang dibiayai telah menerapkan aspek-aspek K3 sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. IIF realizes that project development activities must pay attention to the health and safety of workers. IIF also ensures that all the financed projects have implemented OHS aspects in accordance with applicable rules and guidelines.
9	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan menjadi aspek penting dalam kegiatan Perseroan terutama dalam menyamakan persepsi dan semangat untuk menjalankan prinsip S&E. Employee development through training and education is an important aspect of the Company's activities, especially in sharing the same perceptions and enthusiasm for implementing S&E principles.

Untuk korespondensi lebih lanjut terkait Laporan Keberlanjutan ini, IIF telah menyediakan form umpan balik pada halaman 109 yang dapat dikirimkan melalui beberapa jalur komunikasi berikut:

[GRI 2-3]

To correspond further with IIF on this Sustainability Report, IIF has provided a feedback form on page 109 that can be submitted through the following communication lines: [GRI 2-3]

Sustainable Finance Working Group (SFWG)

PT Indonesia Infrastructure Finance
Prosperity Tower Floor 53rd–55th
Lot 28, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : (62-21) 5082 6600
Fax. : (62-21) 5082 6601
E-mail : SFWG.Coord-Secr@iif.co.id

Strategi Keberlanjutan [OJK A.1]

Sustainability Strategy



IIF menganut prinsip *triple bottom line* yang terdiri dari 3P (*People, Planet, dan Profit*) untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi proyek dengan pengelolaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Prinsip tersebut dituangkan melalui mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan (*S&E Principles*).

IIF adheres to the triple bottom line principle which consists of 3P (*People, Planet and Profit*) to ensure infrastructure projects' economic benefits balance out their social and environmental impacts. The principle is outlined in a financing mechanism that is integrated into the application of the Social and Environmental (*S&E*) Principles.



Infrastruktur memiliki peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam percepatan pembangunan Nasional. Penyediaan infrastruktur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dilakukan dalam upaya pemerataan pembangunan, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas hidup sehingga menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Dengan tersedianya infrastruktur maka akan tercipta *multiplier effect* yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Dalam prosesnya, pembiayaan proyek-proyek infrastruktur menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan peningkatan sarana infrastruktur tersebut. Sebagai perusahaan yang menyediakan pembiayaan dan layanan konsultasi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, IIF memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyediakan produk dan layanan yang berkelanjutan serta mendorong sumber pendanaan jangka panjang proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Dalam memberikan pembiayaan dan konsultasi, IIF menganut prinsip *triple bottom line* yang terdiri dari 3P (*People, Planet, dan Profit*) untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi proyek dengan pengelolaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Prinsip tersebut dituangkan melalui mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan (*Social and*

Infrastructure plays an important role as one of the drivers of economic growth that accelerate the nation-building program. Provision of infrastructure with adequate quantity and quality is carried out in an effort to distribute development equally, eliminate poverties, and improve the quality of people's lives, which are often used to measure how much a country has progressed. Infrastructure will create a multiplier effect that, in return, will boost the country's economy.

During the process, the financing of infrastructure projects become important in ensuring the sustainable improvements of that infrastructure facilities. As a company that provides financing and advisory services for infrastructure development in Indonesia, IIF plays a key role while bearing the responsibility to provide sustainable products and services and facilitate long-term sources of funding for infrastructure projects in Indonesia.

In providing financing and advisory services, IIF adheres to the triple bottom line principle, which consists of 3P (*People, Planet and Profit*) to ensure infrastructure projects' economic benefits balance out their social and environmental impacts. The principle is outlined in a financing mechanism that is integrated into the application of the Social and Environmental (*S&E*) Principles. IIF is committed to

Environmental (S&E) Principles). IIF berkomitmen untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip S&E pada setiap proyek infrastruktur yang dibiayai sehingga dapat meminimalkan potensi dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan proyek infrastruktur.

PRINSIP KEBERLANJUTAN

Prinsip Sosial dan Lingkungan (Prinsip S&E) atau *Social and Environmental Principles (S&E Principles)* merupakan standar yang digunakan oleh IIF untuk memastikan klien mengelola, memitigasi, dan meminimalkan dampak serta risiko dari masalah sosial dan lingkungan dari proyek infrastruktur. IIF berkomitmen untuk memastikan terpenuhinya Prinsip S&E pada proyek infrastruktur yang dibiayai dengan berpedoman pada panduan operasional IIF yang telah disusun dalam Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Management System—SEMS*). [GRI 2-23][GRI 2-24]

SEMS berisikan panduan operasional penerapan 8 Prinsip S&E yang menjadi acuan dalam penilaian risiko dan dampak proyek terhadap aspek sosial dan lingkungan.

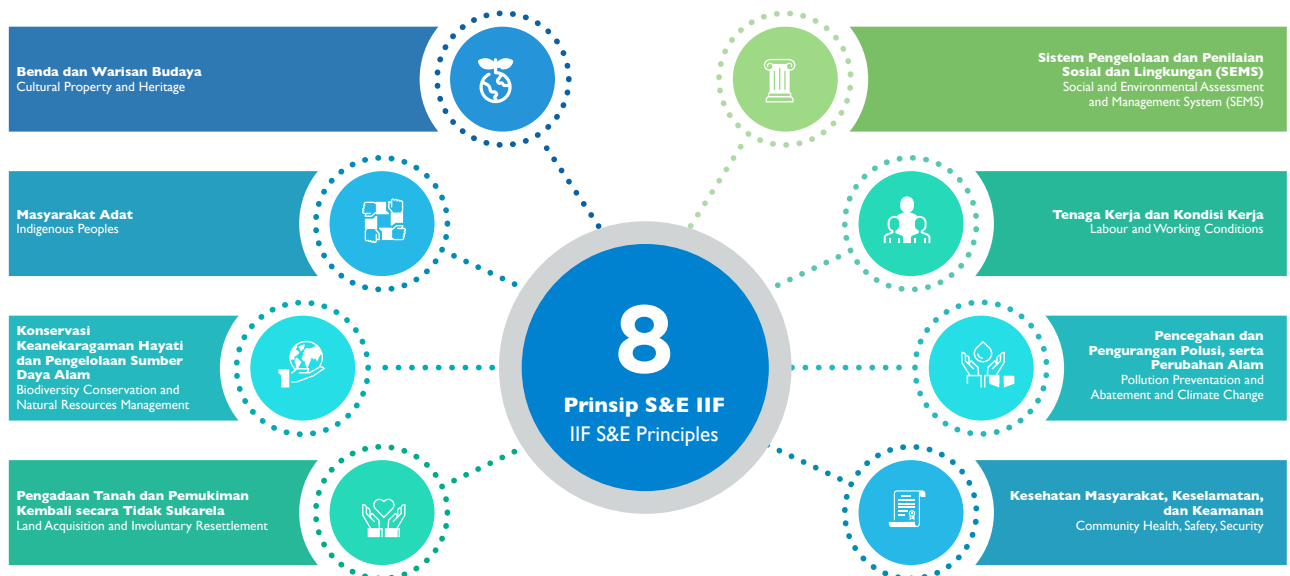
ensuring the S&E principles are adhered to in all of the infrastructure projects under its portfolio to minimize the negative impacts that are inherent in the projects.

SUSTAINABILITY PRINCIPLES

Social and Environmental Principles (S&E Principles) are the standards that IIF has adopted to ensure all of its clients properly manage, mitigate, and minimize the impacts and risks of social and environmental issues in each project. IIF is committed to ensure the S&E Principles in infrastructure projects financed are met by referring them to IIF's operation manual compiled in the Social and Environmental Management System—SEMS).

[GRI 2-23][GRI 2-24]

The SEMS contains operational manuals for implementing the 8 S&E Principles used as a reference in assessing project risks and impacts on social and environmental aspects.



Prinsip S&E tersebut juga akan menegaskan peran IIF dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan sesuai dengan prinsip keberlanjutan IIF. Prinsip keberlanjutan IIF merupakan gabungan dari praktik-praktik dan standar internasional yang dapat membuat para investor asing yang akan bekerja sama atau berinvestasi pada Perseroan merasa aman karena semua proyek IIF telah memenuhi standar sosial dan lingkungan bertaraf internasional.

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh LPEM UI pada tahun 2021, berikut ini merupakan beberapa nilai tambah dari Prinsip S&E yang diterapkan oleh IIF:

- Prinsip S&E IIF mampu mengidentifikasi potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan dengan lebih komprehensif. Sebagai contoh, Prinsip S&E IIF mencakup penilaian terhadap dampak proyek terhadap tenaga kerja dan kondisi kerja, masyarakat adat, serta benda dan warisan budaya yang acap kali masih minim analisisnya di dalam dokumen lingkungan proyek.

The S&E principles will also emphasize IIF's role in maintaining and improving social and environmental quality in accordance with IIF's sustainability principle. The principle is a combined approach towards international practices and standards that can make cooperating or investing foreign investors feel safe because all IIF projects have met international social and environmental standards.

Based on a report prepared by LPEM UI in 2021, the following are some of the added values of the S&E Principles implemented by IIF:

- IIF's S&E Principles able to identify potential social and environmental risks and impacts in a more comprehensive manner. For example, IIF's S&E Principles assess the project's impact on workforce and working conditions, indigenous peoples, and cultural objects and heritage, which often needs more analysis in project environmental documents.

- Prinsip S&E IIF menyediakan rencana aksi mitigasi yang lebih komprehensif dan detail. Sebagai contoh, IIF memastikan bahwa pemulihan mata pencaharian atau penghidupan masyarakat yang terdampak dilakukan dan dikelola dengan baik oleh proyek dan tertuang dalam dokumen rencana yang strategis.
- Prinsip S&E IIF mendukung terciptanya SEMS di masing-masing proyek untuk membantu debitur dalam mengelola risiko dan dampak sosial dan lingkungan disepanjang siklus proyek.
- Prinsip S&E IIF menerapkan standar yang lebih ketat di beberapa aspek sosial dan lingkungan, dengan memastikan penerapan praktik-praktik dan standar bertaraf internasional.
- Prinsip S&E IIF mendorong terlaksananya pemantauan secara berkala oleh proyek untuk memastikan penerapan aksi mitigasi yang direncanakan telah memenuhi standar yang berlaku.

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sebagaimana tercantum dalam POJK No. 51/POJK.03/2017, IIF berada dalam kategori Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki kewajiban untuk menyusun RAKB untuk disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya serta menerapkan AKB disepanjang tahun tersebut. Seluruh proses penyusunan RAKB IIF dilakukan secara internal dengan melibatkan berbagai divisi terkait.

Dalam menyusun RAKB, Perseroan merujuk pada dasar hukum terkait dengan keuangan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- Perjanjian Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah terakhir kali dinyatakan pada *Fourth Amendment and Restatement of Shareholders Agreement* tanggal 10 April 2018;
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 43 tanggal 24 Juli 2018.

Dalam proses penyusunan RAKB, IIF juga mengacu pada Dokumen Lampiran I terkait dengan Pedoman Petunjuk Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, IIF juga menerapkan praktik-praktik berstandar internasional dalam pelaksanaan perlindungan S&E melalui Prinsip S&E yang sesuai dengan IFC Performance Standard tahun 2012 sebagai upaya untuk menanamkan prinsip berkelanjutan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

- IIF's S&E Principles offer a more comprehensive and detailed mitigation action plan. For example, IIF ensures that the livelihoods of affected communities are restored and managed properly by the projects and contained in a strategic planning document.
- IIF's S&E principles promote establishment of SEMS in each project which assists debtors in managing social and environmental risks and impacts throughout the project cycle.
- IIF's S&E Principles apply stringent standards in several social and environmental aspects by ensuring the implementation of international practices and standard.
- IIF's S&E Principles encourage regular monitoring by projects to ensure the implementation of the planned mitigation actions meets the applicable standards.

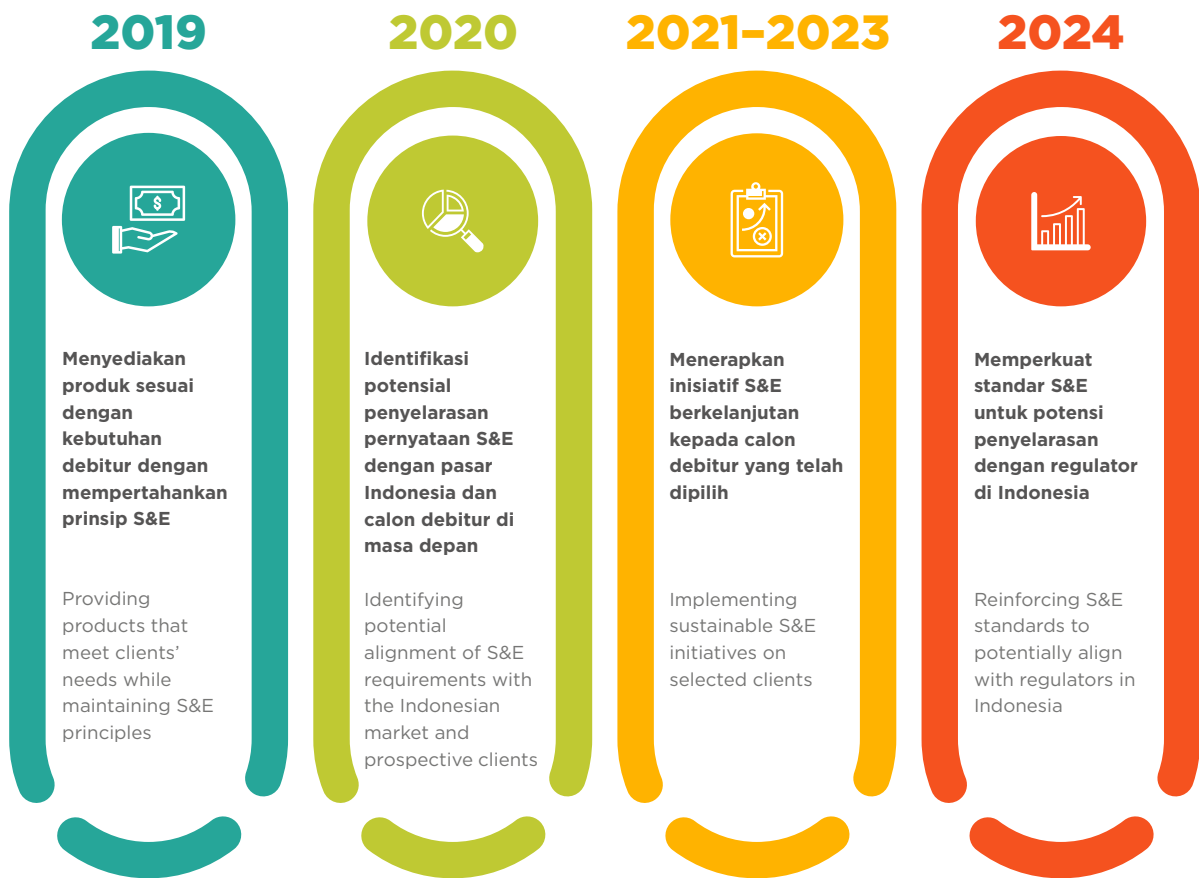
SUSTAINABLE FINANCE ACTION PLAN

As stated in POJK No. 51/POJK.03/2017, IIF falls under the Infrastructure Financing Company category that shall prepare and submit its Work Plan and Budget (RAKB) by the November 30 of each fiscal year and work the plan throughout the following year. The entire process of preparing IIF's RAKB is run internally and involves various related divisions.

In preparing the RAKB, the Company refers to the legal basis related to sustainable finance, as given below:

- Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of the Sustainable Development Goals;
- OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies;
- The Company's Shareholders Agreement as last stated in the Fourth Amendment and Restatement of Shareholders Agreement dated April 10, 2018;
- The Company's Articles of Association as last amended through the Deed of Amendment and Restatement No. 43 dated July 24, 2018.

In its RAKB preparation process, IIF also refers to the Appendix I Document related to POJK Technical Guidelines No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. In addition, IIF also applies international standards in the implementation of S&E safeguards through the S&E Principles in accordance with the 2012 IFC Performance Standard as an effort to embed sustainable principles in infrastructure development projects in Indonesia.



Sejak tahun 2021, IIF membentuk kelompok kerja khusus yang disebut *Sustainable Finance Working Group (SFWG)* yang bertanggung jawab untuk menyusun RAKB. RAKB yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Direksi sebagai bentuk pengelolaan Program RAKB yang mendukung Visi dan Misi IIF serta tujuan dari penerapan RAKB. Lebih lanjut, RAKB ini disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian saran terhadap pengelolaan RAKB yang dilakukan oleh IIF. RAKB yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya akan disampaikan kepada OJK sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017.

Pada RAKB 2022, IIF memiliki tiga prioritas yang direncanakan sebagai bagian dari aksi keuangan berkelanjutan, yaitu penyesuaian organisasi dan tata kelola penerapan Keuangan Berkelanjutan, pengembangan kapasitas internal IIF terkait dengan Keuangan Berkelanjutan, dan pengembangan produk atau jasa keuangan berkelanjutan.

Penyesuaian Organisasi dan Tata Kelola Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Program ini menjadi prioritas pertama dikarenakan adanya pembentukan dan penunjukan SFWG di tahun 2021 sebagai kelompok kerja baru yang berperan untuk merumuskan dan melaksanakan RAKB. Di tahun 2022, SFWG yang terdiri atas perwakilan dari

Since 2021, IIF has formed a special working group referred the Sustainable Finance Working Group (SFWG), which is tasked with preparing the RAKB. Once prepared, the RAKB is then submitted to the Board of Directors as part of managing the RAKB program that can support IIF's Vision and Mission and reach the objectives therein. The RAKB is also submitted to the Board of Commissioners to assist the board in exercising its oversight and advisory functions on how IIF manages the RAKB. Upon approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners, the RAKB will then be submitted to OJK as a form of compliance with POJK No. 51/POJK.03/2017.

IIF placed three priorities in its 2022 RAKB as part of the Company's sustainable finance action, respectively, on organizational adjustments and governance for the implementation of Sustainable Finance, internal capacity building related to Sustainable Finance, and development of sustainable financial products or services.

Organizational and Governance Adjustments in Sustainable Finance

IIF prioritizes this program due to the formation and appointment of the Company's SFWG in 2021 as a new working group whose role is to formulate and implement the RAKB. In 2022, the SFWG, which was made up of representatives from various divisions, worked in

berbagai divisi perlu untuk bersinergi dalam mendefinisikan kembali atau menyusun target serta strategi-strategi keuangan berkelanjutan yang lebih terukur dan realistis untuk dapat dilaksanakan.

IIF juga dapat menyesuaikan *Corporate Sustainability Target* dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga dapat tercapainya suatu keselarasan antara pelaksanaan di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, perlu adanya tata kelola yang baik dalam hal pembagian peran diantara divisi dalam mewujudkan pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin antar divisi untuk mengevaluasi target dan pencapaian IIF dalam hal penerapan aksi keuangan berkelanjutan.

Pengembangan Kapasitas Internal IIF terkait dengan Keuangan Berkelanjutan

Setelah penyesuaian target dan tata kelola penerapan keuangan berkelanjutan terdefinisi dengan baik, pembagian peran dari divisi-divisi terkait yang terlibat akan terlihat dengan lebih jelas. IIF melakukan peningkatan kapasitas internal terhadap divisi-divisi tersebut untuk meningkatkan penerapan aksi keuangan berkelanjutan. Selain itu sosialisasi terkait dengan aksi keuangan berkelanjutan juga akan disampaikan kepada seluruh karyawan IIF secara bertahap. Dalam pengembangan kapasitas tersebut, IIF bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti OJK, Pemegang Saham IIF, dan lainnya yang sudah memiliki pengalaman dalam menerapkan aksi keuangan yang berkelanjutan. [GRI 2-24]

Pengembangan Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Prioritas ketiga adalah dengan melanjutkan peningkatan pembiayaan kepada proyek-proyek yang masuk ke dalam kriteria dan kategori Keuangan Berkelanjutan dengan tetap memastikan implementasi 8 Prinsip S&E kepada debitur atau penanggung jawab proyek.

PENCAPAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN 2022

Target Strategi Bisnis Jangka Pendek I Tahun One-year Target

Target	Realisasi Realization
Meningkatkan portofolio investasi pada proyek infrastruktur yang berprinsip sosial dan lingkungan.	Semua pembiayaan infrastruktur yang dibiayai oleh IIF selalu didasari oleh prinsip sosial dan lingkungan. Sepanjang tahun 2022, IIF telah membukukan 10 komitmen dengan nilai Rp1,7triliun.
Broadening investment portfolio in infrastructure projects that carry social Environmental principles.	All infrastructure financing financed by IIF is always based on social and environmental principles. Throughout 2022, IIF has booked 10 commitments with a value of Rp1.7 trillion.
Fokus pada kesepakatan yang bernilai tambah tinggi sambil mempromosikan peran IIF sebagai katalis dan <i>enabler</i> (<i>junior financing</i> , PPP dan kesepakatan <i>project finance</i>);	- Sepanjang tahun 2022, IIF melanjutkan perannya sebagai katalis dan <i>enabler</i> dalam pembangunan infrastruktur. - IIF juga akan melanjutkan untuk fokus pada skema pembiayaan proyek, terutama untuk proyek <i>greenfield</i> dan <i>brownfield</i> yang memberikan harga yang lebih baik. - Selain itu IIF telah berhasil mendapatkan 8 mandat pekerjaan untuk bisnis <i>Advisory</i>, di mana 2 pekerjaannya adalah sebagai penasihat bidang ESG. - Sebagai informasi tambahan, IIF turut mendukung program Pemerintah dalam perumusan Kerangka Kerja dan Manual ESG yang diterbitkan di bulan November 2022 pada rangkaian acara G20.

synergy to redefine and formulate more measurable and realistic targets and strategies for sustainable finance.

IIF can also adjust the Corporate Sustainability Target with the Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure national and international achievements are aligned. There is also a need for good governance where IIF's divisions are assigned different roles to implement sustainable financial actions. One of the ways to do this is by organizing regular meetings between divisions to evaluate IIF's achievements vs. its stated targets in implementing sustainable finance actions.

IIF Internal Capacity Development related to Sustainable Finance

Well-defined adjustments to targets and governance of implementing sustainable finance will clarify the different roles of the relevant divisions involved. For each division, IIF conducts internal capacity building to improve the implementation of sustainable financial actions. IIF will then gradually disseminate sustainable financial actions to all its employees. Where applicable, IIF works with related parties such as OJK, IIF Shareholders, and other parties with proven experience in implementing sustainable financial actions. [GRI 2-24]

Development of Sustainable Financial Products or Services

The third priority is to continue increasing financing for projects that fall under the criteria and category of Sustainable Finance while ensuring the implementation of the 8 S&E Principles for the debtor or project owners.

SUSTAINABLE FINANCE ACTION TARGETS AND REALIZATION 2022

Target	Realisasi Realization
Focusing on providing high value-added financing while promoting the Company's role as a catalyst and enabler (junior financing, PPP, and project finance).	- Throughout 2022, IIF continued to play its mandated role as a catalyst and enabler of infrastructure development. - IIF also continued to focus on project financing schemes, especially for greenfield and brown-field projects with better price offering. - In addition, IIF successfully secured 8 assignments in the Advisory business, including 2 as ESG advisors. - As additional information, IIF also supported the Government's program in formulating ESG Framework and Manual that were later published in November 2022 during the G20 series of events.
Mengembangkan dan meningkatkan produk dan jasa <i>fee-based (non-funded product)</i> .	Di tahun 2022, IIF berhasil mencatatkan pendapatan pada bisnis <i>Advisory</i> yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 82%. IIF juga berhasil membukukan <i>fee-based income</i> dari produk <i>non cash loan</i> yang lebih tinggi 12% dari tahun sebelumnya. Ke depannya IIF akan terus melanjutkan fokusnya untuk memaksimalkan pendapatan dari selain bunga untuk dapat meningkatkan ROA. Adapun beberapa program kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain berkolaborasi dengan Industri Asuransi, menjadi agen Bank komersial, <i>blended financing</i> , dan <i>sustainable infrastructure fund</i> , <i>credit enhancement</i> , dan <i>takeout financing</i> .
Develop and improve fee-based (non-funded) products and services.	In 2022, IIF was successful in generating a higher revenue in the Advisory business than the previous year by 82%. IIF also generated fee-based income from non-cash loan products at 12% higher than the previous year. Going forward, IIF will continue to focus on maximizing non-interest income to increase ROA. Some of the cooperation programs in the pipeline include collaboration with the insurance industry, as an agent for commercial banks, blended financing, and sustainable infrastructure funds, credit enhancement, and takeout financing.
Secara berkelanjutan melakukan diversifikasi pada sektor-sektor baru (di antaranya infrastruktur sosial) dan pengembangan aspek sosial dan lingkungan.	Secara berkelanjutan IIF akan menciptakan dan meluncurkan produk dan jasa yang baru untuk meningkatkan potensi pendapatan. Ke depannya IIF akan terus mendukung pembangunan semua sektor infrastruktur yang memenuhi syarat, dengan penekanan untuk masuk ke sektor-sektor yang belum dimanfaatkan seperti perumahan rakyat, pendidikan dan distribusi pangan; terus mengisi kesenjangan pasar pembiayaan infrastruktur dengan menerbitkan produk dan layanan baru, seperti pembiayaan campuran dan daur ulang aset melalui pasar modal; dan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal lainnya untuk menawarkan layanan tambahan kepada klien.
Sustainably diversifying into new sectors (including social infrastructure) and developing social and environmental aspects.	In a sustainable way, IIF will innovate and launch new products and services to increase revenue potential. Going forward, IIF will continue to support the development of all eligible infrastructure sectors, with an emphasis on exploring the untapped sectors such as public housing, education and food distribution; continue to fill gaps in the infrastructure financing market by introducing new products and services, such as mixed financing and asset recycling through the capital market; and continue to work with other external stakeholders to offer additional services to clients.
Meningkatkan peran <i>Advisory</i> , salah satunya dengan mengembangkan pelayanan konsultasi prinsip keuangan berkelanjutan.	Untuk jasa konsultasi keuangan, IIF memberikan masukan kepada klien dengan mempertimbangkan penerapan pembiayaan berkelanjutan. Di samping itu, untuk jasa transaksi proyek, IIF juga mendorong para klien sektor publik untuk menggunakan prinsip-prinsip ESG dalam persiapan proyeknya sehingga proyek dapat mengakses sumber pembiayaan berkelanjutan, seperti contohnya pada proyek KPBU di sektor perumahan rakyat. Pada tahun 2022, IIF telah memperoleh dua mandat ESG <i>Advisory</i> di sektor bandar udara dan pelabuhan laut, selain juga membantu Kementerian Keuangan dalam penyusunan ESG Framework dan ESG Manual untuk proyek-proyek infrastruktur yang memperoleh dukungan Pemerintah.
Increasing the Advisory role, including developing consulting services on sustainable finance principles.	In the financial consulting services, IIF provides input to clients with due regards to sustainable financing. In addition, for project transaction services, IIF also encourages public sector clients to apply ESG principles in their project preparation in order that the projects can access sustainable financing sources, e.g. PPP projects in the public housing sector. In 2022, IIF obtained two ESG advisory mandates in the airport and seaport sectors, and was assigned to assist the Ministry of Finance in preparing the ESG Framework and ESG Manual for infrastructure projects that receive Government support.

Target	Realisasi Realization
Peningkatan kinerja keuangan melalui optimalisasi manajemen portofolio Treasury, yang secara aktif mencari sumber pendanaan yang atraktif, dan mempertahankan efisiensi operasional melalui manajemen biaya aktif. Delivering stronger financial results by optimizing Treasury portfolio management, optimizing capital structure, actively seeking attractive funding sources, and maintaining operational efficiency through active cost management.	Divisi Treasury IIF secara aktif melakukan optimalisasi manajemen portofolio Treasury dalam mencari sumber pendanaan yang atraktif dan efisien dan mempertahankan efisiensi operasional melalui manajemen biaya aktif di antaranya melalui: • Mengelola biaya sumber pendanaan yang lebih rendah meskipun dengan trend suku bunga yang meningkat melalui <i>just-in-time funding</i>, dengan menyesuaikan realisasi penarikan pendanaan laju pertumbuhan aset investasi; • Menurunkan biaya <i>issuance fee</i> untuk fasilitas <i>non-cash loan</i> dari Bank Danamon; • Melampaui pencapaian target penarikan fasilitas dari ADB dan WB; • Mempererat hubungan dengan pelaku industri keuangan lainnya melalui pemberian fasilitas baru untuk <i>cash loan</i> sebesar Rp1,05 triliun dan <i>non-cash loan</i> sebesar Rp500 miliar; • Peningkatan pengelolaan likuiditas melalui penambahan fasilitas perbankan, <i>pooling of funding</i> dan peningkatan limit obligasi korporasi. The IIF Treasury Division actively optimizes Treasury portfolio management in finding attractive and efficient sources of funding and maintaining operational efficiency through active cost management, through e.g.: • Managing lower cost fund despite the increasing trend of interest rates through <i>just-in-time funding</i>, by adjusting the realization of funding withdrawals for the growth rate of investment assets; • Reducing the cost of the issuance fee for the non-cash loan facility from Bank Danamon; • Making higher achievement of facility withdrawal targets than set by ADB and WB; • Strengthening relationships with other financial industry players by providing new facilities for cash loans of Rp1.05 trillion and non-cash loans of Rp500 billion; • Improving liquidity management by adding banking facilities, pooling of funding and increasing corporate bond limits.
Optimalisasi struktur permodalan, melalui serangkaian <i>corporate action</i> untuk penambahan modal.	Dalam melaksanakan inisiatif optimalisasi struktur permodalan, langkah-langkah yang telah dilalui adalah sebagai berikut: • Melaksanakan diskusi dengan <i>existing shareholders</i> dan beberapa <i>potential investor</i>, terkait rencana peningkatan modal tersebut; • <i>Progress</i> rencana peningkatan modal telah mencapai fase pembahasan struktur instrumen yang lebih terfokus; PT SMI sebagai pemegang saham terbesar menyampaikan dukungan dan komitmennya terhadap rencana peningkatan modal IIF, namun sebelum mengambil langkah selanjutnya, PT SMI bermaksud mengadakan diskusi dengan pemegang saham pada awal tahun 2023 terlebih dahulu untuk membahas kelanjutan program tersebut.
Optimizing the capital structure, through a series of corporate actions to increase capital.	In carrying out the initiative to optimize capital structure, IIF took the following steps: • Discussing with existing shareholders and several potential investors, regarding the plan to increase the capital; • The capital increase plan has reached the discussion phase of a more focused instrument structure; PT SMI as the largest shareholder expressed its support and commitment to IIF's capital increase plan, however, before taking the next step, PT SMI intends to hold discussions with shareholders in early 2023 to discuss the continuation of the program.
Peningkatan Manajemen Risiko dengan meningkatkan sistem peringatan dini, memperkuat <i>credit due diligence</i>, dan <i>post approval monitoring</i>. Improving risk management by enhancing the early warning system, strengthening credit due diligence, and post-approval monitoring.	<i>Early Warning System</i> telah dibentuk sejak tahun 2021, di mana IIF memperkenalkan sistem ini untuk proses identifikasi, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap rekening yang terpantau memiliki peningkatan risiko kredit. Kegiatan ini dilaporkan ke Direksi setiap bulannya, termasuk dengan daftar rekening yang dipantau. <i>Early Warning System</i> has been established since 2021 where IIF introduced this system which allows the process of identifying, monitoring and following up on accounts observed to have increasing credit risk. This activity, including the list of the said accounts, will be reported to BOD IC each month.
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan kompetensi atas produk investasi ekuitas dan produk investasi ekuitas sejenis (<i>equity-like investment</i>) beserta risiko yang menyertainya, sosialisasi budaya perusahaan, dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pekerjaan.	• <i>Sharing session</i> terkait <i>Key Factors on the Implementation, the Risks and its Mitigations and the Operational Compliances of Equity Investment</i> yang diikuti oleh seluruh karyawan diadakan di bulan Maret 2022. • Sosialisasi budaya perusahaan telah melalui media <i>townhall meetings</i> di bulan September 2022 dan setiap <i>induction sessions</i> untuk karyawan baru tahun 2022. • Pengembangan sistem informasi telah dilakukan dengan telah digunakannya sistem <i>Employee Self-Service (Leave Management and Health Claim)</i> dan sistem <i>on-Boarding</i> pada bulan Mei 2022.

Target	Realisasi Realization
Improving human resource capabilities by giving more knowledge and increasing competence on equity investment products and equity-like investment products, socializing corporate culture, and developing information systems to support work efficiency and effectiveness.	- Sharing session held in March 2022 on Key Factors on the Implementation, the Risks and its Mitigations and the Operational Compliances of Equity Investment which was attended by all employees. - Dissemination of corporate culture through the media of town hall meetings in September 2022 and induction session for new employees in 2022. - Information system has been developed with the implementation of the Employee Self-Service (Leave Management and Health Claim) system and the on-Boarding system in May 2022.
Memperkuat sinergi lintas Direktorat untuk mendukung strategi aksi keuangan berkelanjutan dan strategi bisnis IIF secara keseluruhan.	- IIF menawarkan layanan terpadu <i>project financing</i> dan <i>Advisory</i> kepada klien, di mana klien yang didanai oleh IIF dapat juga menggunakan layanan <i>Advisory</i>, atau sebaliknya. Strategi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi klien dalam menerima <i>one-stop-service</i> dari IIF, dan memaksimalkan peran IIF sebagai katalis pembangunan proyek infrastruktur. - Sinergi juga dilakukan antara <i>Advisory</i> dengan Divisi S&E, di mana IIF dapat memonetisasi keahlian dan pengalaman IIF dalam melakukan ESG <i>due diligence</i> untuk memberikan layanan konsultasi kepada klien dalam menyiapkan pembiayaan proyek yang berkelanjutan. - Sehubungan IIF bukan penerima dana pihak ketiga, Direktorat Finance juga giat mencari pendanaan dari fasilitas-fasilitas perbankan dan institusi lain untuk memperkuat struktur permodalan ataupun sumber dana lainnya untuk penyediaan pembiayaan kepada klien/proyek. - Setiap pembiayaan IIF telah melalui uji kelayakan Sosial dan Lingkungan, sebagaimana fokus SED yang berada di bawah Direktorat Risiko selalu berdampingan dengan Divisi Investment maupun <i>Advisory</i> untuk memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip S&E. - Untuk mengkomunikasikan pencapaian dari segi kinerja atau performa, Corporate Secretary bertanggung jawab untuk mengemas dan mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan luar maupun dalam negeri. Agar pencapaian terukur dan menjadi <i>milestone</i> IIF, pentingnya saluran komunikasi formal untuk memberikan <i>update</i> kepada para pemangku kepentingan. Seperti dalam partisipasi <i>side event</i> G20, keikutsertaan dalam ajang penghargaan, ataupun memberi edukasi ke masyarakat umum melalui webinar, dan lain sebagainya.
Strengthening inter-directorate synergies to support the Company's strategy.	- IIF offered integrated project financing and Advisory services to clients who used funds from IIF or vice versa. This strategy was carried out to make it easier for clients to receive one-stop-service from IIF, and to maximize IIF's role as a catalyst for infrastructure project development. - IIF also builds synergy between its Advisory and S&E Division, whereby IIF can monetize IIF's expertise and experience in conducting ESG due diligence to provide advisory services to clients in preparing sustainable project financing. - Since IIF does not collect third party funds, the Directorate of Finance is also actively seeking funding facilities from banking and other institutions to strengthen the capital structure or other sources of funds to provide financing to clients/projects. - Every IIF financing has gone through Social and Environmental due diligence, as the focus of SED which is under the Risk Directorate who works in synergy with the Investment and Advisory Directorates to ensure financing adheres to S&E principles. - To communicate achievements in terms of results or performance, the Corporate Secretary is in charge to package and communicate to external and domestic stakeholders. In order to have measurable achievements and milestones, the importance of formal communication channels is to provide updates to stakeholders. This included participating in G20 side events, participating in award events, or providing education to the general public through webinars, etc.

Target Jangka Panjang 5 Tahun

5-year Long Term Target

Target	Progress 2022
Memanfaatkan penerapan 8 Prinsip S&E sebagai <i>Social & Environmental (S&E) Standards</i> dalam setiap proyek yang dibiayai oleh IIF, serta mendorong penerapan S&E Standards secara nasional melalui komunikasi dengan regulator. To utilize the application of the 8 S&E Principles as standards in every project financed by the Company, as well as encouraging the application of S&E Standards nationally through communication with regulators.	Divisi S&E IIF secara aktif berpartisipasi dalam mendorong penerapan ESG di skala nasional. Beberapa kontribusi penting Divisi S&E IIF antara lain: 1. Memberikan masukan dalam proses penyusunan ESG Framework dan Manual Kementerian Keuangan 2022; 2. Menjadi penyelenggara peluncuran ESG Framework dan Manual Kementerian Keuangan pada rangkaian acara G20, November 2022. IIF's S&E Division actively participated in encouraging the application of ESG on a national scale. Here are some of the important contributions of the IIF S&E Division: 1. Provided input in the process of preparing the ESG Framework and the 2022 Ministry of Finance Manual; 2. Hosted Ministry of Finance's ESG Framework and manual launch at the G20 series of events, November 2022.
Peningkatan kinerja Perseroan secara menyeluruh (<i>end-to-end improvement</i>), dengan menerapkan optimalisasi sistem teknologi informasi, proses pengadaan, dan <i>deal closing process</i> dengan melibatkan seluruh unit bisnis terkait. To improve the Company's overall performance (<i>end-to-end improvement</i>) by optimizing information technology systems, procurement processes, and deal-closing processes by involving all related business units.	Perseroan telah menerapkan beberapa aplikasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi proses, kualitas data, dan meningkatkan transaksi tanpa kertas. Aplikasi bisnis dapat mendigitalkan proses pengumpulan data, proses persetujuan menjadi otomatis, dan menyediakan pelacakan dan pemantauan otomatis. IIF has implemented several business applications to improve process efficiency, data quality and achieve more paperless transactions. The business applications mostly digitalize data gathering process, automate approval process, and provide automatic tracking and monitoring.
Penawaran jenis pembiayaan yang lebih beragam melalui inovasi pada sektor dan produk baru, dengan tujuan untuk memberikan variasi dan fleksibilitas kepada klien dan mengoptimalkan margin. To offer more diverse types of financing through innovation in new sectors and products, to provide variety and flexibility to clients while optimizing margins.	Pada tahun 2022, IIF memberikan pembiayaan pada jenis proyek baru pada sektor infrastruktur telekomunikasi yaitu proyek Satelit Nusantara I. Selain itu, IIF juga mendapatkan 8 mandat pekerjaan untuk jasa <i>advisory</i> di mana 2 di antaranya merupakan jenis jasa baru sebagai penasihat bidang ESG. Secara berkelanjutan, IIF akan menciptakan dan meluncurkan produk dan jasa yang baru untuk meningkatkan potensi pendapatan. In 2022, IIF provided financing for Satelit Nusantara I project in the telecommunications infrastructure sector, the first under its portfolio. In addition, IIF also received 8 mandates for advisory services, including 2 ESG advisor mandates as a new type of service. IIF will continue to innovate and launch new products and services to generate more streams of revenue.
Efisiensi <i>cost of fund</i>, dengan cara berkolaborasi dengan Pemegang Saham untuk mendapatkan struktur skema pendanaan yang lebih ekonomis; berkolaborasi dengan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memperoleh alternatif sumber pendanaan; secara selektif melakukan pembayaran dipercepat atas pendanaan yang berbiaya tinggi; optimalisasi produk <i>capital market</i> sebagai alternatif sumber pendanaan. Cost of fund efficiency, by collaborating with Shareholders to obtain a more economical funding scheme structure; collaborating with Non-Bank Financial Institutions to obtain alternative funding sources; selectively settling payments for high-cost funding; optimizing capital market products as an alternative source of funding.	Dalam mencapai target jangka panjang terkait efektivitas dan efisiensi sumber pendanaan, pada tahun 2022 Divisi Treasury IIF secara aktif telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tetap melakukan <i>just-in-time funding</i>, yaitu senantiasa menyesuaikan realisasi penarikan pendanaan dengan laju pertumbuhan aset investasi untuk menjaga biaya bunga; 2. Melakukan negosiasi penurunan biaya <i>issuance fee</i> untuk fasilitas <i>non-cash loan</i> dengan Bank <i>partner</i> untuk efisiensi biaya; 3. Mempererat hubungan dengan pelaku industri keuangan lainnya dan mendapatkan fasilitas baru baik untuk <i>cash loan</i> maupun <i>non-cash loan</i>. In order to achieve long-term targets related to the effectiveness and efficiency of funding sources, in 2022 the IIF Treasury Division took the following steps: 1. Continued to explore just-in-time funding, by always adjusting the realization of funding withdrawals with the growth rate of investment assets to maintain interest costs; 2. Negotiated for lower fee in the issuance of non-cash loan facilities with Bank partners for cost efficiency; 3. Strengthened relationships with other financial industry players and obtained new facilities for both cash loans and non-cash loans.
Keselarasan kemampuan tenaga kerja, melalui peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja, pemilihan sumber tenaga kerja yang tepat guna sesuai dengan tugas pokoknya (<i>talent pool management</i>), dan implementasi pengukuran kinerja dan <i>reward system</i> yang sesuai dengan tugas dan jabatannya. Alignment of workforce capabilities, through increasing the ability and expertise of the workforce, selecting appropriate workforce sources in accordance with their main tasks (<i>talent pool management</i>), and implementing performance measurement and reward systems in accordance with their duties and positions.	Rekrutmen, penempatan dan pelatihan berbasis kompetensi (<i>tekni, soft skill, manajerial, dan strategis</i>) telah terus menerus dilakukan dari tahun ke tahun, termasuk pada tahun 2022, untuk memastikan kesesuaian karyawan dengan posisi yang diisi dan/atau dituju. Sistem penghargaan juga telah dan secara terus menerus diberikan berdasarkan tingkat kompetensi, hasil kerja dan nilai individual karyawan bagi Perseroan. Competency-based recruitment, placement and training (<i>technical, soft skills, managerial, and strategic</i>) have been continuously carried out from year to year, including in 2022, to ensure the suitability of employees to positions they fill and/or apply for. The reward system has also been and continuously provided based on competence level, achievements, and individual employee values for the Company.

Target	Progress 2022
Peningkatan <i>yield</i>, melalui pengembangan kemampuan dan diversifikasi jasa konsultasi (termasuk kolaborasi dengan Direktorat Investasi) serta <i>Asset Recycling</i>, untuk mendapatkan sumber pendanaan baru melalui sekuritisasi aset-aset pembiayaan Perseroan, untuk dialokasikan ke proyek-proyek dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Yield increase, through capacity development and diversification of advisory services (including collaboration with the Investment Directorate) and <i>Asset Recycling</i>, to obtain new funding sources through the securitization of the Company's financing assets, which will be allocated to projects with higher yields.	Untuk meningkatkan <i>yield</i>, pada tahun 2022 ini IIF telah berhasil meningkatkan <i>revenue</i> dari <i>Advisory</i> dengan menyeimbangkan bauran proyek dari pemerintah maupun swasta, dan menjalankan kolaborasi antara Direktorat <i>Advisory</i> dan Investasi secara aktif dengan memperluas basis klien dan meningkatkan nilai kontrak <i>Advisory</i>. To increase yields, in 2022 IIF managed to generate more revenue from <i>Advisory</i> with a balanced mix of governments and private sector projects, and collaborating the <i>Advisory</i> and Investment Directorates actively by expanding the client base and increasing the value of <i>Advisory</i> contracts.

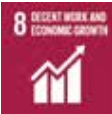
Kontribusi terhadap Pencapaian SDGs di Tingkat Portofolio pada 2022

IIF's Contribution to the SDGs Achievement at the Portfolio Level in 2022

SDGs	Target Goal	Indikator Indicator	Kontribusi di Portofolio IIF Contribution under IIF Portfolio
	Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	- Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. - Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber penerangan dan listrik.	- Lebih dari 1,1 juta rumah tangga mendapatkan akses terhadap sumber air minum dari 7 proyek Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai IIF. (1 proyek dilunasi di bulan Oktober 2022) - Sekitar 575.650 rumah tangga mendapatkan pasokan listrik dari beberapa proyek ketenagalistrikan yang dibiayai oleh IIF tahun 2022.
	Goal 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, new technologies, and appropriate financial services, including microfinance.	- The number of households with access to adequate and sustainable drinking water sources. - The number of households with access to lighting sources and electricity.	- More than 1.1 million households have access to water supply services from 7 Water Supply Facility (SPAM) projects financed by IIF. (Repayment for 1 project settled in October 2022) - Around 575,650 households have access to electricity from several electricity projects financed by IIF in 2022.
	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (termasuk kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum).	IIF telah membiayai ekspansi gedung rumah sakit di Tangerang dan Bekasi yang meningkatkan kapasitas tempat tidur. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum yang turut menerima pasien BPJS.
	Goal 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to good basic health services, and access to safe, effective, quality, and affordable basic medicines and vaccines for all.	Coverage of essential health services (including service capacity and access for the general population).	IIF has financed hospital building expansions in Tangerang and Bekasi that increased bed capacity. The hospitals are general hospitals that also accept BPJS patients.

SDGs	Target Goal	Indikator Indicator	Kontribusi di Portofolio IIF Contribution under IIF Portfolio
	Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.	Peningkatan fasilitas sekolah dengan akses ke: (a) listrik; (b) internet untuk tujuan pengajaran; (c) komputer untuk tujuan pengajaran; (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas; (e) air minum layak; (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin; dan (g) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi, dan higienitas bagi semua).	Di tahun 2021, IIF membiayai perusahaan swasta penyedia layanan telekomunikasi berbasis satelit. Area cakupan dari satelit ini diharapkan dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia dan meningkatkan akses internet hingga ke desa-desa, termasuk di antaranya untuk meningkatkan fasilitas pengajaran di sekolah-sekolah.
	Goal 4.a Build and improve educational facilities that are child-friendly, disabled-friendly, and gender-friendly, and provide a safe, non-violent, inclusive, and effective learning environment for all.	Improvement of school facilities with access to (a) electricity; (b) internet for teaching purposes; (c) computers for teaching purposes; (d) adequate infrastructure and materials for students with disabilities; (e) proper drinking water; (f) sanitation facilities basis per gender; and (g) hand-washing facilities (consisting of water, sanitation, and hygiene for all).	In 2021, IIF finances private companies providing satellite-based telecommunications services. The coverage of this satellite is expected to reach all corners of Indonesia and increase internet access to villages, including to improve teaching facilities in schools.
	Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai tidak melaksanakan praktik diskriminasi terhadap kaum perempuan serta mendukung pemberdayaan perempuan.
	Goal 5.1 End all forms of discrimination against women everywhere.	Policies that are gender-responsive and support women's empowerment.	Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed do not apply discriminatory practices against women and support women's empowerment.
	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. - Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. - Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	- Proyek penyediaan air minum yang dibiayai oleh IIF berkontribusi terhadap pencapaian sekitar 15% dari target akses terhadap layanan sumber air minum yang layak. - Total kapasitas proyek Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai oleh IIF adalah sekitar 18.025 liter/detik. - Proyek penyediaan air minum yang dibiayai oleh IIF berkontribusi terhadap pencapaian sekitar 2% dari proporsi populasi yang ditargetkan untuk mendapatkan akses layanan sumber air minum yang aman.
	Goal 6.1 By 2030, everyone will have equitable access to safe and affordable drinking water.	- Percentage of households that have access to proper drinking water sources. - The capacity of raw water infrastructure to serve households, cities, and industries, and the provision of raw water for inhabited islands. - The proportion of the population that has access to safe and sustainable drinking water sources.	- The drinking water supply project financed by IIF has contributed to the achievement of around 15% of the target of access to adequate drinking water sources. - The total capacity of the Drinking Water Supply Facility project financed by IIF is around 18,025 liters/second. - The drinking water supply project financed by IIF has contributed to approximately 2% of the targeted population proportion with access to safe drinking water.

SDGs	Target Goal	Indikator Indicator	Kontribusi di Portofolio IIF Contribution under IIF Portfolio
	Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik. (Kualitas air sungai sebagai sumber air baku)	Sejalan dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai turut menjaga, memantau, dan mengelola kualitas air yang digunakan ataupun berada di sekitar lokasi proyek.
	Goal 6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating waste and minimizing the release of hazardous materials and chemicals, halving the proportion of untreated wastewater, and significantly increasing the recycling and safe reuse of recyclables globally.	The proportion of water bodies with good ambient water quality. (Quality of river water as raw water source)	In line with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed help maintain, monitor, and manage the quality of the water used or in the vicinity of the project site.
	Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Pembiayaan IIF pada proyek SPAM di Pekanbaru yang ditujukan untuk merehabilitasi instalasi pengolahan air di proyek tersebut mampu mengurangi angka kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) hingga 64% di tahun 2022 jika dibandingkan dengan angka di 2019.
	Goal 6.4 By 2030, significantly increase the efficiency of water use in all sectors, and ensure the sustainable use and supply of freshwater to address water scarcity, and significantly reduce the number of people suffering from water scarcity.	Improved water use efficiency from time to time.	IIF's financing for the SPAM project in Pekanbaru, which is aimed to rehabilitate the water treatment plant, is able to reduce the rate of water loss (Non-Revenue Water/NRW) by up to 64% in 2022 when compared to the figure in 2019.
	Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.	- Jumlah listrik yang telah dan akan dihasilkan dari proyek Energi Terbarukan IIF. - Proporsi penduduk yang mendapatkan akses ke energi listrik yang dihasilkan dari seluruh proyek IIF.	- Total energi listrik yang telah dan akan dihasilkan dari proyek-proyek Energi Terbarukan yang dibiayai oleh IIF di 2022 adalah sekitar 671 MW. - Lebih dari 2,85 juta penduduk mendapatkan pasokan listrik dari beberapa proyek ketenagalistrikan yang dibiayai oleh IIF tahun 2022.
	Goal 7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services.	- The amount of electricity that has been and will be generated by the Renewable Energy project financed by IIF. - The proportion of the population that will have access to electricity generated from IIF projects.	- The total electricity that has been and will be generated by the Renewable Energy projects financed by IIF in 2022 is around 671 MW. - More than 2.85 million people have access to electricity from several electricity projects financed by IIF in 2022.

SDGs	Target Goal	Indikator Indicator	Kontribusi di Portofolio IIF Contribution under IIF Portfolio
	Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	Mengakhiri kerja paksa dan tenaga kerja anak.	Sesuai dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai tidak melakukan praktik kerja paksa ataupun mempekerjakan tenaga kerja anak dengan memastikan tersedianya kebijakan terkait hal tersebut.
	Goal 8.7 Take quick action to eradicate forced labor, end human slavery and trafficking, secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor, including the recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labor in all of its forms.	End forced and child labor.	In accordance with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed do not practice forced labor or employ child labor by ensuring the availability of policies related to this aspect.
	Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	• Penerapan norma K3. • Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	• Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memperhatikan dan menerapkan manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). • Sesuai dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF juga memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memperhatikan dan meningkatkan kepatuhan atas hak-hak pekerja, termasuk kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.
	Goal 8.8 Protect labor rights and promote a safe and secure working environment for all workers, including migrant workers, in particular women migrant workers, and workers assigned to hazardous work.	• The implementation of OHS norms. • Enhanced compliance on workers' rights (freedom of association and collective bargaining) based on ILO textual sources and relevant country laws and regulations.	• Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed pay attention to and implement the occupational health and safety (OHS) management. • In accordance with the applied Social and Environmental Principles, IIF also ensures at all occasions that the projects financed pay attention to and improve compliance on workers' rights, including the freedom to form workers' unions.

SDGs	Target Goal	Indikator Indicator	Kontribusi di Portofolio IIF Contribution under IIF Portfolio
	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	- Panjang pembangunan jalan tol. - Panjang jalur kereta api. - Jumlah bandara. - Jumlah pelabuhan strategis.	- Total panjang proyek jalan tol yang dibiayai IIF di tahun 2022 adalah sekitar 244,29 km. - IIF menyediakan pembiayaan untuk pembangunan trek Siding Garongkong sepanjang 4,75 km sebagai bagian dari Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dengan total panjang 142 km yang merupakan bagian dari fase I Jaringan Kereta Api Trans Sulawesi. - IIF memiliki 4 lokasi proyek bandara yang dibiayai secara aktif hingga akhir tahun 2022, yang berlokasi di Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Selain itu IIF juga membiayai pembangunan fasilitas hanggar di salah satu Bandara tersebut yang berfungsi untuk fasilitas pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan domestik. - IIF memiliki 2 proyek pelabuhan yang dibiayai secara aktif hingga akhir tahun 2022 yang berlokasi di Sumatera Utara dan Gorontalo.
	Goal 9.1 Develop good-quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, including regional and cross-border infrastructure, to support economic development and improve welfare with a focus on affordable and equitable access for all.	- Length of the constructed toll road. - Length of the constructed railroad. - Number of airports. - Number of strategic seaports.	- The total length of the toll road project financed by IIF in 2022 has reached about 244.29 km. - IIF provided financing for the construction of 4.75 km Garongkong Siding Track as part of the Makassar–Parepare Railway with a total length of 142 km which is part of phase I of the Trans Sulawesi Railway Network. - IIF had 4 airport project locations that were actively financed until the end of 2022, located in Banten, Central Java, Yogyakarta, and South Kalimantan. In addition, IIF also financed the construction of a hangar facility at one of the airports which function for domestic maintenance, reparation, and inspection. - IIF had 2 seaport projects that were actively financed until the end of 2022 located in North Sumatra and Gorontalo.
	Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	- Pelaporan terkait diskriminasi atau pelecehan sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia. - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	- Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memiliki mekanisme pelaporan keluhan dari pekerja maupun masyarakat, termasuk pelaporan terkait dengan diskriminasi atau pelecehan. - Sesuai dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai menyediakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
	Goal 10.3 Ensure equal opportunity and reduce income gaps, including eliminating discriminatory laws, policies, and practices, and promoting appropriate legislation, policies, and actions related to such legislation and policies.	- Report received on discrimination or harassment under international human rights law. - The proportion of participants in the Social Security Program in the Employment Sector.	- Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at every opportunity that the projects financed have a mechanism for reporting complaints from workers and the community, including reporting related to discrimination or harassment. - In accordance with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed provide the Employment Social Security program.

SDGs	Target Goal	Indikator Indicator	Kontribusi di Portofolio IIF Contribution under IIF Portfolio
	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Upaya preservasi, perlindungan, dan konservasi pada semua warisan budaya dan alam.	Sejalan dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memperhatikan dan menjaga semua warisan.
	Goal 11.4 Promote and preserve world cultural heritage and world natural heritage.	Preservation, protection, and conservation efforts of all cultural and natural heritage.	In line with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed pay attention to and safeguard all cultural and natural heritage that may be affected by the project.
	Target 12.4 Pada tahun 2022 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati, dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia berbahaya dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai melakukan pengelolaan terhadap material dan limbah B3 yang digunakan dan dihasilkan dari proyek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	Goal 12.4 By 2022 achieve the environmentally sound management of chemicals and all types of waste in the entire life cycle, according to agreed international frameworks, and significantly reduce the pollution of these hazardous chemicals and their wastes to the air, water, and soil to minimize adverse impacts on human health and the environment.	The management of hazardous waste is carried out in accordance with regulatory provisions.	Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed manage the hazardous materials and waste produced by the projects in accordance with all regulatory provisions.
	Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.	Tersedianya pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Sejalan dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai mulai melakukan perhitungan terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. IIF juga menyediakan tools untuk membantu proyek menghitung GRK yang dihasilkan. Melalui pembiayaan terhadap proyek-proyek Energi Terbarukan, IIF membantu mengurangi sekitar 1,59 juta ton CO ₂ -eq potensi emisi GRK.
	Goal 13.2 Integrate anticipatory actions on climate change into national policies, strategies, and plans.	Availability of reporting on the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions.	In line with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed begin to calculate the greenhouse gas emissions that they produced. IIF also provides tools to help projects calculate the GHGs of the project. By financing the Renewable Energy projects, IIF helps reduce around 1.59 million tons CO ₂ -eq of potential GHG emissions.
	Target 15.9 Pada tahun 2022, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi, serta penganggaran pengurangan kemiskinan.	Tersedianya rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai yang berlokasi di area-area yang berpotensi memiliki keanekaragaman hayati dan habitat kritis melakukan penyusunan dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan mengimplementasikan pengelolaan tersebut.
	Goal 15.9 By 2022, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, strategies, and budgeting for poverty reduction.	Availability of biodiversity management plan.	Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that financed projects located in areas of potential biodiversity and critical habitat prepare a biodiversity management plan document and execute the plan.

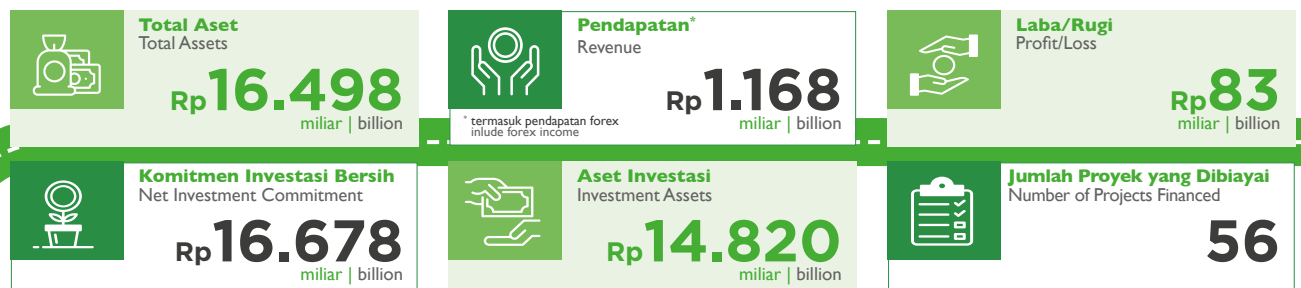
2022 Ikhtisar Keberlanjutan

Sustainability Highlights

Aspek Ekonomi [OJK B.1] Economic Aspect

PENDAPATAN, LABA/RUGI, DAN JUMLAH PROYEK

Revenue, Profit/Loss, and Total Projects



KOMITMEN BERSIH PORTOFOLIO INVESTASI

Net Commitment of Investment Portfolio



KINERJA LAYANAN ADVISORY

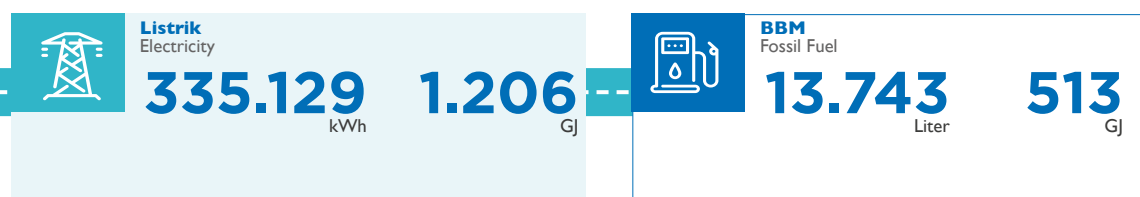
Advisory Service Performance



Aspek Lingkungan [OJK B.2] Environmental Aspect

KONSUMSI ENERGI

Energy Consumption

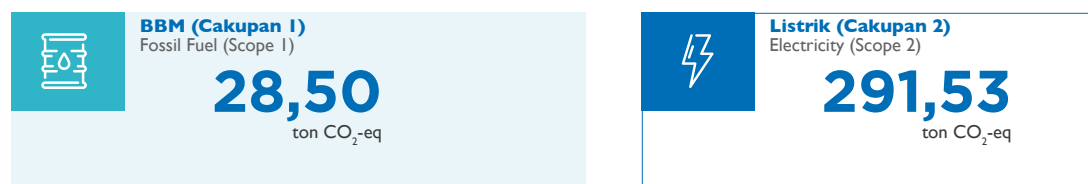


Total Penggunaan Listrik dan BBM
Total Electricity and Fuel Consumption

1.719 GJ

TOTAL EMISI GRK YANG DIHASILKAN (CAKUPAN I & 2)

Total GHG Emissions Generated (Scope I & 2)

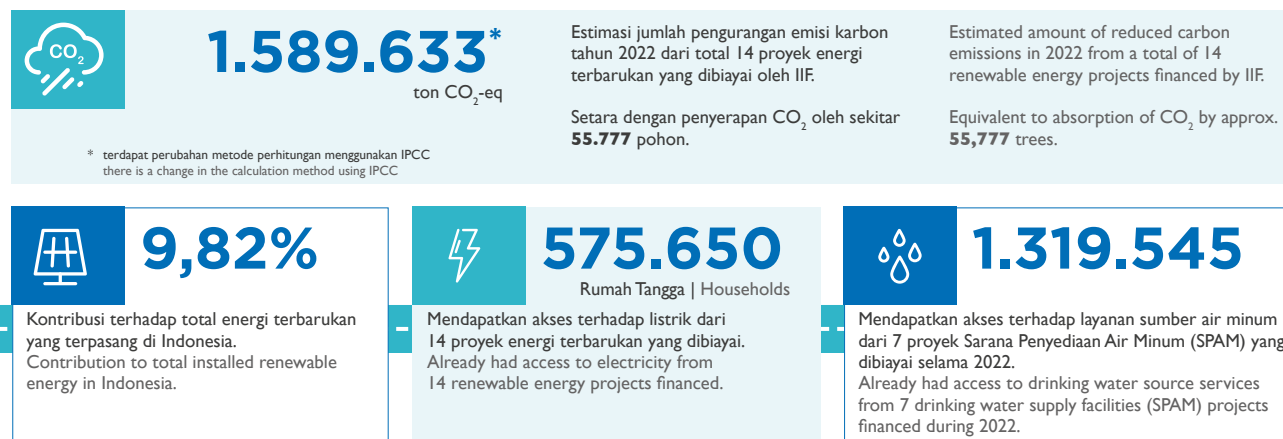


Total Penggunaan Listrik dan BBM
Total Electricity and Fuel Consumption

320,03 ton CO₂-eq

KONTRIBUSI PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR YANG DIBIYAI IIF DI 2022

Contribution of Infrastructure Projects Financed by IIF in 2022



Aspek Sosial [OJK B.3] Economic Aspect

**49%**

Persentase jumlah karyawan perempuan.
Percentage of female employees.

**7.757,8**

jam | hours

Total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang terdiri dari pelatihan *soft skill* dan *technical skill*.
Total training hours provided to employees on soft skills and technical skills.

**63,59**

jam | hours

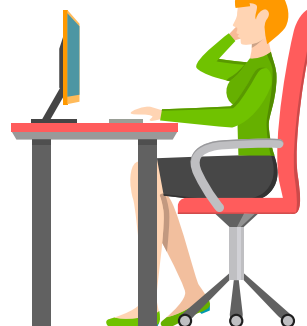
Rata-rata jam pelatihan *soft skill* dan *technical skill* per karyawan.
Average hours of soft skills and technical skills training per employee.

**40%**

Imbalan jasa karyawan tetap golongan terendah lebih tinggi 40% dari UMP.
The lowest level of permanent employee benefits was 40% higher than the Provincial Minimum Wage.

**Rp495.745.169**

Total biaya Tanggung Jawab Sosial (TJSL), meningkat 8,5% dari tahun sebelumnya.
The total cost of Social Responsibility (TJSL), up 8.5% from the previous year.





Profil Perusahaan

Company Profile



Tentang IIF

About IIF

Nama Organisasi: [GRI 2-1]

PT Indonesia Infrastructure Finance

Status Organisasi: [GRI 2-1]

Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Swasta

Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa:

[OJK C.4][GRI 2-6]

Kegiatan Usaha: Pembiayaan Infrastruktur

Produk: Produk Investasi (*fund-based* dan *non-fund-based*) dan Advisory

Lokasi Kantor Pusat: [OJK C.2][GRI 2-1]

Prosperity Tower Lantai 53-55

District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

T: +62 21 5082 6600

F: +62 21 5082 6601

E: info@iif.co.id

www.iif.co.id

Wilayah Operasional: [OJK C.2][GRI 2-1]

Sampai bulan Desember 2022, IIF memiliki 56 proyek aktif yang dibiayai di 26 provinsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1) Aceh, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Barat, 4) Riau, 5) Kepulauan Riau, 6) Jambi, 7) Sumatera Selatan, 8) Bengkulu, 9) Lampung, 10) Banten, 11) DKI Jakarta, 12) Jawa Barat, 13) Jawa Tengah, 14) DI Yogyakarta, 15) Jawa Timur, 16) Bali, 17) Kalimantan Selatan, 18) Kalimantan Timur, 19) Kalimantan Tengah, 20) Kalimantan Barat, 21) Sulawesi Selatan, 22) Sulawesi Tengah, 23) Sulawesi Utara, 24) Gorontalo, 25) Maluku, dan 26) Papua Barat

Jumlah dan Nama Negara Tempat Beroperasi: [GRI 2-1]

1 (satu), Indonesia

Komposisi Kepemilikan Saham: [OJK C.3][GRI 2-1]

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 30,00%
- International Finance Corporation (IFC) 19,99%
- Asian Development Bank (ADB) 19,99%
- Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbh (DEG) 15,12%
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 14,90%

Dasar Hukum Pendirian: [GRI 2-1]

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 100/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance
- Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123.

Name of the Organization: [GRI 2-1]

PT Indonesia Infrastructure Finance

Organization Status: [GRI 2-1]

Limited Company (PT), Private Company

Activities, Brands, Products, and Services:

[OJK C.4][GRI 2-6]

Business Activities: Infrastructure Financing

Products: Investment Products (*fund-based* and *non-fund-based*) and Advisory

Headquarters: [OJK C.2][GRI 2-1]

Prosperity Tower 53rd-55th Floor

District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

T: +62 21 5082 6600

F: +62 21 5082 6601

E: info@iif.co.id

www.iif.co.id

Area of Operations: [OJK C.2][GRI 2-1]

As of December 2022, IIF has a total of 56 active portfolio projects in 26 provinces across Indonesia:

1) Aceh, 2) North Sumatra, 3) West Sumatra, 4) Riau, 5) Riau Islands, 6) Jambi, 7) South Sumatra, 8) Bengkulu, 9) Lampung, 10) Banten, 11) DKI Jakarta, 12) West Java, 13) Central Java, 14) DI Yogyakarta, 15) East Java, 16) Bali, 17) South Kalimantan, 18) East Kalimantan, 19) Central Kalimantan, 20) West Kalimantan, 21) South Sulawesi, 22) Central Sulawesi, 23) North Sulawesi, 24) Gorontalo, 25) Maluku, and 26) West Papua

Total Area and Name of Country of Operations: [GRI 2-1]

1 (one), Indonesia

Share Ownership Composition: [OJK C.3][GRI 2-1]

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 30,00%
- International Finance Corporation (IFC) 19,99%
- Asian Development Bank (ADB) 19,99%
- Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbh (DEG) 15,12%
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 14,90%

Legal Basis of Establishment: [GRI 2-1]

- Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009 on Infrastructure Financing Companies.
- Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010 on the Granting of Infrastructure Financing Company Business Permit to PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, made before Aulia Taufani, S.H., substituting for Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-21503.AH.01.01. Tahun 2010 dated April 28, 2010, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplement No. 5123.

Visi dan Misi [OJK C.1]

Vision and Mission

Visi Vision

Menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

To become the leading catalyst for financing infrastructure development in Indonesia.

Misi Mission

- **Menjamin tercerminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan konsesi;**
- **Memelopori ketersediaan beragam instrumen pembiayaan yang tepat bagi proyek infrastruktur; dan**
- **Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan Lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.**

- To ensure investors' needs are reflected in contractual structures and concessions;
- To lead in offering a mix of financing instruments appropriate for infrastructure; and
- To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into longterm development of Indonesia's infrastructure

PERSETUJUAN VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan review dan menyetujui bahwa Visi, Misi & Nilai-Nilai Budaya Perseroan telah disesuaikan dengan dinamika bisnis dan tantangan yang dihadapi IIF ke depan.

Hingga Laporan Tahunan 2022 ini selesai dituliskan, IIF tidak melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap Visi, Misi & Nilai-Nilai Budaya Perseroan.

VISION AND MISSION APPROVAL BY KEY MANAGEMENT

The Boards of Commissioners and Directors have reviewed and came to terms that the Company's Vision, Mission and Corporate Culture are in accordance with IIF's business dynamics and future challenges.

As of the completion of this 2022 Annual Report, IIF had not made any changes or adjustments to the Company's Vision, Mission & Corporate Culture.

Skala Bisnis

[OJK C.3][GRI 102-7]

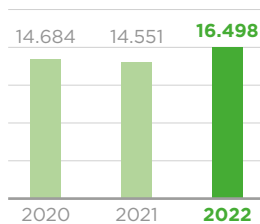
Scale of Business



Total Aset

Total Assets

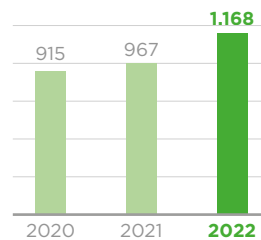
Rp miliar | Rp billion



Pendapatan*

Liabilitas

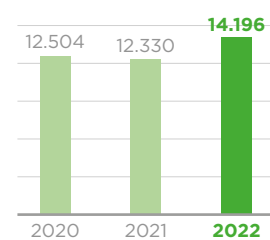
Rp miliar | Rp billion

* Termasuk pendapatan forex
Include forex income

Liabilitas

Liability

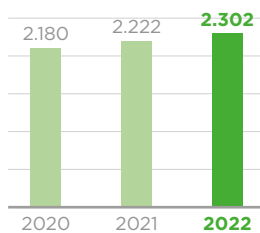
Rp miliar | Rp billion



Ekuitas

Equity

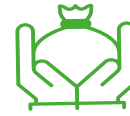
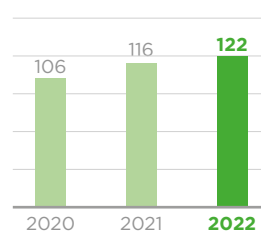
Rp miliar | Rp billion



Jumlah Karyawan

Headcount

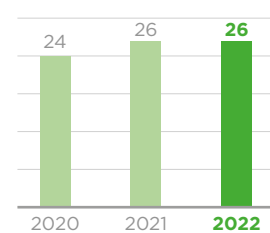
orang | employees



Provinsi yang Dilayani

Province Served

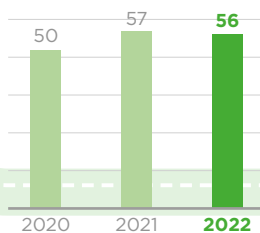
provinsi | province



Jumlah Proyek yang Aktif Dibiayai

Total Active Projects Finance

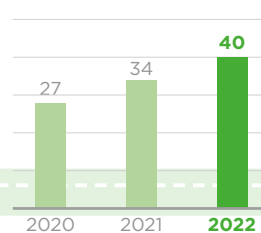
proyek | projects



Jumlah Proyek Konsultasi

Total Advisory Projects

proyek | projects



Kegiatan Usaha [OJK C.4][GRI 2-6]

Business Activities

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

IIF menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang terakhir kali diperbarui melalui Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Tahun 2022

Pada tahun 2022, sesuai dengan Anggaran Dasar, IIF menyediakan produk pembiayaan berupa:

Produk Investasi

Fund-based

- Bentuk pinjaman antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine finance*, *convertible* dan *hybrid securities* dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan; dan
- Investasi ekuitas.

Non-fund-based

Dukungan kredit dalam bentuk antara lain: pemenuhan kewajiban keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau *take-out financing*.

LAYANAN KONSULTASI

A. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR PUBLIK

1. Layanan Konsultasi Transaksi

Layanan konsultasi transaksi untuk klien sektor publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, di mana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut. Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan layanan konsultan transaksi mencakup:

- Proyek-proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau proyek *Business to Business* (B2B) PDAM di sektor air minum.

Lingkup dari layanan konsultasi transaksi antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

IIF engages in financing infrastructure projects in Indonesia as stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended through Deed No. 43 dated July 24, 2018.

Business Activities Conducted in 2022

In 2022, in line with its Articles of Association, IIF provided the following financing products:

Investment Products

Fund-based

- Loans in the form of, among others, senior loans, subordinated loans/*mezzanine financing*, *convertible* and *hybrid securities*, and/or refinancing;
- Financing of other activities related to infrastructure projects under the prevailing laws and regulations; and
- Equity investment.

Non-fund-based

Credit enhancement in the form of stand-by financing guarantee, credit enhancement, and/or *take-out financing*.

ADVISORY SERVICE

A. SERVICES FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS

1. Transaction Advisory Services

Transaction advisory services for public sector clients, such as ministries, regional governments, and state-owned/regional-owned enterprises, with regard to infrastructure projects involving contracts between government contracting authority and private parties, in which the private party provides a public service and assumes the financial, technical, and operational risks of the project. The types of infrastructure projects to be provided with the transaction advisory services include:

- Public Private Partnership (PPP) projects as regulated under Presidential Regulation No. 38/2015; and
- Non-PPP projects, such as IPP projects in the power sector or PDAM Business to Business (B2B) projects in the drinking water sector.

The scope of the transaction advisory services may include pre-transaction due diligence and planning, market

konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pendampingan pelaksanaan proses tender/pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang *bankable*, di samping meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

2. Layanan Konsultasi Kebijakan

Menyediakan layanan konsultasi kepada klien di sektor publik, seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

B. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR SWASTA

1. Kajian Finansial dan Ekonomi

Menyediakan layanan kepada klien untuk mengevaluasi dampak finansial dan ekonomi dari inisiatif pengembangan infrastruktur.

2. Penasihat Keuangan

Menyediakan layanan *project finance* dan *corporate finance* untuk klien di sektor swasta untuk memaksimalkan *value* kepada pemegang saham. Terkait dengan keuangan proyek, IIF menyediakan jasa penasihat dalam proyek KPBU, studi kelayakan, serta penyiapan proyek. Terkait dengan keuangan perusahaan, IIF dapat memberikan jasa penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman, valuasi, transaksi *joint venture*, dan *merger & acquisition*.

SEKTOR PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan infrastruktur, IIF memiliki sektor-sektor prioritas proyek infrastruktur sebagai target pembiayaannya. Sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat OJK No. S-2/D.05/2018 dan POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; objek pembiayaan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, perumahan rakyat, bangunan negara, kawasan industri, distribusi pangan dan infrastruktur lain.

consultation, feasibility study, government support analysis, commercial structuring, negotiation, tender/procurement implementation process, and institutionalization process aimed to ensure optimal risk allocation and bank-ability of the project as well as improving the quality of project outcome.

2. Policy Advisory Services

Advisory services to public sector clients, such as ministries and regional governments, in formulating infrastructure-related policies and/or increasing capacities to accelerate and improve infrastructure procurement.

B. SERVICES FOR PRIVATE SECTOR CLIENTS

1. Financial and Economic Assessment

IIF provides services to private sector clients in order to evaluate the potential economic and financial impacts of infrastructure development initiatives.

2. Financial Advisory

Providing project finance and corporate finance advisory services to private sector clients to maximize shareholder value. With regard to project finance, IIF provides PPP tender support, feasibility studies, project preparation, and structuring. Regarding corporate finance, IIF's advisory products are available for debt or equity fundraising, valuations, joint ventures, and mergers & acquisitions.

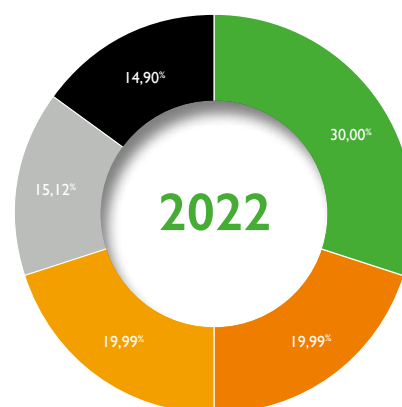
INFRASTRUCTURE FINANCING SECTOR

In conducting infrastructure financing activities, IIF has determined the priority infrastructure project sectors as its financing target. Pursuant to the Article 5 of the Regulation of the Minister of Finance No. 100/PMK.010/2009 regarding Financing Companies, OJK Letter No. S-2/D.05/2018 and POJK No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies; objects for infrastructure financing include transportation, roads, water and irrigation, drinking water, centralized wastewater management systems, localized wastewater management systems, waste and toxic waste, telecommunications and informatics, electricity, oil and gas and renewable energy, conservation energy, urban infrastructure facilities, education, research, and development infrastructure, sports, arts and cultural infrastructure facility, district, tourism, healthcare, correctional, public housing, state-owned building, industrial estate, food distribution, and other infrastructure.

Komposisi Kepemilikan Saham [OJK C.3]

Share Ownership Composition

Nama Name	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	600.000	600.000.000.000	30,00
Asian Development Bank (ADB)	399.800	399.800.000.000	19,99
International Finance Corporation (IFC)	399.800	399.800.000.000	19,99
DEG – Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft	302.400	302.400.000.000	15,12
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	298.000.000.000	14,90
Jumlah Total	2.000.000	2.000.000.000.000	100,00



Perubahan Signifikan [OJK C.6]

Significant Changes

Pada laporan tahun 2022 ini tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam Perseroan baik dari segi ukuran, struktur kepemilikan, maupun rantai pasokan.

In this 2022 report, there are no significant changes made in the Company's size, ownership structure, and supply chain.

Keanggotaan Asosiasi [OJK C.5][GRI 2-28]

Associate Membership

Hingga akhir tahun 2022, IIF merupakan anggota dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL). IIF juga telah mengadopsi prinsip-prinsip *United Nations Framework Convention on Climate Change* dalam menerapkan kriteria pembiayaan proyeknya.

Until the end of 2022, IIF was a member of the Indonesia Renewable Energy Society (IRES) and Indonesia Telematics Society. IIF has also adopted the principles of the United Nations Framework Convention on Climate Change as one of the criteria applied in its project financing.

Wilayah Operasional [GRI 2-6]

Areas of Operation

Hingga akhir Desember 2022, IIF memiliki 56 proyek yang aktif dibiayai dari berbagai sektor infrastruktur di 26 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Until December 2022, IIF had 56 active projects under its portfolio from various infrastructure sectors in 26 provinces throughout Indonesia.



Sektor Portofolio Portfolio Sector	Wilayah Portofolio Portfolio Areas
 Ketenagalistrikan Electricity	Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo Aceh, Riau, North Sumatera, West Sumatera, West Java, East Java, Central Sulawesi, North Sulawesi, South Sulawesi, Gorontalo
 Bandar Udara Airport	Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Banten, Yogyakarta, Central Java, East Java, South Kalimantan, South Sulawesi
 Kawasan Industri Industrial Estate	Jawa Barat, Jawa Timur West Java, East Java
 Jalan Road	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi
 Minyak Bumi dan Gas Oil and Gas	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat West Java, East Java, Central Java, Yogyakarta, East Kalimantan, Central Kalimantan, West Papua

Sektor Portofolio Portfolio Sector	Wilayah Portofolio Portfolio Areas
 Pelayanan Kesehatan Health Care Facility	Banten, Jawa Barat Banten, West Java
 Kereta Api dan Transportasi Massal Railway and Mass Transport	Sulawesi Selatan South Sulawesi
 Telekomunikasi Telecommunication	Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Area, Papua, cakupan se-Indonesia (Nationwide) Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Coverage area throughout Indonesia (Nationwide)
 Air Minum Drinking Water	Jawa Timur, Banten, Lampung, Pekanbaru East Java, Banten, Lampung, Pekanbaru
 Pelabuhan Port	Sumatera Utara, Gorontalo North Sumatera, Gorontalo
 Lainnya Others	Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan North Sumatera, West Kalimantan, Central Java, East Java, South Sulawesi

Laporan Direksi

[OJK D.1][OJK E.5][GRI 2-22]

Report of the Board of Directors



Reynaldi Hermansjah
Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

“

Seluruh pencapaian yang diraih serta kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada kami terkait ESG, semakin meningkatkan motivasi kami untuk memperkuat komitmen dalam memastikan berjalannya aspek keberlanjutan dari tiap investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

All the achievements and the trust and appreciation that were extended to us on our ESG practice have motivated us even more to strengthen our commitment to ensuring the sustainability aspects of every investment in infrastructure development in Indonesia.

”

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga IIF mampu melewati tahun 2022 dengan mencatatkan kinerja yang positif dan mempertahankan pertumbuhan yang kuat. Atas nama Direksi IIF, izinkan saya untuk melaporkan kinerja dan kontribusi kami dalam pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan melalui Laporan Keberlanjutan ini.

Tahun 2022 merupakan tahun yang semakin kompleks. Perekonomian global masih terdampak pandemi COVID-19 meski mulai berangsur pulih. Ditambah masalah geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga komoditas, kelangkaan pangan, hingga tekanan inflasi. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap dapat stabil dan mencatatkan kinerja yang impresif didukung oleh pulihnya berbagai sektor utama.

Dear Stakeholders,

Praise be to God Almighty, for it was because of His Blessings and Mercy that IIF was able to deliver positive performance and maintain strong growth as we cruised through fiscal 2022. On behalf of IIF's Board of Directors, allow me to report our performance and contribution to sustainable infrastructure development through this Sustainability Report.

2022 turned out to be a more complex year. Albeit diminishing quite noticeably, COVID-19 was still clouding the global economy. The Russia-Ukraine geopolitical tension added to the complexity, which caused a spike in commodity prices, food shortages, and inflationary pressure. Nonetheless, Indonesia showed a stable and impressive performance as many of its economic sectors recovered.

Resiliensi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan dinamika global menjadi bukti atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam bersinergi mengendalikan dampak pandemi selama dua tahun terakhir. Pulihnya aktivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap iklim bisnis dan ekonomi tercermin dari geliat aktivitas masyarakat dan pebisnis di bandara dan tingginya kepadatan lalu lintas di jalan tol.

Dapat disyukuri, sektor infrastruktur tidak terdampak langsung dari hambatan-hambatan yang terjadi pada perekonomian global. Tantangan datang dari kondisi peningkatan suku bunga yang menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur sedikit lebih tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan laju pembangunan infrastruktur karena memiliki pembiayaan jangka panjang. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertunda juga sudah kembali dilaksanakan. Konstelasi global yang terjadi tampaknya tidak menghalangi upaya Pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

Kendala lain yang dihadapi selama tahun 2022 adalah ketatnya persaingan dengan industri perbankan yang kini mulai menjajaki pembiayaan proyek infrastruktur dan menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Hal ini membuat beberapa peminjam IIF melakukan pelunasan pinjaman di luar jadwal setelah mendapat *refinancing* dari lembaga keuangan lain.

Kendati demikian, hal ini tidak menjadi penghambat bagi IIF untuk terus maju dan melanjutkan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2022, IIF tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif, diiringi dengan penyaluran manfaat serta perlindungan terhadap sosial dan lingkungan sehingga menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai langkah strategis dan inisiatif keberlanjutan yang telah kami jalankan dari tahun ke tahun.

Keberlanjutan memang telah menjadi hal dasar yang utama bagi perkembangan bisnis IIF. Sejak pertama kali berdiri pada 13 tahun yang lalu, IIF telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui Prinsip Sosial dan Lingkungan (*S&E Principles*) pada setiap proyek infrastruktur yang dibiayai sehingga dapat menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan meminimalkan potensi dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan proyek infrastruktur.

Keunggulan kami dalam penerapan ESG semakin diperkuat dengan peningkatan sosialisasi mengenai pemahaman ESG di Indonesia serta berperan dalam penyusunan *ESG Framework and Manual* Kementerian Keuangan tahun 2022. IIF juga terpilih untuk menjadi tuan rumah peluncuran *framework* ini yang merupakan serangkaian dari G20 Side Event. Penunjukan ini adalah bukti nyata atas kredibilitas IIF di ranah ESG dan mencerminkan bahwa IIF adalah organisasi yang inklusif sebagaimana layaknya sektor pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Indonesia's economic resilience to the dynamic global challenges is a testament to the success of the Indonesian Government in working in synergy to control the impact of the pandemic over the last two years. Reflecting the public's restored confidence in business and economic climates was that travelers and business people began to flood Indonesian airports while heavier traffic was seen on its toll roads.

We should be grateful that the emerging global economic issues did not directly impact the infrastructure sector. One such issue was an increase in interest rates which caused a larger outlay in infrastructure projects. However, its long-term nature of financing prevented infrastructure development from decelerating. Some of the previous years' delayed National Strategic Projects (PSN) also started to pick up this year. The current global constellation did not discourage the Government from continuing to develop an evenly distributed infrastructure throughout Indonesia.

Another obstacle we faced in 2022 was enhanced competition from the banking industry, which has now started to tap financing infrastructure projects with more competitive interest rates. After securing refinancing facilities from other financial institutions, some IIF borrowers settled their loans just ahead of schedule.

Nevertheless, IIF did not see that occurrence as an obstacle as the Company kept moving forward and proceeded with its sustainable development initiatives. In 2022, IIF delivered another positive growth and continued to give social and environmental benefits and protection that would help us build a sustainable business. This success should not be dissociated from the various strategic steps and sustainability initiatives we have taken all along.

Sustainability did serve as the basis for IIF in running the business. Since first established 13 years ago, IIF has applied sustainability principles in its business through the Social and Environmental Principles (*S&E Principles*) in every infrastructure project to which it gives financing facility so the Company can always present sustainable, environmentally sound infrastructure development that poses minimum negative impacts.

We further strengthened our excellence in ESG implementation by running more socialization programs about ESG in Indonesia. We played our inherent role in preparing the *ESG Framework and Manual* of the Indonesian Ministry of Finance in 2022. IIF was also elected as the host of the launch of this framework in the G20 Side Event series. The election was clear evidence of IIF's credibility in the ESG aspect, which reflects IIF as an inclusive organization that perfectly portrays sustainable infrastructure development.

Selain itu, salah satu proyek yang dibiayai IIF yaitu proyek jalur Kereta Api Makassar–Parepare juga telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah dan telah dijadikan sebagai studi kasus dalam penerapan prinsip ESG berstandar internasional. Pada proyek tersebut, IIF mampu menjaga salah satu *cultural property* di lokasi proyek dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat sehingga mendapat predikat baik dari World Bank.

Terkait pencegahan dan pengurangan polusi yang disebabkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), kami mewajibkan klien untuk menghitung emisi dari setiap aktivitas proyek dengan menggunakan IIF GHG Tools dan melaporkan hasil perhitungannya setiap tahun kepada IIF. IIF menetapkan ambang batas emisi GRK sebanyak 25.000 ton CO₂-eq per tahun per proyek untuk berkontribusi dalam mempromosikan kesadaran dan pengurangan emisi proyek yang dibiayai. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai *net zero emission* pada 2060.

Berbagai peran dan inisiatif IIF dalam mengedepankan prinsip keberlanjutan telah berhasil mendapatkan pengakuan eksternal dengan menerima berbagai penghargaan terkait keberlanjutan. Seperti kategori *Best Program in Sustainable Financing* pada ajang *Indonesia Green & Sustainable Companies Award (IGSCA) Awarding 2022*, yang diselenggarakan oleh Majalah SWA; *Sustainability Global Bonds: Innovation of Marketing, Product and Services (iNews Maker Awards 2022)*.

Pada tingkat internasional, IIF juga menerima penghargaan *The Best Sustainability Bond for Non-Banking Financial Institution* pada ajang *The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country and Regional Awards 2021* dan penghargaan sebagai *Sustainability Bond of the Year—Financial Institution* dalam kategori Penghargaan Obligasi Pembiayaan Lingkungan 2022. Selain itu juga menerima empat penghargaan untuk kategori model bisnis dan transaksi-transaksi sepanjang tahun 2022, yaitu *Project Finance House of the Year*, *Digital Infrastructure Deal of the Year*, *Transport Deal of the Year*, dan *Water Deal of the Year* pada ajang *The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2022* yang diselenggarakan Asset Publishing and Research Ltd.

Pencapaian lainnya yang juga menjadi kebanggaan kami bahwa IIF secara resmi mendukung proyek *brownfields* untuk pengembangan pelabuhan dengan skema *Public Private Partnership (PPP)* di Desa Illangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Melalui proyek ini, IIF menunjukkan kontribusinya untuk mendukung pengembangan infrastruktur sektor pelabuhan di Indonesia.

The Makassar–Parepare Railway project, one of our projects, also received appreciation from the Government, who recommended the project as a case study on how the international standards of ESG principles should be applied. In this project, IIF was able to keep one of the local cultural property by building effective communication with the local community that even the World Bank gave us an excellent predicate.

To contribute to preventing and reducing pollution caused by Green House Gas (GHG) emissions, we require clients to calculate emissions from their project activity using IIF GHG Tools and have them report the calculation results annually to IIF. IIF sets a threshold for GHG emissions of 25,000 tons of CO₂-eq per year per project to help build awareness and reduce emissions in projects under the IIF portfolio. This effort is consistent with the commitment of the Indonesian Government to achieve net zero emissions by 2060.

Our various roles and initiatives in promoting sustainability principles have succeeded in gaining external recognition as IIF garnered various sustainability-related awards. The awards included the Best Program in Sustainable Financing category at the Indonesia Green & Sustainable Companies Award (IGSCA) Awarding 2022, organized by SWA Magazine; Sustainability Global Bonds: Innovation of Marketing, Product and Services (iNews Maker Awards 2022).

At the international level, IIF also received the Best Sustainability Bond for Non-Banking Financial Institution award at The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country and Regional Awards 2021 and the Sustainability Bond of the Year Award—Financial Institution in the 2022 Environmental Financing Bond Award category. IIF also garnered four other awards in the category of business models and transactions throughout 2022: Project Finance House of the Year, Digital Infrastructure Deal of the Year, Transport Deal of the Year, and Water Deal of the Year at The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards event 2022 organized by Asset Publishing and Research Ltd.

Our other proud achievement was that IIF officially supports the brownfields project for port development under the Public Private Partnership (PPP) scheme in Illangata Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency. This brown-field project demonstrates IIF's contribution to supporting the development of port sector infrastructure in Indonesia.

Dari sisi bisnis *Advisory*, IIF telah melakukan penandatanganan *Head of Agreement* dengan PT Angkasa Pura I (AP I) untuk memberikan ESG *Advisory* pada 15 bandara yang beroperasi di bawah AP I. Perolehan komitmen ini mempertegas keunggulan dan keunikan bisnis IIF yang berfokus pada penegakan prinsip ESG.

Seluruh komitmen, kebijakan, dan strategi yang kami terapkan tentunya memperhitungkan risiko yang melekat dengan *business as usual* yang dijalankan. Dengan strategi bisnis yang tepat dan manajemen risiko yang efektif, tingkat kesehatan keuangan Perseroan senantiasa terjaga. Kami pun mampu menavigasikan sejumlah tantangan perekonomian sehingga dapat mempertahankan pertumbuhan yang kuat secara *top line* dan *bottom line* di mana IIF mencatatkan *healthy double-digit growth* selama tahun 2022.

Pendapatan usaha dan laba bersih berhasil tumbuh dua digit, masing-masing sebesar 20,23% dan 56,49%. Dari sisi penyaluran pembiayaan, IIF berhasil memperoleh 10 komitmen baru senilai Rp1,7 triliun. Berdasarkan basis portofolio, tiga sektor unggulan telah menjadi porsi pembiayaan terbesar di tahun 2022, yaitu Telekomunikasi, Energi Terbarukan, dan Jalan Tol.

Pada tahun 2022, IIF melakukan perubahan struktur fasilitas pinjaman untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa 1x12 MW yang awalnya ditandatangani pada tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan proyek tersebut. Proyek ini akan memanfaatkan Tandan Buah Kosong (TBK) dari pabrik kelapa sawit untuk menghasilkan energi bersih dan membantu meningkatkan pasokan listrik di Kawasan Aceh Tamiang. Adapun estimasi jumlah pengurangan emisi karbon tahun 2022 dari total 14 proyek Energi Baru Terbarukan yang dibiayai oleh IIF adalah sekitar 1,59 juta ton CO₂-eq atau setara dengan penyerapan CO₂ sekitar 55.777 pohon.

Tidak hanya dari sisi pembiayaan, IIF juga berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepedulian dan pengetahuan terkait perlindungan sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. IIF aktif berpartisipasi sebagai narasumber pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh Indonesia *Network Learning Center for Environment and Social Sustainability* (NLC-ESS), menjadi pengajar pada Program Indonesia Mengajar di Universitas Indonesia dengan topik *Social and Environmental Safeguard*, hingga menjadi dosen tamu School of Business Management Institut Teknologi Bandung dengan topik ESG.

In our *Advisory* business, IIF has signed a *Head of Agreement* with PT Angkasa Pura I (AP I), where IIF was assigned to give ESG *Advisory* for 15 airports operating under AP I. This acquired commitment further confirmed IIF's excellence and uniqueness in its ESG-focused infrastructure financing business.

We worked on our commitments, policies, and strategies after all the risks inherent in our business were carefully weighed up. The right business strategy and effective risk management have enabled the Company to maintain healthy finance. It was also that same set of initiatives that enabled us to navigate the emerging economic challenges with strong growth in both top and bottom lines, as IIF delivered healthy double-digit results during 2022.

Our operating revenues and net profit grew with double-digit figures, at 20.23% and 56.49%, respectively. In financing, IIF acquired 10 new commitments with total value reached Rp1.7 trillion. By portfolio, IIF had three leading sectors that made up the largest portion of the financing in 2022: Telecommunications, Renewable Energy, and Toll Roads.

In 2022, IIF made changes to the structure of the loan facility for the 1x12 MW Biomass Power Plant project, initially signed in 2019. This was done as part of efforts to accelerate the development of the project. The project will utilize Empty Fruit Bunches (EFB) from palm oil mills to produce clean energy and help increase the supply of electricity in the Aceh Tamiang Area. The carbon emission reduction in 2022 from 14 Renewable Energy projects financed by IIF, is estimated at 1.59 million tons CO₂-eq or equivalent to CO₂ absorption of around 55,777 trees.

Another contributing role that IIF plays in giving financing is to raise concerns over social and environmental safeguards in infrastructure development while providing education on that matter. Over the course of 2022, IIF became a guest speaker in training held by the Indonesia Network Learning Center for Environment and Social Sustainability (NLC-ESS), a lecturer at the Indonesia Teaching Program at the University of Indonesia on Social and Environmental Safeguard, and a guest lecturer at the School of Business Management Bandung Institute of Technology on ESG and ESG-related topics.

Seluruh pencapaian yang diraih serta kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada kami terkait ESG, semakin meningkatkan motivasi kami untuk memperkuat komitmen dalam memastikan berjalannya aspek keberlanjutan dari tiap investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kami meyakini penerapan ESG secara konsisten dapat memberikan *return* jangka panjang yang lebih besar kepada investor dan juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

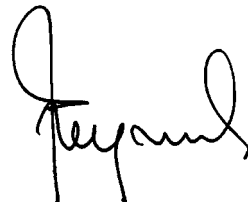
Sebagai penutup, kami menyadari bahwa pencapaian kinerja positif pada tahun 2022 tidak lepas dari kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta dukungan dari para pemangku kepentingan. Kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemangku kepentingan utama kami, yakni para karyawan IIF yang telah berdedikasi dalam membantu IIF mewujudkan komitmen keberlanjutan dan menyalurkan manfaat secara luas kepada masyarakat.

Kami berharap agar IIF dapat selalu meningkatkan perannya dalam memberikan edukasi terkait ESG serta memberikan contoh dari penerapan standar sosial dan lingkungan dan berbagi solusi dengan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

All the achievement, the trust, and appreciation that were extended to us on our ESG practice have motivated us even more to strengthen our commitment to ensuring the sustainability aspects of every investment in infrastructure development in Indonesia. The consistent application of ESG will provide greater long-term returns to investors while creating positive impacts on the environment and the surrounding communities.

We would like to conclude that our positive performance in 2022 was inseparable from the cooperation we had entered into with various parties and continued support from stakeholders. Our appreciation also goes to IIF's main stakeholders, the employees, who have shown strong dedication in helping IIF fulfill its sustainability commitment and distribute benefits to the public at large.

We hope IIF can continue to enhance its role in providing education on ESG while showing how to implement social and environmental standards and sharing solutions with various parties in dealing with the challenges faced in sustainable infrastructure development.



Reynaldi Hermansjah
Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance



Struktur Tata Kelola [GRI 2-11]

Governance Structure



Untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta memastikan tersedianya pelaporan yang memadai atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam *Sustainable Framework*, IIF membentuk *Sustainable Finance Working Group (SFWG)* yang terdiri atas koordinator, sekretaris, dan anggota dari beberapa divisi terkait yang terlibat dalam keuangan berkelanjutan. SFWG memiliki peran penting dalam mengelola aspek-aspek keberlanjutan di IIF.

To support the implementation of sustainable finance and ensure the availability of adequate reporting on the performance of sustainable finance as outlined in the *Sustainable Framework*, IIF established a *Sustainable Finance Working Group (SFWG)* consisting of coordinators, secretaries, and members from several related divisions involved in sustainable finance. The SFWG has an essential role in managing sustainability aspects at IIF.



IIF memiliki struktur tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* berdasarkan ketentuan Pasal I UUPT yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan organ-organ pendukung lainnya seperti Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengendalian Internal, dan Komite Audit. Struktur ini disusun dengan memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha berdasarkan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *checks and balances* dapat berjalan efektif.

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak Pemegang Saham. Sebagai organ Perseroan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS menjalankan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Dewan Komisaris dan Direksi berperan dalam pengembangan, persetujuan, dan memperbarui tujuan, nilai atau pernyataan misi, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan topik-topik keberlanjutan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga dibantu oleh 4 (empat) komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan 6 (enam) komite yang berada di bawah Direksi, serta Sekretaris Perusahaan dan Divisi Audit Internal. [GRI 2-12]

IIF has a corporate governance structure pursuant to provisions of Article I UUPT which consists of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other supporting organs such as the Corporate Secretary, Internal Control Unit, and Audit Committee. This structure is established after mapping business functions or activities based on business ethical standards, and ensures that the checks and balances mechanism runs effectively.

The GMS is the highest organ in the corporate governance structure, serving as the main mechanism to protect shareholders and allow them to exercise their rights. As the highest organizational organ, the GMS holds authorities delegated to neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors. The GMS enforces the Articles of Association and the applicable regulations.

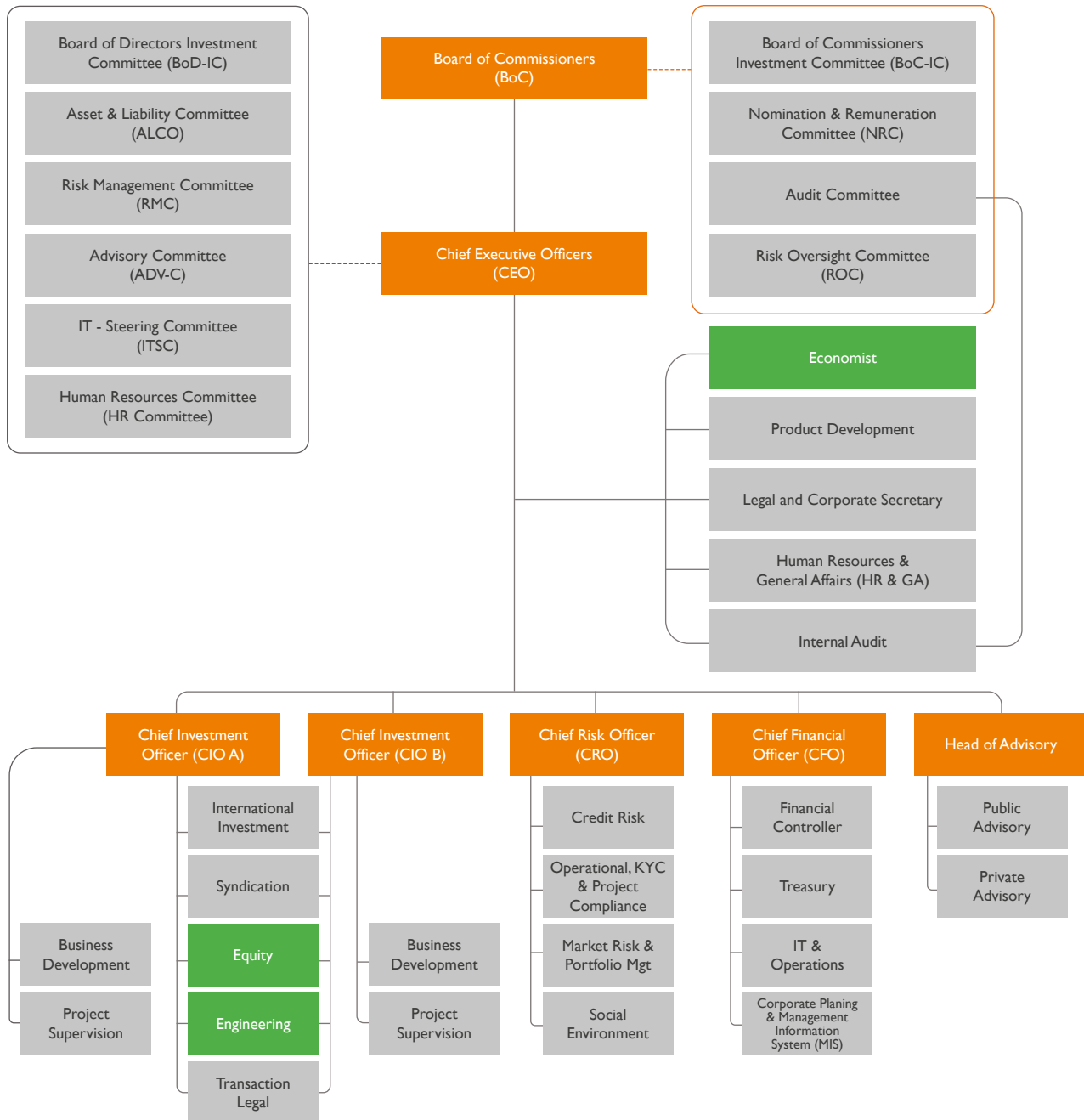
Meanwhile, the Board of Commissioners and the Board of Directors play a role in developing, approving, and updating organizational goals, values or mission statements, strategies, policies, and the Company's sustainability targets. 4 (four) committees assist the Board of Commissioners, while the Board of Directors is assisted by 6 (six) committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Division. [GRI 2-12]

Masing-masing komite tersebut mengadakan pertemuan rutin untuk mendukung Direksi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Materi rapat dan hasil keputusan rapat kemudian diteruskan kepada Komite Dewan Komisaris untuk ditinjau kembali. Dengan demikian, Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris melalui komite-komitennya akan mendapatkan informasi lengkap dan terkini mengenai kondisi operasional Perseroan. **[GRI 2-12]**

Each of these committees holds regular meetings to support the Board of Directors in the decision-making process, including economic, environmental, and social decisions. The meeting agenda and resolutions will be submitted to the Board of Commissioners Committee for review. That's how the Company ensures that the Board of Commissioners, through its committees, always gets complete and up-to-date information regarding the Company's operational conditions. **[GRI 2-12]**

Struktur Tata Kelola **[GRI 2-9]**

Governance Structure



Keterangan | Notes:

Kotak hijau mengindikasikan posisi kosong | The green boxes indicate vacant position

Komposisi Dewan Komisaris [GRI 2-9]**Board of Commissioners Composition**

Jabatan	Jumlah (Orang) Total (Person)	Position
Non-independen	6	Non-independent
Independen	3	Independent

Komposisi Organ Tata Kelola berdasarkan Status Jabatan [GRI 2-9]**Composition of Corporate Governance based on Position**

Jabatan	Jumlah (Orang) Total (Person)	Position
Dewan Komisaris	9	Board of Commissioners
Direksi (Eksektif)	5	Board of Directors (Executive)

Komposisi Organ Tata Kelola Dewan Komisaris berdasarkan Masa Jabatan [GRI 2-9]**Board of Commissioners Composition of Corporate Governance based on Term of Office**

Jabatan	Jumlah (Orang) Total (Person)	Position
1–3 Tahun	6	1–3 Years
4–6 Tahun	3	4–6 Years

Komposisi Organ Tata Kelola berdasarkan Jenis Kelamin [GRI 2-9]**Composition of Corporate Governance based on Gender**

Jabatan	Jumlah (Orang) Total (Person)	Position
Laki-laki	13	Male
Perempuan	1	Female

Catatan | Notes:

- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kompetensi terkait topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.
All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have competence related to economic, environmental and social topics
- Tidak ada Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif Perseroan. [GRI 2-11]
None of the members of the Board of Commissioners assume any other positions as executive officers of the Company. [GRI 2-11]

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [GRI 2-10]

IIF memiliki kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang menjunjung tinggi prinsip keberagaman yang mempertimbangkan keahlian, usia, pendidikan, dan pengalaman berkarier profesional, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

IIF melalui Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau *Nomination and Remuneration Committee* (NRC) berdasarkan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014. Seluruh anggota NRC Perseroan telah memenuhi kriteria atau kualifikasi perseorangan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014 sehingga dapat ditunjuk dan diangkat sebagai anggota NRC, antara lain:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama;
2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
3. Bukan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
4. Bukan anggota Direksi; dan
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Setiap anggota NRC memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan pasar modal, operasional perusahaan, ketenagakerjaan serta hubungan industrial, serta mempunyai

NOMINATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-10]

IIF has a nomination policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors that upholds the principle of diversity and takes into account the members' expertise, age, education, and professional career experience, regardless of gender, ethnicity, race, and religion.

IIF, through the Board of Commissioners, has formed a Nomination and Remuneration Committee (NRC) based on POJK provisions No. 34/POJK.04/2014. All members of the Company's NRC have met the individual criteria or qualifications as stipulated in POJK 33/2014, so they can be appointed and assigned as members of the NRC, as listed below:

1. Has no affiliation with Issuers or Public Companies, members of the BoD, members of the BoC, or Major Shareholders;
2. Has experience related to Nomination and/or Remuneration;
3. Not any one that assumes a managerial position under the BoD in charge of human resources;
4. Not a BoD member; and
5. Not assuming any other position as member of other committees of an Issuer or Public Company.

Each member of the NRC shall have adequate knowledge of the laws and regulations of the capital market, the Company operations, employment and industrial relations, adequate knowledge and

pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik. Masa kerja NRC tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

NRC bertanggung jawab untuk mengajukan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dalam Anggaran Dasar. Selain itu NRC memiliki fungsi untuk memberikan saran mengenai remunerasi anggota Direksi dan Komisaris Independen, serta menetapkan kebijakan remunerasi yang umum berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan.

Berikut adalah prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi IIF:

- NRC melakukan seleksi dan memberikan nominasi calon yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris melakukan seleksi dan memberikan nominasi calon yang akan direkomendasikan kepada pemegang saham;
- Ketua NRC dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi nominasi calon dan remunerasinya kepada pemegang saham;
- Pemegang saham memberikan tanggapan, pertanyaan dan/atau persetujuannya pada nominasi yang disampaikan oleh Ketua NRC dan Dewan Komisaris;
- Khusus untuk anggota Komisaris yang mewakili pemegang saham, seleksi dan nominasinya dilakukan oleh pemegang saham terkait.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [GRI 2-19][GRI 2-20]

Ketentuan mengenai struktur dan besaran remunerasi Direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, berdasarkan hasil evaluasi dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan belum melibatkan konsultan atau pihak ketiga lainnya. Besaran remunerasi Direksi pada tahun buku 2022 disajikan pada Laporan Keuangan Audit Perusahaan tahun 2022.

Penentuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dengan pembahasan oleh Dewan Komisaris mengenai indikator-indikator utama yang harus diperhatikan dalam proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris kemudian menentukan usulan struktur dan besaran remunerasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pertimbangan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, usulan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan kepada pemegang saham pada saat RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.

Berikut ini adalah indikator-indikator utama yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:

1. Kinerja Perseroan;
2. Faktor skala usaha;

experience in accordance with his educational background, and the ability to communicate well. The term of office of the NRC may not be longer than the term of office of the BoC as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed for the next term of office.

The NRC nominates candidates for members of both the Board of Directors and members of the Board of Commissioners without prejudice to the provisions of Article 13 paragraph (4) in the Articles of Association. The NRC also has the function to provide advice on the remuneration of members of the Board of Directors and Independent Commissioners and to establish remuneration policies that apply to all employees of the Company.

Below are the nomination procedure for IIF the Board of Commissioners and the Board of Directors:

- The NRC selects and gives a list of nominated candidates as recommendation to the Board of Commissioners;
- The Board of Commissioners selects the candidates to be proposed to the shareholders;
- The Chairman of the NRC and the Board of Commissioners propose the recommended candidates and their remuneration to shareholders;
- Shareholders give their responses, questions and/or approval to the nominations submitted by the Chairman of the NRC and the Board of Commissioners;
- Specifically for members of the Board of Commissioners who represent shareholders, the selection and nomination process are carried out by the relevant shareholders.

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-19] [GRI 2-20]

Provisions regarding the amount and structure of the remuneration of the Board of Directors are determined in the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), based on the evaluation and the recommendations results of the Nomination and Remuneration Committee. The amount of remuneration for the Board of Directors in the 2022 financial year is presented in the Company's 2022 Audited Financial Statements.

The determination of the remuneration for the BoC and the BoD begins with a discussion by the BoC regarding the key indicators that must be considered in the entire process of the BoC and the BoD remuneration determination. Furthermore, the BoC shall determine the proposed remuneration structure and amount with due consideration of the evaluation results and reviews given by the Nomination and Remuneration Committee. The proposal for determining the remuneration for the BoC and the BoD will then be submitted to shareholders at the Annual GMS for approval.

The following are some key indicators or determining factors that serve as the basic consideration in determining the remuneration of the BoC and the BoD:

1. Company Performance;
2. Business scale factor;

3. Faktor kompleksitas usaha;
4. Tingkat inflasi;
5. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan; dan
6. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PENYAMPAIAN HAL-HAL KRITIS [GRI 2-16]

Hal-hal kritis merupakan kekhawatiran yang muncul dari pemangku kepentingan mengenai risiko atau potensi dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Penyampaian hal-hal kritis secara internal dapat dilakukan secara dua arah, baik dari karyawan kepada Dewan Komisaris dan Direksi ataupun sebaliknya. Penyampaian hal-hal kritis dari sisi internal dapat disampaikan melalui Laporan Tertulis/Memorandum yang mengkritisi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proyek tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sedangkan penyampaian hal-hal kritis dari pemangku kepentingan eksternal dapat disampaikan melalui kontak perusahaan yang tertera di website, umpan balik pada Laporan Keberlanjutan, maupun *whistleblowing system*.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [GRI 2-18]

IIF melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diukur dan dievaluasi melalui *Key Performance Indicator* (KPI). KPI tersebut menjelaskan pencapaian dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi baik secara kolektif maupun individu dilakukan setiap tahun dengan metode *self-assessment* oleh masing-masing anggota Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi juga bertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan langsung kepada Presiden Komisaris, sementara hasil penilaian kinerja Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil evaluasi kinerja Direksi kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Direksi ke depannya dan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau untuk menyusun struktur remunerasi Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

[OJK E.1][GRI 2-12] [GRI 2-13]

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, IIF telah membentuk *Sustainable Finance Working Group* (SFWG) yang berada di bawah tanggung jawab *Chief Financial Officer* dan *Chief Risk Officer*, serta

3. Business complexity factor;
4. Inflation rate;
5. Company's financial condition and capability; and
6. Other relevant factors, and must not conflict with the laws and regulations.

SUBMISSION OF CRITICAL THINGS [GRI 2-16]

Critical matters are concerns expressed by the stakeholders over risks or potential negative impacts of the Company's business operations. A two-way method is applied in defining critical matters internally, from employees to the Board of Commissioners and Directors or vice versa. Anyone can express critical matters through a Written Report/ Memorandum to give critics on the project's economic, social, and environmental aspects to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. Meanwhile, external stakeholders can submit critical matters through the company contact listed on the website, feedback sheet on the Sustainability Report, or the whistleblowing system.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-18]

IIF evaluates the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors using Key Performance Indicators (KPI). The KPI defines by economic, social, and environmental aspects. The two boards' performance is evaluated both collegiately and individually using the self-assessment method by each board member. The Board of Commissioners and the Board of Directors are also accountable for their performance to shareholders through the GMS.

The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is evaluated by weighing their respective duties and responsibilities in compliance with regulatory provisions and/or the Company's Articles of Association. The results of the Board of Commissioners appraisal are submitted directly to the President Commissioner; while the results of the Board of Directors appraisal are to the Board of Commissioners. The President Commissioner will then give it a final assessment based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

The Board of Directors appraisal results are then used to give directions to improve the BoD's future performance and serve as the basic considerations for the Nomination and Remuneration Committee in providing recommendations to the Board of Commissioners to reappoint members of the Board of Directors and/or to formulate the remuneration structure for the Board of Directors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SUSTAINABILITY GOVERNANCE ORGANS

[OJK E.1][GRI 2-12][GRI 2-13]

In implementing sustainable finance, IIF has formed a Sustainable Finance Working Group (SFWG) under the responsibility of the Chief Financial Officer and Chief Risk Officer and also formed a

Social and Environmental Division (SED) yang berada di bawah tanggung jawab *Chief Risk Officer*. SFWG bertanggung jawab melaporkan segala pelaksanaan aktivitas Keuangan Berkelanjutan dengan didukung oleh SED, Divisi Finance Control, Divisi Manajemen Risiko, Divisi SDM dan Umum, Divisi Investasi, dan Divisi Legal & Corporate Secretary.

Sustainable Finance Working Group (SFWG)

Untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta memastikan tersedianya pelaporan yang memadai atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam *Sustainable Framework*, IIF membentuk *Sustainable Finance Working Group (SFWG)* yang terdiri atas koordinator, sekretaris, dan anggota dari beberapa divisi terkait yang terlibat dalam keuangan berkelanjutan.

SFWG diharapkan untuk dapat menjalankan beberapa fungsi yaitu:

- Mengkoordinasikan penilaian kesesuaian proyek yang diusulkan untuk penggunaan dana *Sustainability Bond* dengan mengacu pada *Sustainability Framework*;
- Menyusun *Sustainability Impact Reporting* setiap tahun selama periode Obligasi (*Sustainability Bond*) berlangsung sebagaimana dipersyaratkan dalam *Sustainability Framework*;
- Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta Laporan Keberlanjutan yang akan disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada penyusunan Laporan Keberlanjutan yang menjadi tanggung jawab SFWG, Direksi secara formal memberikan persetujuan serta memastikan bahwa topik-topik utama telah diungkapkan dalam laporan. **[GRI 2-14]**

Dalam RAKB, SFWG mendapatkan dukungan dari seluruh lini Manajemen dan karyawan IIF. SFWG sebagai koordinator dalam pelaksanaannya dibantu oleh berbagai divisi terkait selama proses penyusunan, pelaporan, serta penerapan program-program keuangan berkelanjutan. Sementara itu, penerapan Prinsip S&E dalam setiap proyek yang dibiayai oleh IIF secara komprehensif dikelola oleh Divisi Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Division – SED*) dalam upaya untuk memitigasi risiko dan dampak kegiatan proyek terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan Duties and Responsibilities in the Implementation of Sustainable Finance Activities

Pihak Terkait Related Party	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pengawasan dan pemberian saran terhadap pengelolaan RAKB yang dilakukan oleh Direksi IIF.	Overseeing and providing advice on RAKB management carried out by the IIF Board of Directors.
Direksi Board of Directors	Pengelolaan Program RAKB secara keseluruhan yang mendukung Visi dan Misi IIF serta tujuan dari penerapan RAKB.	Comprehensive RAKB Program Management to support IIF's Vision and Mission and the objectives of RAKB implementation.

Social and Environmental Division (SED) under the responsibility of the *Chief Risk Officer*. SFWG is tasked with reporting the implementation of all Sustainable Finance activities supported by SED, Finance Control Division, Risk Management Division, HR and General Affairs Division, Investment Division, and Legal & Corporate Secretary Division.

Sustainable Finance Working Group (SFWG)

To support the implementation of sustainable finance and ensure it comes with adequate reporting as outlined in the *Sustainable Framework*, IIF has established a *Sustainable Finance Working Group (SFWG)* consisting of coordinators, secretaries, and members from several related divisions involved in sustainable finance.

SFWG is expected to have the capability to perform several functions, namely:

- Coordinate suitability assessment of a proposed project for the use of *Sustainability Bond* funds with reference to the *Sustainability Framework*;
- Prepare annual *Sustainability Impact Reporting* until the maturity date of the Bond (*Sustainability Bond*) as required in the *Sustainability Framework*;
- Prepare a *Sustainable Finance Action Plan (RAKB)* and a *Sustainability Report* which will be submitted every year to the Financial Services Authority (OJK).

In preparing the *Sustainability Report*, which is the responsibility of the SFWG, the Board of Directors formally approves and ensures that the main topics have been disclosed in the report. **[GRI 2-14]**

In the RAKB, SFWG is supported by all lines of IIF's Management and employees. Various related divisions assist the SFWG as the coordinator in its implementation during the process of preparing, reporting, and implementing sustainable finance programs. Meanwhile, the implementation of S&E Principles in each of IIF's portfolio projects is comprehensively managed by the *Social and Environmental Division (SED)* to mitigate project risks and impacts in terms of social and environmental aspects.

Pihak Terkait Related Party	Tugas dan Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
Sustainable Finance Working Group (SFWG)	- Menyusun RAKB IIF. - Memastikan kepatuhan dan pelaporan pelaksanaan Program RAKB kepada Direksi IIF dan Otoritas terkait. - Menyusun Laporan Keberlanjutan IIF. - Berperan aktif dalam produk ataupun kegiatan IIF yang bersangkutan dengan <i>Sustainability</i> (<i>Sustainable Financing</i>, <i>Sustainable Bonds</i>, dan lainnya).	- Preparing the IIF RAKB. - Ensuring compliance and reporting the implementation of the RAKB Program to IIF Directors and related Authorities. - Preparing IIF Sustainability Report. - Playing an active role in IIF products or activities related to Sustainability (<i>Sustainable Financing</i>, <i>Sustainable Bonds</i>, and others).
Hukum & Sekretaris Perusahaan Legal & Corporate Secretary	- Melakukan koordinasi dengan divisi terkait lainnya dalam pelaksanaan CSR. - Sebagai pintu utama arus komunikasi dengan pihak eksternal.	- Coordinating with other related divisions in the CSR implementation. - As the main gate of communication flow with external parties.
Social and Environmental Division (SED)	- Mendukung penerapan RAKB serta penyesuaian dengan prinsip S&E dalam ruang lingkup internal dan eksternal IIF. - Mengelola penerapan Prinsip S&E dalam setiap proyek yang dibiayai oleh IIF secara komprehensif dalam upaya untuk memitigasi risiko dan dampak kegiatan proyek terhadap aspek sosial dan lingkungan.	- Supporting the implementation of RAKB and adjustments to S&E principles within IIF's internal and external scope. - Comprehensively managing the implementation of the S&E Principles in every project financed by IIF to mitigate the risks and impacts of project activities on social and environmental aspects.
Divisi Finance & Accounting dan Divisi Corporate Planning Finance & Accounting Division and Corporate Planning Division	- Mendukung dalam penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan. - Mendukung pelaporan realisasi anggaran CSR. - Memastikan kesesuaian RAKB dengan Rencana Strategi Bisnis IIF. - Mendukung sinergisasi dan penerapan pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan.	- Supporting the preparation of RAKB and Sustainability Reports. - Supporting the reporting of the realization of the CSR budget. - Ensuring the conformity of the RAKB to with IIF's Business Strategy Plan. - Supporting the synergy and implementation of the development of sustainable financial products and services.
Departemen HR HR Department	- Melakukan rekrutmen karyawan atas kebutuhan penguatan internal organisasi terkait penerapan RAKB; - Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan.	- Conducting employee recruitment for the need for internal organizational strengthening related to RAKB implementation; - Conducting competency improvement training related to Sustainable Finance.
Direktorat Manajemen Risiko Directorate of Risk Management	Melakukan kajian dan pembaruan atas risiko-risiko yang mungkin timbul baik dalam risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko S&E.	Conducting studies and updates on risks that may arise i.e. credit risk, market risk, operational risk and S&E risk.
Direktorat Investasi Investment Directorate	Menyediakan proyeksi sektor infrastruktur yang menjadi target IIF.	Providing projections of infrastructure sectors targeted by IIF.

SED DAN SISTEM PENGELOLAAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN [GRI 2-23][GRI 2-24]

Untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab pengelolaan tata kelola keberlanjutan, IIF memiliki Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (SEMS), yang menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko Sosial dan Lingkungan (S&E) serta risiko reputasi.

Risiko sosial dan lingkungan dapat muncul apabila proyek tidak mematuhi dan/atau tidak menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengabaikan penerapan *Good International Industry Practice* (GIIP) terkait aspek S&E. Sementara risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha IIF atau persepsi negatif terhadap IIF sehingga berpotensi memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan usaha IIF.

SEMS dikelola dan dikoordinasikan oleh *Social & Environmental Division* (SED) di bawah Direktorat Manajemen Risiko. SED dibentuk untuk memastikan bahwa semua Klien dapat mengelola risiko S&E dengan berpedoman pada penerapan Prinsip-prinsip S&E IIF. SED berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak klien atau proyek dengan memberikan bantuan terkait dengan penerapan Prinsip-

SED AND SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM [GRI 2-23][GRI 2-24]

To support the implementation of the duties and responsibilities in managing sustainability governance, IIF has a Social and Environmental Management System (SEMS), which offers guidelines for managing Social and Environmental (S&E) risk and reputation risk.

Social and environmental risks can arise if a project does not comply with and/or does not apply the rules and regulations in Indonesia and fails to implement *Good International Industry Practice* (GIIP) related to S&E aspects. Meanwhile, reputation risk is a risk caused by, among other things, negative publications or negative perceptions, which in turn will potentially affect the sustainability of its business.

SEMS is managed and coordinated by the *Social & Environmental Division* (SED) under the Risk Management Directorate. SED has been established to ensure that all Clients can manage their S&E risk using IIF's S&E Principles as guidance. SED is committed to reaching out to more clients or projects by providing assistance related to the implementation of the S&E Principles (SEP). SED will also

prinsip S&E (*S&E Principles–SEP*). SED juga akan memberikan *Corrective Action Plans* (CAPs) terhadap proyek-proyek yang diidentifikasi memiliki kesenjangan terhadap SEP. SED juga terus mempromosikan dampak positif penerapan SEP melalui kegiatan peningkatan kapasitas yang bermanfaat bagi IIF dan klien.

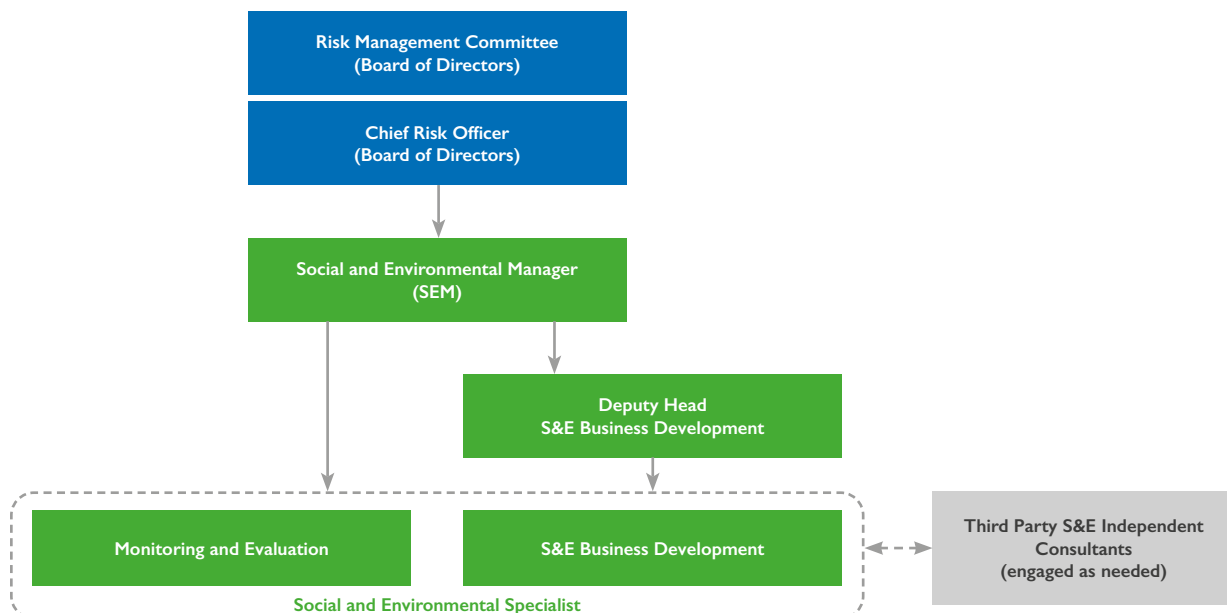
Hingga tanggal 31 Desember 2022, SED memiliki anggota 11 orang staf, yang merupakan peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Staf SED tersebut memiliki keahlian beragam dari berbagai latar belakang dan pengalaman di bidang sosial dan lingkungan. Seperti keahlian dalam menangani isu pembebasan lahan, masyarakat adat, keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan, rekayasa lingkungan, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

provide *Corrective Action Plans* (CAPs) for projects with SEP gaps. SED also continues to promote the positive impact of implementing SEP through capacity-building activities that benefit both IIF and its clients.

As of December 31, 2022, SED had 11 staff, an increase of 10% from the previous year. The SED staff have diverse expertise and experience from various social and environmental backgrounds, e.g., expertise in land acquisition, indigenous peoples, biodiversity, environmental management, environmental engineering, and Occupational Health and Safety (OHS).

Struktur SED

SED Structure



SED menunjuk Konsultan S&E independen untuk membantu SED dalam memahami dampak S&E, risiko dan peluang yang dihadapi oleh Perseroan. Keahlian konsultan diperlukan untuk membantu IIF memberikan penilaian yang komprehensif utamanya terhadap proyek-proyek dengan risiko yang lebih tinggi. Konsultan S&E independen juga mungkin diperlukan untuk melihat peluang khusus yang berkaitan dengan bisnis berisiko tinggi atau aspek tertentu dari bisnis yang menjadi perhatian seperti isu pencemaran polusi, keanekaragaman hayati, pembebasan lahan, dan/atau masalah kesehatan dan keselamatan kerja. **[GRI 2-25]**

Konsultan juga dilibatkan dalam berbagai ruang lingkup pekerjaan, seperti pengerjaan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), penilaian S&E yang lebih terbatas dan terfokus pada pengelolaan isu tertentu (seperti pembuatan *Biodiversity Action Plan*), proses Audit/ Pemantauan/Pengawasan S&E, dan pelaksanaan Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan (SEDD).

SED appoints an independent S&E Consultant to it more insights into the S&E impacts, risks, and opportunities to which the Company is exposed. Consultant expertise is needed to assist IIF in providing comprehensive assessments, especially for higher-risk projects. Independent S&E consultants may also be required to look into specific opportunities related to high-risk businesses or particular aspects of the business of concern, such as pollution, biodiversity, land acquisition, and/or occupational health and safety issues. **[GRI 2-25]**

Consultants are also involved in various scopes of work, such as in making Environmental and Social Impact Assessments (ESIA), S&E assessments that are more limited and focused on managing specific issues (such as developing a Biodiversity Action Plan), Audit/ Monitoring/S&E Supervision processes, and conducting Social and Environmental Due Diligence (SEDD).

SED IIF didukung oleh *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Finance Corporation (IFC)*, dan *Asian Development Bank (ADB)*, yang telah memberikan komentar dan ulasan konstruktif pada kegiatan penilaian, pemantauan dan pengawasan proyek. IBRD, IFC, dan ADB bersama-sama mendukung staf SED dalam meninjau SEDD, ESAP, dan dokumen perlindungan hukum untuk memastikan bahwa risiko S&E telah diidentifikasi dengan baik dan disertai dengan upaya pengelolaan dan mitigasi risiko yang kemudian akan dimasukkan ke dalam persyaratan proyek.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TATA KELOLA KEBERLANJUTAN [OJK E.2][GRI 2-17]

Sejak pertama kali IIF berdiri, keberlanjutan menjadi landasan utama bagi pertumbuhan Perseroan sehingga seluruh karyawan telah dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan di bidang keberlanjutan atau ESG. IIF secara rutin memberikan pengembangan kompetensi kepada karyawan IIF khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam topik keberlanjutan sehingga dapat memahami perkembangan ilmu dan masalah-masalah serta solusi terkait keberlanjutan. Kompetensi ini juga diperlukan oleh IIF sebagai penyedia jasa konsultasi (*Advisory Service*) terkait ESG yang diharapkan dapat mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 2022 Competency Development Program

Time	Subject	Organizer
10-Jan-22	ESG, Green Taxonomy, Carbon Trading, Carbon Tax and IIF	S&E IIF
27-Jan-22	OJK Institute: The Impact of ESG on the Performance of the Financial Services Industry	OJK Institute
27-Jan-22	The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry	OJK Institute
14-Feb-22	Webinar: Mapping ESG integration in public infrastructure finance in the Asia Pacific	Sergiu George Jiduc
7-Apr-22	ESG Integration and Its Impact on Chief Financial Officers	ERM
6-Jun-22	ESG Discussion: Integrating ESG Into Business Process	Maverick
27-Jun-22	ESG Fundamentals	CRMS
29-Jun-22	ESG Trends and Economic Outlook	Eximbank
8-Jul-22	Internal Audit Role in Preparing ESG Reports	Institute of Internal Auditors
8-Aug-22	Sharing Session: Penerapan ESG di Pasar Modal Indonesia	IIF & IDX
24-Aug-22	ESG Manual Training	Ministry of Finance (MoF)
30-Aug-22	Fitch Roundtable on 'Sustainable Fitch: Introduction to ESG Ratings'	Sustainable Fitch
31-Aug-22	Enhancing your ESG Reporting	IDX-PwC
1-Sep-22	DCM & ESG discussions BNP Paribas and PT IIF	BNP Paribas
1-Sep-22	Debt Capital Market and ESG	Bank BNP Paribas
1-Sep-22	ESG Bond	Bank BNP Paribas
12-Nov-22	Launching of ESG Framework and Manual: Journey to ESG Implementation for Infrastructure Financing in Indonesia	IIF-MoF
17-Nov-22	Environment, Social and Governance (ESG) under Public-Private Partnership (PPP) Training	World Bank and MoF
23-Nov-22	ESG Update	Mandiri Investasi

MANAJEMEN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.3][GRI 2-25]

Perseroan meyakini penerapan manajemen risiko yang cermat, terintegrasi, dan efektif menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memastikan tercapainya pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta dalam rangka memaksimalkan nilai tambah bagi Pemegang Saham. IIF melakukan pengelolaan risiko

The International Bank supports IIF SED for Reconstruction and Development (IBRD), the International Finance Corporation (IFC), and the Asian Development Bank (ADB), who have provided constructive comments and reviews on project appraisal, monitoring, and supervision activities. IBRD, IFC, and ADB jointly support SED staff in reviewing SEDD, ESAP, and legal safeguards documents to ensure that S&E risks are properly identified and accompanied by risk management and mitigation efforts that will then be incorporated into project requirements.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE COMPETENCE DEVELOPMENT [OJK E.2][GRI 2-17]

Since its first establishment, IIF has laid out sustainability as the central foundation of its pursuit of growth by equipping all its employees with relevant knowledge and skills in sustainability or ESG. IIF routinely provides employee competency development programs, especially for those in charge of sustainability topics, to ensure they grasp whatever is taking place in the sustainability discipline, its current and future, and what solutions have been offered. As a provider of consulting services, IIF also needs this ESG-related competency to support the implementation of sustainable development in Indonesia.

RISK MANAGEMENT OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.3][GRI 2-25]

The Company believes that careful, integrated, and effective risk management is one of the conditions that must be met to ensure the achievement of healthy and sustainable business growth and eventually deliver maximum added value to Shareholders. IIF runs risk management through a comprehensive spectrum of risk

melalui unit manajemen risiko yang bersifat menyeluruh atas setiap kegiatan usahanya. Setiap tahapan pengelolaan risiko diatur secara sistematis dan efektif yang memungkinkan adanya proses umpan balik yang berkesinambungan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan mengadopsi prinsip tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) yang terdiri dari *Business & Supporting Units* sebagai lini pertahanan pertama. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Risiko berperan sebagai lini pertahanan kedua yang akan memeriksa, memverifikasi, dan menyediakan opini independen kepada Manajemen berkenaan dengan proposal dari Unit Pengambil Risiko serta memantau portofolio investasi bersama dengan Direktorat Keuangan dan Operasi. Selanjutnya, lini pertahanan ketiga dan terakhir adalah Tim Audit Internal, yang akan memverifikasi untuk memastikan semua standar prosedur IIF telah terpenuhi. Strategi ini secara keseluruhan adalah bagian dari konsep *four eyes principle* di mana Perseroan melakukan pembagian tugas secara jelas dan konsisten untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan secara optimal.

Dalam hal risiko sosial dan lingkungan atas proyek-proyek yang dibiayai, IIF memiliki standar dan Prinsip S&E yang menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. IIF berupaya melakukan penerapan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dengan memastikan pembiayaan yang dilakukan oleh IIF telah memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta sosial yang berlaku. Risiko dapat muncul sewaktu-waktu apabila proyek berjalan tidak mematuhi dan/atau tidak mengindahkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan/atau mengabaikan penerapan GIIP terkait aspek sosial dan lingkungan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO [OJK E.3]

Untuk memantau manajemen risiko kegiatan bisnis, IIF telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee–RMC*) yang aktif memantau dan memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi manajemen risiko IIF. Komite ini beranggotakan lima anggota direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO).

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain:

1. Memberikan rumusan strategis kebijakan dan kerangka kerja Manajemen Risiko, termasuk penetapan batas kerangka kerja dan perumusan rencana darurat untuk kondisi yang merugikan;
2. Mengawasi proses evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalisir risiko potensial di proyek maupun di tingkat portofolio, mengembangkan budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan, dan memastikan bahwa Departemen Manajemen Risiko mampu melakukannya secara mandiri;
3. Menyelidiki, menganalisis, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur pada umumnya;

management units in each Company's business activities. Each risk management stage is managed systematically and effectively and gives room for continuous feedback.

In carrying out its business activities, the Company has adopted the principle of three lines of defense consisting of Business & Supporting Units as the first line of defense. Furthermore, the Risk Management Directorate acts as a second line of defense that will examine, verify, and give independent opinions to Management regarding proposals from the Risk-Taking Units and monitor investment portfolios in collaboration with the Finance and Operations Directorate. Furthermore, the third and final line of defense is the Internal Audit Team, which will verify that all IIF standard procedures have been met. This strategy is part of the four eyes principle concept in which the Company performs a clear and consistent division of tasks to support sustainable growth optimally.

Regarding social and environmental risks inherent in every project it finances, IIF adopts S&E Principles and Standards, which form the basis for sustainable development that encourages harmony between economic, social, and environmental aspects. IIF strives to apply the precautionary principle by ensuring that its financing facility complies with applicable environmental, security, health and safety, and social terms and conditions. Risks can arise at any time if IIF's ongoing project does not comply with and/or does not heed the rules and regulations that apply in Indonesia and/or fails to implement GIIP related to social and environmental aspects.

OVERVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM [OJK E.3]

To monitor its business risk management, IIF has set up a Risk Management Committee (RMC) that does an active oversight and gives recommendations in the formulation of IIF's risk management policies and strategies. This committee is made up of five members of the board of directors led by the President Director and Chief Executive Officer (CEO).

The followings are the duties and responsibilities of RMC:

1. Deliver the strategic formulation of Risk Management policies and frameworks including setting the framework limits and the formulation of contingency plans in situations or conditions that may be detrimental to the Company;
2. Oversee the evaluation process and management of the overall risk composition in IIF portfolio, minimize potential risks at the project and at the portfolio level, develop a Risk Management culture at all levels, and ensure that the Risk Management Department is able to do it independently;
3. Investigate, analyze, and take necessary actions in relation to issues related to business decisions that deviate from general procedures;

4. Mengevaluasi proposal terkait aktivitas dan produk baru, mengukur keinginan dan kapasitas IIF dalam melakukan aktivitas dan produk baru melalui perspektif risiko, serta mengevaluasi proposal untuk perubahan terkait kebijakan dan prosedur;
5. Memantau kecukupan modal IIF terhadap risiko yang diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan toleransi risiko Perusahaan;
6. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, merumuskan perubahan yang diperlukan untuk kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada, mengevaluasi kecukupan pengendalian internal, dan meninjau laporan *Management Information System* (MIS) secara regular;
7. Melakukan tinjauan rutin untuk mengevaluasi kesesuaian metodologi penilaian risiko;
8. Mengkaji dan menyetujui Laporan Manajemen Risiko Triwulanan yang dihasilkan oleh Departemen Manajemen Risiko;
9. Meninjau dan mengusulkan perubahan apa pun, jika diperlukan, pada parameter atau indikator risiko apa pun kepada Komite Pemantau Risiko untuk persetujuan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
10. Terkait dengan Pencegahan Kecurangan dan Korupsi, RMC bertanggung jawab untuk: **[GRI 205-I]**
 - a. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan etika karyawan atas penipuan (kecurangan) dan korupsi;
 - b. Meninjau penilaian risiko kecurangan dan korupsi untuk seluruh lingkup Perseroan sebagaimana disusun oleh Direktorat Manajemen Risiko setidaknya tiga tahun sekali, atau setelah terjadinya perubahan struktural atau fungsional yang signifikan di IIF;
 - c. Menentukan strategi pengendalian penipuan dan korupsi untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi oleh kesadaran atas penipuan dan korupsi;
 - d. Memastikan setiap karyawan dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing menerima pelatihan peningkatan kesadaran atas penipuan dan korupsi dan memahami Kode Etik IIF;
 - e. Merekomendasikan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk deteksi dan pencegahan penipuan dan korupsi; dan
 - f. Meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur apabila diperlukan namun setidaknya setiap dua tahun sekali untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip, standar, dan praktik terbaik dalam pencegahan penipuan dan korupsi.

TANTANGAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.5]

Penerapan keuangan berkelanjutan memiliki sejumlah tantangan. Seperti apabila terjadi perubahan arahan atau regulasi dari pemerintah terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan yang dapat menghambat atau menunda eksekusi pembangunan infrastruktur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, IIF secara rutin menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pejabat terkait untuk mengetahui arah kebijakan selanjutnya dan sedapat mungkin melakukan penyesuaian pada aksi keuangan berkelanjutan Perseroan.

CHALLENGES IN IMPLEMENTING SUSTAINABLE FINANCE [OJK E.5]

The implementation of sustainable finance is exposed to certain challenges. One such challenge is a change in directives or regulations of the government related to the implementation of sustainable finance, which can hinder or cause infrastructure development to start or run far behind schedule. To anticipate this, IIF regularly communicates with stakeholders and relevant officials to get information on the next policy direction and do what it takes to make adjustments to the Company's sustainable financial actions.

Dalam pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan, IIF memiliki tantangan di mana terdapat tantangan perubahan preferensi debitur dan produk investasi yang tersedia di pasar sektor infrastruktur khususnya pembiayaan infrastruktur di Indonesia. IIF juga menyadari bahwa diperlukan usaha yang lebih untuk meningkatkan kesadaran debitur maupun masyarakat umum terkait dengan implementasi Prinsip S&E. Untuk menghadapi hal tersebut, IIF akan memberikan asistensi dan sosialisasi kepada calon debitur maupun debitur dalam penerapan 8 Prinsip S&E.

Kendala lain yang dihadapi selama tahun 2022 adalah ketatnya persaingan dengan industri perbankan yang kini mulai menjajaki pembiayaan proyek infrastruktur dan menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Hal ini membuat beberapa peminjam IIF melakukan pelunasan pinjaman di luar jadwal setelah mendapat *refinancing* dari lembaga keuangan lain.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) juga memiliki tantangan. SDM IIF yang sudah cukup ahli di bidang ESG cukup diminati oleh banyak institusi sehingga menjadi tantangan bagi IIF dalam mempertahankan mereka. Diperlukan strategi khusus dalam mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang sudah memiliki kompetensi di bidang ESG.

KODE ETIK

IIF memiliki ruang lingkup kode etik yang mengatur berbagai hal terkait tata cara kerja, pola hubungan di internal maupun eksternal, serta komitmen perusahaan terkait masalah lingkungan dan kesehatan. Adapun isi Kode Etik sebagai berikut:

- **Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika**
Kebijakan yang tercantum dalam Etika Bisnis IIF merupakan panduan bagi Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dalam kebijakan ini dinyatakan bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, mencakup integritas, kewajaran, hormat, kepedulian, dan pertanggungjawaban pribadi. Selain menjadi panduan dalam pengambilan keputusan beretika sehari-hari, nilai-nilai ini juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.
- **Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal, dan Pelaporan Keuangan**
Untuk melindungi sekaligus mengawal asset dan reputasi IIF, Perusahaan berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik, perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek, informasi *insider trading*, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta retensi dokumen dan audit.
- **Benturan Kepentingan [GRI 2-15]**
Dalam melakukan kegiatan usaha dan melaksanakan tugas, baik segenap karyawan maupun perwakilan IIF, harus bebas dari

In developing sustainable financial products and services, IIF is challenged by the changing preferences of borrowers and investment products available in the infrastructure sector market, especially infrastructure financing in Indonesia. IIF also realizes that it has to make more efforts to raise awareness of debtors and the general public regarding the implementation of the S&E Principles. To deal with this, IIF will provide assistance and socialization to debtors and prospective debtors in implementing the 8 S&E Principles.

Another obstacle faced during 2022 is intense competition from the banking industry, which is now starting to explore infrastructure project financing with more competitive interest rates. Some IIF borrowers settled their loans ahead of schedule after receiving refinancing facilities from other financial institutions.

The Human Resources (HR) side of IIF's business is also exposed to its challenges. IIF's human resources, who are ESG experts, are in great demand in the industry, making it a challenge for IIF to retain them. A specific strategy is needed to keep employees who already have competence in the field of ESG.

CODE OF ETHICS

IIF has a code of ethics that governs matters pertaining to work procedures, internal and external relationships, and commitment to address environmental and health issues. The contents of the Code of Ethics are as follows:

- **Run Ethical and Law-Abiding Business**
The policies contained in IIF's Business Ethics offer guidelines to the Company in running daily business operations. The policy states that all business operations shall be based on IIF's fundamental values, namely integrity, fairness, mutual respect, caring, and personal responsibility. In addition to serving as guidelines in the day-to-day ethical decision-making process, these values are also related to adherence to personal ethics, such as the acceptance of gifts, disclosure of personal wealth, political attitudes, and donations, as well as adherence to Anti-Corruption and Fraud Prevention guidelines.
- **Information Policy, Internal Control, and Financial Reporting**
In order to give protection and safeguard its assets and reputation, IIF's management shall always base its management on a conflict of interest policy, electronic resources policy, data protection, and security policy, securities trading, insider trading information, internal control, financial reporting, as well as document retention and auditing.
- **Conflict of Interest [GRI 2-15]**
In carrying out their business activities and daily tasks, IIF's employees and representatives shall act independently and

benturan kepentingan mengingat hal ini dapat berpengaruh buruk pada keputusan, objektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perusahaan.

Seluruh proyek yang memiliki potensi konflik kepentingan juga akan menjadi subyek dari proses persetujuan sesuai dengan limit kewenangan. Jika klien meminta IIF untuk memberikan kombinasi jasa *advisory* dan pembiayaan, IIF akan:

- a. Memberikan penjelasan kepada klien terkait;
 - i. Sifat umum dan/atau sumber konflik kepentingan yang ada pada saat ini maupun potensial;
 - ii. Dalam kasus pembiayaan, preferensi IIF adalah untuk terlibat secara non-eksklusif, untuk memungkinkan memberikan penawaran pembiayaan yang sama kepada klien lain.
- b. Membentuk kebijakan, prosedur, dan prinsip-prinsip pemisahan wewenang dan tanggung jawab (*Chinese Walls*) jika diperlukan.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Kebijakan ini mengatur bahwa penggunaan semua sumber daya elektronik tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

- **Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**

Segenap karyawan dan perwakilan IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, baik pengungkapan yang bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian izin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

- **Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen, dan Kebijakan Audit**

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Keuangan tahunan dan triwulan yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang diterima luas dan IFRS. Hal ini demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi terkait akuntansi.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan, dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen, dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya

free from conflicts of interest to avoid bad influence in the decision-making process, on objectivity, or on their loyalty to the Company.

Projects deemed to have potential conflicts of interest will also be subject to an approval process depending on the scope of authority. If a client requests IIF to provide a combination of advisory and financing services, IIF will:

- a. Give explanation to the referred client on;
 - i. The general nature and/or sources of current or potential conflicts of interest;
 - ii. In the case of financing, IIF has a preference to engage on a non-exclusive basis, to enable providing the same financing offer to other clients.
- b. Set policies, procedures, and principles of separation of authority and responsibility (*Chinese Walls*) if necessary.

- **Electronic Resources Policy**

This policy stipulates that the use of all electronic resources at the Company shall be law-abiding as stipulated in IIF Business Conduct Policy. However, all IIF employees must protect IIF's electronic resources from unauthorized use and security threats.

- **Information Security and Privacy Policy**

All employees and representatives of IIF are responsible for keeping the confidentiality of IIF's information from unauthorized disclosure, whether internal or external, intentionally or coincidentally. In the same context, IIF also respects the confidentiality and sensitivity of all information that does not belong to IIF. It is also a policy of IIF to use only legal and ethical means to collect and use business and market information to get more insights into the market, customers, and competitors. IIF shall never collect or use confidential information that belongs to other parties without their explicit permission.

- **Internal Control, Financial Reporting, Document Retention, and Audit Policy**

The management of IIF is responsible for preparing comprehensive and accurate annual and quarterly Financial Statements in accordance with the principles and Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. This is to maintain appropriate accounting and financial reporting principles and policies and internal controls designed to ensure compliance with accounting-related standards, laws and regulations.

IIF ensures compliance with these policies through the activities of Internal Auditors and independent auditors, as well as through internal monitoring mechanisms. Information security must also consider the protection of confidential information from various divisions. IIF is aware that there is always a potential conflict of interest between the Advisory Division offering consulting

kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan Auditor Internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan *Advisory* dan yang melakukan transaksi pendanaan.

- **Hormati Individu dan Masyarakat**

Sikap hormat kita kepada individu dan lingkungan merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam 8 Prinsip S&E, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan *reward* yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Semua upaya ini dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan berikut:

- a. Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.

- b. Kebijakan Mengenai Pelecehan

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tidak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

- **Kebijakan Privasi**

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF sepenuhnya mematuhi kebijakan tentang kepatuhan terhadap semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

- **Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga**

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukuannya. Aksi penyuapan didefinisikan sebagai tindakan menawarkan, memberi izin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian izin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian

services and a counterpart Division in charge of financing transactions.

Information security must also include the protection of confidential information from various divisions. There may be a conflict of interest between a division providing Advisory services and another division conducting financing transactions.

- **Respect Individuals and Society**

Respect for others and society, in general, is part of the principles contained in IIF's 8 S&E Principles, which distinguish the Company from other financial institutions in Indonesia. IIF continuously seeks to recruit and retain the best talents by providing a safe, healthy work environment and proper rewards to the employees and representatives. All of these efforts are embodied in the following policies:

- a. Environment, Safety, and Health

IIF is committed to providing all employees with a safe and healthy work environment. However, each employee also has self-responsibility to update their knowledge about all applicable laws and regulations related to Environment, Safety, and Health and comply with each one of them. IIF management is responsible for providing training for all employees on relevant laws and policies.

- b. Policy Regarding Harassment

IIF is committed to providing a work environment free from all forms of inappropriate behavior and acts of harassment and ensures that it is free from prejudice against age, disability, marital status, race or color, national origin, religion, sex, sexual orientation, or gender. Every employee should understand that IIF will never tolerate any form of harassment or inappropriate behavior.

- **Privacy Policy**

IIF places significant value on earning and keeping the trust of its stakeholders, including employees, clients, business partners, and others who share their personal information with IIF. Therefore, IIF fully complies with its policy to comply with all laws regarding privacy and data protection.

- **Behavior with Business Partners and Third Parties**

IIF complies with all regulations and provisions governing anti-bribery practices and accurately keeps records of all transactions. Bribery is defined as an unlawful act of offering, permitting, or giving anything of value to a Government Official either directly or indirectly with the intention of gaining or retaining business or obtaining an improper advantage, i.e., approval of price increases, awarding of contracts, granting of operating licenses, approval of product use/registration, favorable court verdict, or tax dispute resolution. IIF adheres to a policy of executing its government contracts and sub-contracting business and fully

sengketa perpajakan. IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK ANTI-KORUPSI

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penipuan dan kecurangan (*fraud*) menjadi perhatian utama bagi Perseroan karena tindakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara serta memberikan citra buruk bagi perusahaan yang dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. IIF dengan tegas menjunjung tinggi integritas dan tidak memberikan toleransi kepada praktik korupsi di seluruh kegiatan usaha dan seluruh tingkat karyawan dan manajemen. Untuk memastikan hal tersebut, IIF telah melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan operasional dan proyek-proyek yang memiliki risiko terkait korupsi. Dengan demikian, 100% operasi IIF telah dinilai risikonya. [GRI 3-3][GRI 205-1]

Korupsi juga sudah diidentifikasi melalui pengkajian risiko yang dilakukan oleh RMC. Risiko ini dimitigasi melalui penerapan *four-eyes-principle* dan pemisahan tugas dalam aktivitas utama, larangan menerima hadiah dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang nilainya melebihi US\$100, sesi sadar risiko bagi karyawan, kebijakan pelaporan pelanggaran, dan pernyataan yang harus ditandatangani karyawan bahwa mereka akan mematuhi kode etik dan kebijakan anti-korupsi.

Direksi kemudian secara berkala meninjau dan merevisi jumlah atau nilai larangan hadiah tersebut tergantung pada praktik yang terjadi di dunia kerja. Setiap hadiah yang diterima secara langsung dan melebihi dari jumlah batas yang telah ditentukan, harus dikembalikan tanpa menyinggung maupun mengganggu reputasi pihak pengirim. [GRI 3-3]

Setelah melakukan penilaian dan identifikasi, IIF secara aktif melakukan komunikasi, sosialisasi, dan pelatihan mengenai anti-korupsi. Seluruh karyawan dan manajemen IIF telah mendapat sosialisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi sejak mereka pertama kali bekerja di IIF. Sedangkan pelatihan-pelatihan anti-korupsi juga diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, dan mitra usaha yang dilaksanakan sebagian besar secara virtual dan sebagian secara luring di Kantor Pusat. [GRI 3-3][GRI 205-2]

IIF juga mewajibkan klien dan mitra usaha untuk mematuhi kebijakan anti-korupsi IIF dan menyampaikan dokumen "Panduan Pencegahan dan Pemberantasan Penipuan dan Korupsi dalam Proyek yang Dibiayai oleh Pinjaman IBRD dan Kredit dan Hibah IDA" sebelum penandatanganan Perjanjian Fasilitas. IIF juga memasukkan klausul tentang praktik korupsi dan penipuan yang dapat dikenai sanksi sebagai bagian dari Perjanjian Fasilitas. Sepanjang tahun 2022, IIF tidak memiliki insiden korupsi yang terbukti di dalam lingkup internal Perseroan dan tidak ada mitra kerja yang diputus kontrak karena pelanggaran terkait korupsi. [GRI 3-3][GRI 205-3]

complies with applicable national, state, provincial, and local laws and regulations and with all contract terms.

ANTI-CORRUPTION POLICIES AND PRACTICES

Corruption, collusion, and nepotism (KKN), as well as fraud and scam, are the main concerns for the Company because these actions are very detrimental to the nation and state and might give the Company a bad reputation and poses negative impacts on its performance. IIF strictly upholds integrity and does not tolerate corrupt practices in all business activities and at all employee and management levels. To ensure this issue is properly addressed, IIF has assessed all operational activities and projects with risks related to corruption. Thus, 100% of IIF operations are risk assessed. [GRI 3-3] [GRI 205-1]

Corruption has also been identified through a risk assessment conducted by the RMC. This risk is mitigated through the implementation of the four-eye principle and segregation of duties in key activities, prohibition of accepting in cash or other forms of gifts in excess of US\$100, risk awareness sessions for employees, violation reporting policies, and statements that employees must sign that they will comply with the code of ethics and anti-corruption policies.

The Board of Directors shall periodically review and revise the limit of the amount or value of the gift depending on the prevailing practice in employment. Every gift received directly and exceeding the specified limit must be returned in a way that does not offend the sender, nor does it ruin their reputation. [GRI 3-3]

After a series of assessments and identification, IIF communicates actively and conducts outreach and anti-corruption training. IIF's management and employees have received socialization on anti-corruption policies and procedures since the first days of employment. IIF also holds anti-corruption training attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, employees, and business partners virtually and physically at the Head Office. [GRI 3-3][GRI 205-2]

IIF makes it mandatory for all clients and business partners to comply with IIF's anti-corruption policy and have them submit the "Guidelines for Prevention and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants" document prior to signing Facility Agreement. IIF also has a specific clause on sanctionable corrupt and fraudulent practices as part of the Facility Agreement. Throughout 2022, IIF had no proven incidents of corruption within the Company's internal scope, and no work partners had their contracts terminated for corruption practices. [GRI 3-3][GRI 205-3]

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN [GRI 2-26]

Perseroan berkomitmen untuk menjadi katalisator yang terdepan pada sektor pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Perseroan memiliki semangat untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat, terbuka, kondusif, jujur, dan transparan. Oleh karena itu, Perseroan telah menerapkan Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*—WBS) yang berfungsi sebagai media pelaporan atas pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau prosedur serta kode etik dan nilai-nilai budaya Perseroan. Peraturan WBS Perseroan telah dituangkan dalam *Operation Manual* yang telah disetujui oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Kehadiran WBS di Perseroan menjadi salah satu perwujudan nyata atas komitmen kuat Perseroan dalam menghadirkan praktik bisnis sehat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Dengan adanya WBS, Perseroan berharap seluruh karyawan menjadi lebih terdorong untuk melaporkan setiap tindakan pelanggaran atau dugaan terjadinya tindakan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan peraturan, tata nilai, dan kebijakan Perseroan tanpa ada rasa takut atau keragu-raguan sepanjang pelaporan tersebut didukung dengan kecukupan bukti awal yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme atau Prosedur Pelaporan Pelanggaran

Karyawan atau pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau aktivitas mencurigakan secara tertulis agar Perseroan mendapat deskripsi dan pemahaman yang jelas mengenai kronologis dan subjek perkara yang dilaporkan. Pelaporan pelanggaran harus dikirimkan bersama dengan surat pengantar yang menyebutkan identitas pelapor. Penyampaian laporan secara anonim hanya diperkenankan apabila pelapor dapat memberikan bukti pendukung yang memadai, informasi yang akurat, dan indikasi kuat bahwa telah terjadi penipuan/tindakan pelanggaran yang dapat mengarah pada penyelidikan lebih lanjut.

Adapun Penyampaian Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan dengan mengunduh dan mengisi Formulir Laporan Pengungkapan yang telah disediakan di situs web Perseroan <https://iif.co.id/id/hubunganinvestor/tata-kelola-perusahaan/sistem-whistleblowing-iif/>.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas dan memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan yang tidak menyenangkan yang berpotensi merugikan pelapor dan keluarganya. Apabila pelapor adalah karyawan IIF, maka Perseroan akan memberikan jaminan perlindungan terhadap jenjang kariernya ke depan, sepanjang pelaporan pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria pelaporan serta yang bersangkutan tidak terlibat dalam tindakan curang dan/atau kegiatan korupsi tersebut.

Kriteria Pelaporan

Lingkup pelaporan yang dapat ditindaklanjuti WBS Perseroan, yakni:

VIOLATION REPORTING SYSTEM [GRI 2-26]

The Company is committed to taking charge as a catalyst in Indonesia's infrastructure development financing sector. To realize the idea, the Company builds a healthy, open, conducive, honest, and transparent business environment with passion. Therefore, the Company runs a Whistleblowing System (WBS), which serves as a medium for reporting violations or alleged violations of policies and/or procedures, its code of ethics, and cultural values. The Company's WBS regulations have been outlined in the Operation Manual, which has been approved by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders.

The WBS demonstrates a concrete manifestation of the Company's unwavering commitment to delivering healthy business practices based on GCG principles. The Company hopes that the WBS will make the employees even more motivated to report any act of violation or alleged violation and/or breach of the Company's rules, values, and policies without any fear or doubt on condition that they give sufficient strong and accountable initial evidence to support their allegations.

Violation Reporting Mechanism or Procedure

Employees or other stakeholders can report alleged violations or suspicious activities in writing so the Company will have a more precise description and understanding of the chronology and subject of the reported allegation. Reporting of infringements must have a cover letter stating the whistleblower's identity. Anonymous reporting is permitted on condition that the whistleblower gives sufficient supporting evidence, accurate information, and a strong indication that a fraud/violation has been committed and is worth further investigation.

Whistleblowing Reports can be submitted by first downloading and filling out the Disclosure Report Form, available for download on the Company's website <https://iif.co.id/en/relationsinvestor/tata-kelola-enterprise/sistem-whistleblowing-iif/>.

The Company is committed to keeping whistleblower's identities confidential and providing them with maximum protection from threats, intimidation, or unpleasant actions that might harm the whistleblower and their families. In cases where the whistleblower is an employee of IIF, then the Company will guarantee protection for their future career path, as long as the violation they allege meets reporting criteria and they are not involved in the alleged fraudulent acts and/or corrupt activities.

Reporting Criteria

Below is the scope of reporting that can be followed up on the Company's WBS:

Kategori Category	Penjelasan	Descriptions
Praktik Korupsi Corruption	Tindakan menawarkan, memberikan atau meminta, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi secara tidak patut atas tindakan pihak lain.	Any act of offering, giving or asking, either directly or indirectly for something of value to unlawfully influence the actions of another party.
Praktik Kecurangan Frauds	Setiap perbuatan atau kelalaian, termasuk pemberian pernyataan yang salah baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dan menyesatkan, atau mencoba untuk menyesatkan suatu pihak demi mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya atau untuk menghindari suatu kewajiban.	Any act or omission, including giving a false statement whether intentionally or unintentionally and misleading, or trying to mislead a party in order to gain financial or other benefits or to avoid an obligation.
Praktik Kolusi Collusion	Kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang tidak benar, termasuk mempengaruhi secara tidak patut atas tindakan pihak lain.	An unlawful agreement between two or more parties that is designed to achieve an improper purpose, including unlawfully influencing the actions of another party.
Praktik Koersif Coercive	Tindakan menghalangi atau merugikan, atau mengancam untuk menghalangi atau merugikan, baik secara langsung atau tidak langsung, setiap pihak atau kepemilikan suatu pihak untuk mempengaruhi secara tidak patut tindakan suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada intimidasi dan pelecehan seksual.	Acts of obstructing or harming, or threatening to impede or harm, either directly or indirectly, any party or the property of a party to unlawfully influence the actions of a party, including but not limited to intimidation and sexual harassment.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN [OJK E.4][GRI 2-29]

Pemangku kepentingan merupakan kunci bagi IIF dalam menavigasikan pertumbuhan perusahaan. IIF senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dan berupaya untuk melibatkan mereka di beberapa aspek perusahaan. IIF berkomitmen agar seluruh pemangku kepentingan mendapatkan manfaat berkelanjutan dari setiap kegiatan yang kami jalankan.

IIF menggunakan hasil proses identifikasi untuk menentukan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*). Perseroan melakukan pemetaan dan pengelolaan isu yang menjadi fokus perhatian pemangku kepentingan, hingga merumuskan dan melaksanakan program berdasarkan isu yang dihadapi di lapangan dan kebutuhan dari masing-masing pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan agar Perseroan dapat mendengar aspirasi, kebutuhan, ide, saran, dan kritik dari para pemangku kepentingan.

RELATIONSHIP WITH STAKEHOLDERS [OJK E.4][GRI 2-29]

Stakeholders are key to IIF in navigating the Company's growth. IIF always maintains harmonious relationships with the stakeholders and seeks to involve them in several aspects of the Company on any occasion. IIF commits that all stakeholders get sustainable benefits from each of the Company's business activities.

IIF uses the results of the identification process to determine stakeholder engagement activities. The Company maps and manages issues that are the focus of attention of stakeholders to formulate and implement programs based on issues encountered in the field and takes the needs of each stakeholder into account. The objective is for the Company to hear stakeholders' aspirations, needs, ideas, suggestions, and criticisms.

Metode Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan [GRI 2-29] Stakeholder Group Identification Method

Dependency (D)	IIF memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya	IIF has a dependence on a person or an organization, or vice versa
Responsibility (R)	IIF memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi	IIF has legal, commercial or ethical responsibilities towards a person or an organization
Tension (T)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu	A person or an organization who has influence on certain economic, social or environmental issues
Influence (I)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain	A person or an organization who has influence over or the strategies or policies of other stakeholders
Diverse Perspective (DP)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya	A person or an organization who has a different perspective that may affect a given situation and stimulate an unprecedented action
Proximity (P)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki kedekatan geografis dan operasional dengan IIF	A person or organization that has proximity with IIF both geographically and operationally

Ikhtisar Basis Identifikasi, Topik, dan Metode Pelibatan Pemangku Kepentingan [OJK E.4][GRI 2-29]**Stakeholder Identification Bases, Topics, and Methods of Stakeholder Engagement Highlights**

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Stakeholders' Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods & Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Pemegang Saham dan Investor	Pengaruh dan Ketergantungan	Pemegang Saham: - Persetujuan rencana bisnis, aksi korporasi, dan struktur organisasi; - Penunjukan anggota Direksi; - Penetapan struktur tata kelola; - Keterwakilan melalui keanggotaan dalam Dewan Komisaris; dan - Pengaruh dalam pengambilan keputusan pembiayaan oleh Komite Investasi. Investor: - Pengendalian struktur permodalan; - Pembatasan penerbitan utang dan ekuitas; dan - Penetapan proyek-proyek yang akan dibiayai.	- Kinerja perusahaan - Tanggung jawab sosial dan lingkungan - Pengelolaan risiko
Shareholders and Investors	Influence and Dependency	Shareholders: - Approval of business plans, corporate actions, and organizational structure; - Appointment of BoD members; - Determination of governance structures; - Representation through membership in the BoC; and - Influence in the financing decision-making by the Investment Committee. Investors: - Controlling of capital structure; - Limit-setting of debt and equity issuances; and - Determination of projects eligible for financing.	- Company performance - Social and environmental responsibility - Risk management
Karyawan	Pengaruh, Ketergantungan, dan Kewajiban	<i>Team Building</i> per Divisi dan per Direktorat (frekuensi tidak ditetapkan namun anggaran per tahun terbatas); <i>Team Building</i> di tingkat Perseroan (1x setahun); <i>Town Hall Meeting</i> (sesuai kebutuhan); - Sosialisasi prosedur operasional dan induksi terhadap karyawan (sesuai kebutuhan); - Acara-acara penting Perseroan, seperti <i>Investor Gathering</i>, <i>Pencatatan Obligasi</i>, dsb. (sesuai kebutuhan); - Acara Tutup Tahun (1x setahun); - Acara-acara penting karyawan, seperti pernikahan, kelahiran, sakit, meninggal, promosi, dsb. (sesuai kebutuhan).	- Pengembangan karier dan kompetensi - Remunerasi dan kesejahteraan - Perbaikan kinerja operasional Perseroan - Fasilitas kerja - Kesehatan dan keselamatan kerja
Employees	Influence, Dependency, and Responsibility	- Team Building at each Division and each Directorate (frequency undetermined with predefined annual budget); - Team Building at Company-wide level (once a year); - Town Hall Meeting (as needed); - Socialization of operational and induction procedures to employees (as needed); - Significant Corporate Events, such as investor Gathering, Bonds Listings, etc. (as needed); - Year-End event (once a year); - Employees' important events or situations, such as marriage, birth, sickness, death, promotion, etc. (as needed).	- Career and competency development - Remuneration and welfare - Improvement of the Company's operational performance - Work facilities - Occupational Health and Safety

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Stakeholders' Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods & Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Anggota Legislatif Terkait	Pengaruh dan Ketergantungan	- Melakukan koordinasi dan identifikasi proyek infrastruktur di pusat dan daerah; - Menghadiri <i>market sounding</i>/sosialisasi oleh pemerintah pusat/daerah; - Menghadiri dan memberikan <i>input</i> pada event Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI); - Berpartisipasi dalam berbagai acara Kementerian Keuangan; - Menjadi anggota dalam <i>Sustainable Finance Task Force</i> OJK.	- Pembangunan infrastruktur - Perkembangan kemajuan proyek - Kendala yang dihadapi proyek - Pencapaian target SDGs dan NDCs
Central Government, Regional Government, and related Members of the Legislative Branch	Influence and Dependency	- Infrastructure project coordination and identification at the central or regional governments; - Attendance in market sounding/dissemination events organized by central/regional government; - Attendance and provide input in Indonesian Renewable Energy Society (IRES) events; - Participation in the events of the Ministry of Finance; - Become a member of OJK's Sustainable Finance Task Force.	- Infrastructure development - Project progress - Constraints faced by project - Achievement of SDGs and NDCs targets
Klien dan Sponsor/ Pemrakarsa Proyek, serta Pemangku Kepentingan Terkait	Pengaruh dan Ketergantungan	Klien/Sponsor/Pemrakarsa Proyek: - Kesediaan untuk dibiayai oleh IIF; - Kepatuhan terhadap perjanjian yang diatur oleh IIF dalam kesepakatan pinjaman (terkait hal-hal finansial, pelaporan, dan S&E); - Penetapan harga (suku bunga, biaya, dan semua hal komersial lainnya); - Kerja sama dalam penyediaan data; - Pemantauan perkembangan proyek dan penerapan aspek sosial dan lingkungan (sebagaimana diperlukan); - Tinjauan secara berkala atas proyek-proyek yang dibiayai (kunjungan rutin ke proyek); - Koordinasi atau konsultasi terkait proyek infrastruktur yang berlangsung (sebagaimana diperlukan). Pemangku Kepentingan Terkait: - Kesediaan untuk membangun/mengerjakan proyek berdasarkan standar S&E yang diatur oleh IIF; - Kesediaan untuk patuh pada perjanjian yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait (misalnya, perusahaan EPC, konsultan kerekayasaan/teknis, dll.).	- Produk dan jasa - Pelayanan Konsultasi - Rate/suku bunga pinjaman - Proses dan durasi dalam pemberian keputusan - Persyaratan kredit - Kepatuhan terhadap standar S&E IIF
Project Sponsors/ Proponents, and Associated Stakeholders	Influence and Dependency	Clients/Project Sponsors/Proponents: - Willingness to be financed by IIF; - Compliance with the covenants set by IIF in the loan agreements (financial, reporting and S&E covenants); - Price-setting (interest rates, fees and all commercial matters); - Cooperation in providing data; - Monitoring of project development and implementation of social and environmental aspects (as needed); - Periodic reviews of financed projects i.e. routine site visit; - Coordination or consultation on ongoing infrastructure projects (as needed). Associated Stakeholders: - Willingness to develop/construct projects according to S&E standard as set by IIF; - Willingness to comply with the covenants relevant to the associated stakeholders (e.g. EPC companies, engineering/technical consultants, etc.).	- Products and services - Advisory Service - Interest rates on loans - Process and duration of decision making - Credit terms - Compliance with IIF S&E standards

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Stakeholders' Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods & Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Vendor	Pengaruh dan Ketergantungan	IIF menggunakan jasa konsultan profesional untuk melakukan analisis kesenjangan, memberikan saran tentang dokumen yang dihasilkan oleh proyek, atau menawarkan saran profesional mengenai masalah yang lebih kompleks, dan/atau apabila informasi yang diberikan perusahaan proyek tidak cukup untuk menentukan sejauh mana klien mematuhi kebijakan IIF. Konsultan eksternal dipakai berdasarkan kasus per kasus. IIF mengarahkan dan mengawasi pekerjaan para konsultan untuk memenuhi praktik terbaik S&E berdasarkan SEP. Kontraktor dan Mitra Kerja: • Pengaturan hubungan hak dan kewajiban masing-masing melalui kontrak kerja sama; • Koordinasi dan supervisi mengenai proyek infrastruktur, secara rutin sesuai dengan rencana kerja selama masa kontrak kerja sama. Asosiasi di Bidang Infrastruktur: • Partisipasi pada acara yang diselenggarakan oleh asosiasi-asosiasi yang berfokus pada pengembangan Infrastruktur Indonesia; • Inisiatif <i>knowledge sharing</i> sebagai bentuk partisipasi aktif IIF dengan mitra kerja proyek infrastruktur.	• Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan • Seleksi dan evaluasi kandidat mitra bisnis yang objektif • Prosedur administrasi yang mudah dan akurat • Pembayaran produk dan jasa tepat waktu • Hubungan saling menguntungkan • <i>Independent review</i> dan/atau laporan yang berkualitas
Vendor	Influence and Dependency	IIF employs professional consultants' services to conduct gap analysis, provides advice on documents delivered by the projects, or offers professional advice on more complex issues and/or in the event the information provided by the project company is inadequate to determine the extent to which the clients can comply with IIF's policies. External consultants are employed on a case-by-case basis. IIF directs and supervises the work of these consultants to meet the S&E best practices under the SEP. Contractors and Work Partners • Arrangement on respective rights and obligations through a cooperation agreement; • Coordination and supervision on infrastructure projects, routinely according to the work plan during the period of cooperation agreement. Associations Engaging in the Field of Infrastructure • Participation in events organized by associations focusing on the national infrastructure development; • Knowledge sharing initiatives as a form of active participation of IIF with its work partners in infrastructure projects.	• Transparent process of procurement of goods and services • Objective selection and evaluation of business partners • Easy and accurate administrative procedures • Timely payment of products and services • Mutually beneficial relationship • Independent review and/or quality report

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Stakeholders' Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods & Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Masyarakat	Pengaruh dan Ketergantungan	- Pada praktiknya IIF tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat dan hubungan dengan masyarakat lebih banyak dikelola melalui proyek; - Proses diskusi dengan masyarakat seringkali dilakukan oleh IIF pada saat melakukan uji tuntas untuk mengonfirmasi beberapa hal terkait pengelolaan aspek sosial di lokasi proyek; - Beberapa proyek yang dibiayai IIF yang bersinggungan langsung dengan kelompok masyarakat adat akan dikelola sesuai dengan standar yang tertuang pada SEMS sepanjang periode pembiayaan; - Masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui <i>Grievance Redress Mechanism (GRM)</i> yang tersedia di website IIF dan juga di level proyek. Mekanisme ini spesifik dan dapat diakses oleh publik di seluruh wilayah di mana terdapat investasi IIF, dalam format dan bahasa yang mudah dimengerti.	- Program-program pengembangan masyarakat - Penanganan keluhan - Pengelolaan kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat di proyek - Kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
Public	Influence and Dependency	- In practice, IIF is not directly related to the public as it is managed through the projects; - IIF often has discussions with the affected community during the due diligence process to clarify matters pertaining to the management of social aspects at the project site; - Some of the projects financed by IIF that have direct contact with indigenous peoples will be managed throughout the financing period in accordance with SEMS standards; - The public at large can submit complaints through the Grievance Redress Mechanism (GRM) that is made available on IIF official website and directly to the projects. This mechanism is specific and can be accessed by the public in all areas where IIF investments are available, in a format and language that is easily understood.	- Community development programs - Complaint handling - Management of public health, safety and security in the project - Contributions to education, health and the economy
Media Massa	Pengaruh dan Ketergantungan	- Perseroan melibatkan media massa untuk setiap peristiwa penting yang berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Media massa secara formal diundang ke acara tersebut untuk meliput langsung. Demi terjaganya akurasi dan aktualnya berita, IIF membuat rilis resmi untuk menjadi acuan media massa dalam menerbitkan berita; - Media massa dilibatkan melalui badan agensi agar berita terkait Perseroan aktual dan efektif mencapai target pembaca; - Jenis media massa yang terlibat dalam operasi Perseroan, mayoritas merupakan media daring yang terafiliasi dengan media cetak, dan umumnya dalam bidang bisnis dan ekonomi	- Kinerja perseroan - Informasi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang didukung
Mass Media	Influence and Dependency	- The Company engages the mass media for every significant event related to external stakeholders. The media are formally invited to each event so to cover the event directly. To maintain accuracy and actuality of the news, IIF prepares an official press release as a reference for the media in publishing the news; - The media are involved through an agency so that Company-related news are actual and can reach the target readers effectively; - The media involved in the Company's operations are mostly online media affiliated with print media, with a majority of them covering business and the economy.	- Company performance - Project-related information

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

[OJK F.1]

Sebagai perusahaan yang mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan, IIF telah membangun budaya keberlanjutan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini telah dilakukan IIF sejak pertama kali berdiri pada 2010. IIF secara rutin mengadakan sesi *sharing* internal kepada karyawan dalam rangka mengembangkan kapasitas karyawan antar divisi secara berkelanjutan. Sedangkan untuk eksternal, IIF berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait keberlanjutan melalui kegiatan-kegiatan webinar.

Kegiatan-kegiatan *Sharing Session Internal* pada 2022

Internal Sharing Sessions in 2022

Waktu Time	Topik Topics	Penyelenggara Organizer
27 Januari 2022 January 27, 2022	The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry	OJK Institute
27 Januari 2022 January 27, 2022	Benda & Warisan Budaya	IIF & Ikatan Ahli Arekologi Indonesia (IAAI)
14 Februari 2022 February 14, 2022	Webinar: Mapping ESG integration in public infrastructure finance in the Asia Pacific	Sergiu George Jiduc
16 Maret 2022 March 16, 2022	Café Talk: Land Acquisition	IIF & WBG
6 Juni 2022 June 6, 2022	ESG Discussion: Integrating ESG Into Business Process	Maverick
8 Juni 2022 June 8, 2022	Penerapan ESG di Pasar Modal Indonesia	IIF & IDX
27 Juni 2022 June 27, 2022	ESG Fundamentals	CRMS
29 Juni 2022 June 29, 2022	ESG Trends and Economic Outlook	Indonesia Eximbank
8 Juli 2022 July 8, 2022	Internal Audit Role in Preparing ESG Reports	Institute of Internal Auditors
11 Agustus 2022 August 11, 2022	Introduction to Port Business in Indonesia	IIF & Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI)
24 Agustus 2022 August 24, 2022	ESG Manual Training	MoF
31 Agustus 2022 August 31, 2022	Enhancing your ESG Reporting	IDX & PWC
31 Agustus 2022 August 31, 2022	ESG Bond	BNP Paribas
4 November 2022 November 4, 2022	Macro Economic Outlook	IIF & Bank Mandiri

BUILDING SUSTAINABILITY CULTURE [OJK F.1]

As a company that prioritizes sustainability principles, IIF has built a culture of sustainability among its employees and other stakeholders. IIF has made this its custom since it was first established in 2010. IIF routinely holds internal sharing sessions for employees in order to develop their competence across all divisions sustainably. Meanwhile, externally, IIF plays an active role in disseminating sustainability to the general public through webinar activities.

Kegiatan-kegiatan Sosialisasi Keberlanjutan kepada Eksternal pada 2022

Sustainability Dissemination Activities to Externals in 2022

Waktu Time	Topik Topics	Penyelenggara Organizer
23 Februari 2022 February 23, 2022	<i>Green Economy Outlook 2022</i> : Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan <i>Green Economy</i>	IIF & Bisnis Indonesia
6 Maret 2022 March 6, 2022	Social & Environmental Management System	IIF & BeFa
12 April 2022 April 12, 2022	The Financing of Net Zero Transition in Emerging Markets	EU-ASEAN Business Council
22 April 2022 April 22, 2022	Urun Rembuh "Manusia & Lingkungan": Memacu Investasi Hijau di Indonesia	Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM
11 Mei 2022 May 11, 2022	Learning Series Environmental & Social Framework: Hydropower Projects, Indigenous Peoples, & Benefit Sharing	WBG
9 Juni 2022 June 9, 2022	Penerapan ESG di Pasar Modal Indonesia	IIF & IDX
11 Juni 2022 June 11, 2022	Spearheading Initiatives to Closing the Subnational Disparities Gap	G20 Infrastructure Working Group
23 Juni 2022 June 23, 2022	Creating Sustainable Investment Portfolios	Environmental Finance
8 Juli 2022 July 8, 2022	Transit Oriented Development	MRT Jakarta
14 Juli 2022 July 14, 2022	Instruments & Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia	IIF & SMI
2 September 2022 September 2, 2022	Originating & Appraising Renewable Energy Projects	G20 Indonesia & IRENA
13 Oktober 2022 October 13, 2022	Infrastructure Development through Innovation & Collaborative Financing	G20 Indonesia
14 Oktober 2022 October 14, 2022	Financing Sustainable Infrastructure	OECD
19 Oktober 2022 October 19, 2022	Sharing Session on Sustainability Bond Framework & Issuance Process to OJK	IIF & OJK
20 Oktober 2022 October 20, 2022	BNP Paribas Sustainable Future Forum	BNP Paribas
27 Oktober 2022 October 27, 2022	Strengthening Public & Private Collaboration for Better Infrastructure	Kantor Bersama KPBU RI
8 November 2022 November 8, 2022	Pemulihan Pasca Pandemi	Universitas Indonesia
15 November 2022 November 15, 2022	ESG Framework & Manual Launching	IIF & MoF

KEPATUHAN HUKUM DAN REGULASI

[GRI 2-27]

IIF berupaya mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku terkait kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk mematuhi aspek sosial dan lingkungan sesuai dengan Prinsip S&E. Selama tahun 2022, IIF tidak memiliki kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi sehingga tidak mendapatkan sanksi apapun, baik sanksi finansial maupun non-finansial.

LEGAL AND REGULATORY COMPLIANCE

[GRI 2-27]

IIF strives to comply with all applicable rules and regulations related to infrastructure project financing, including complying with social and environmental aspects in accordance with S&E Principles. During 2022, IIF did not encounter any violations or non-compliance with laws and regulations, so no financial or non-financial sanctions were given to IIF.



Kinerja Operasional

Operational Performance



Memberikan Manfaat Ekonomi dari Kinerja Operasional

Providing the Economic Benefits from Operations



Dengan strategi bisnis yang tepat dan manajemen risiko yang efektif, serta tingkat kesehatan keuangan Perseroan yang senantiasa terjaga, IIF mampu menavigasikan sejumlah tantangan perekonomian sehingga dapat mempertahankan pertumbuhan yang kuat secara *top line* dan *bottom line* di mana IIF mencatatkan *healthy double-digit growth* selama tahun 2022.

With the right business strategy, effective risk management, and sustained financial health, IIF was able to navigate through the many economic challenges to deliver strong growth in its top and bottom lines as the Company recorded healthy double-digit growths on both fronts during 2022.



Pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat esensial untuk dilaksanakan di Indonesia, mengingat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memberikan tantangan besar dalam hal perhubungan dan logistik bagi rakyatnya sejak dulu. Pembangunan infrastruktur telah dimasifkan dengan cakupan yang meliputi seluruh pulau di Indonesia, untuk bisa mengatasi hambatan perhubungan dan masalah logistik yang dirasakan masyarakat Indonesia.

Indonesia pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai Rp384,8 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp363,8 triliun, atau 94,5% dari target APBN, yang diarahkan untuk mendukung penguatan pelayanan dasar dan peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Kementerian Keuangan RI pada Desember 2022 melaporkan realisasi pembiayaan investasi hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun, terutama pada pembiayaan investasi untuk klaster infrastruktur. Hal ini dapat dicapai berkat pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi yang berjalan lebih lancar, sejalan dengan menguatnya ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina.

Infrastructure development is an essential part of nation-building that Indonesia, as a large archipelago state, has to carry out to help its people overcome the decades-long challenges in transportation and logistics. Indonesia has, in recent years, developed Infrastructure massively across its many islands to overcome transportation barriers and logistical problems experienced by the Indonesian people.

In 2022, Indonesia allocated an infrastructure budget of Rp384.8 trillion and realized Rp363.8 trillion, or 94.5% of the country's APBN target, to improve basic services and increase productivity through connectivity and mobility infrastructure. The Indonesian Ministry of Finance, in December 2022 report, said that the realized investment financing until December 14, 2022, reached Rp82.05 trillion, especially in investment financing for the infrastructure cluster. This was achieved thanks to the nation's smothering post-pandemic economic recovery as the economy kept moving on a growth trajectory amidst the global economic slowdown and uncertainty prolonged by the Russia-Ukraine war.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga semakin bergairah seiring diselenggarakannya Presidensi G20. Indonesia memperoleh komitmen pendanaan infrastruktur berkualitas dari negara-negara G7 melalui kegiatan ini dengan skema *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) sebesar USD600 miliar dan skema bilateral AS-Indonesia, *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebesar USD20 miliar.

Infrastructure development in Indonesia became even more vibrant after the convention of the G20 Presidency. In this event, Indonesia obtained a funding commitment for quality infrastructure from G7 countries under the USD600 billion Global Infrastructure and Investment (PGII) scheme and the US-Indonesia USD20 billion bilateral Just Energy Transition Partnership (JETP) scheme.

IIF Jadi Tuan Rumah ESG Framework and Manual

IIF Hosts ESG Framework and Manual



Dikenal aktif dalam pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, IIF ditunjuk menjadi tuan rumah peluncuran *ESG Framework and Manual* Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu). *Framework dan manual* ini merupakan pedoman yang mencakup prinsip-prinsip, risiko dan mekanisme pengimplementasian faktor ESG dalam pembiayaan infrastruktur, dengan mengoptimalkan fungsi *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kemenkeu melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penunjukan IIF oleh Kemenkeu menjadi tuan rumah adalah bukti nyata atas kredibilitas IIF pada ranah pembiayaan di sektor infrastruktur berbasis ESG. Sebagai suatu organisasi yang selalu berpegang teguh kepada prinsip keberlanjutan, IIF telah berperan besar dalam penyusunan kerangka kerja ESG, dan berkesempatan untuk menyebarkan pentingnya kerangka kerja ESG dalam memastikan keberlanjutan dari tiap investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dengan diluncurkannya *framework* ini, diharapkan seluruh proyek KPBU di bawah Kemenkeu telah dinilai layak dari segi ESG. Salah satu bentuk nyata bahwa komitmen ini telah diimplementasikan ke dalam proyek-proyek IIF, maka pada acara tersebut dilakukan pula penandatanganan *Head of Agreement* antara IIF dan AP I di mana IIF rencananya akan memberikan *ESG Advisory* terhadap 15 bandara yang beroperasi di bawah AP I.

Known for its active role in financing sustainable development, IIF was appointed as the host of the launch of the Indonesian Ministry of Finance's *ESG Framework and Manual*. This framework and manual are guidelines that cover the principles, risks, and mechanisms for implementing ESG factors in infrastructure financing by optimizing the *Special Mission Vehicle* (SMV) function under the Ministry of Finance through the Public Private Partnership (PPP) scheme.

The appointment of IIF by the Ministry of Finance to host is clear evidence of IIF's credibility in ESG-based infrastructure financing. As an organization that always adheres to the principle of sustainability, IIF has played a significant role in preparing the ESG framework and has, on many occasions, disseminated the importance of the ESG framework in ensuring the sustainability of every investment in infrastructure development in Indonesia.

With the launch of this framework, IIF hopes that all PPP projects under the Ministry of Finance will become feasible from an ESG perspective. As a concrete form that this commitment has been implemented into IIF projects, the event also marked the signing of a *Head of Agreement* between IIF and AP I, where IIF will be assigned to provide *ESG Advisory* to 15 airports operating under AP I.

Sebagai perusahaan yang didirikan atas prakarsa dan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia, IIF berada di jalur yang tepat dalam menjadi katalisator dalam akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat.

Seluruh komitmen, kebijakan, dan strategi yang diterapkan tentunya memperhitungkan risiko yang melekat dengan *business as usual* yang dijalankan. Dengan strategi bisnis yang tepat dan manajemen risiko yang efektif, serta tingkat kesehatan keuangan Perseroan senantiasa terjaga, IIF mampu menavigasikan sejumlah tantangan perekonomian sehingga dapat mempertahankan pertumbuhan yang kuat secara *top line* dan *bottom line* di mana IIF mencatatkan *healthy double-digit growth* selama tahun 2022.

KINERJA DAN PEMBIAYAAN PORTOFOLIO

IIF berhasil meraih pendapatan dan pertumbuhan bisnis yang positif pada tahun 2022. IIF mencatat pendapatan sebesar Rp1.168 miliar, naik 21% dari tahun lalu sebesar Rp967 miliar, sehingga IIF berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 56,49%. IIF juga berhasil menandatangani 10 kontrak baru senilai Rp1,7 triliun komitmen investasi di tahun 2022. Dengan realisasi komitmen baru pada 2022, aset IIF yang tercatat berjumlah Rp14,82 triliun.

Per 31 Desember 2022, IIF memiliki 56 proyek yang sebagian besar berasal dari portofolio pembiayaan di sektor ketenagalistrikan, infrastruktur transportasi, dan telekomunikasi. Dalam praktiknya, IIF berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan yang setara kepada seluruh klien serta menjelaskan bagaimana produk yang dibuat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. [OJK F.17]

Kinerja Portofolio dan Pembiayaan [OJK F.2][OJK F.3] Portfolio and Financing Performance

Keterangan	Hasil (Rp miliar) Results (Rp billion)			Target 2022 (Rp miliar) Target 2022 (Rp billion)	Pencapaian 2022 Achievement (%)	Description
	2020	2021	2022			
Komitmen investasi bersih	14.098	17.079	16.678	22.009	75,78%	Net investment commitments
Aset investasi	11.445	12.209	14.820	15.872	93,37%	Investment Asset
Pendapatan	915	967	1.168	1.166	100,24%	Revenue
Laba bersih	43	53	83	62	133,13%	Net Income
Nilai komitmen untuk proyek terkait keuangan berkelanjutan	14.098	17.079	16.678	22.009	75,78%	Commitments in Sustainable Finance-related projects
Aset investasi dalam proyek terkait keuangan berkelanjutan	11.445	12.209	14.820	15.872	93,37%	Investment assets in Sustainable Finance-related projects

* termasuk pendapatan forex

* Include forex income

As a company founded on the initiative of the Government of the Republic of Indonesia, IIF is on the right track to becoming a catalyst for accelerating infrastructure development in Indonesia in that it gives sustainable economic benefits to the community.

IIF worked all of its commitments, policies, and strategies with due consideration of the risks inherent in the business as usual. With the right business strategy, effective risk management, and sustained financial health, IIF was able to navigate through the many economic challenges to deliver strong growth in its top and bottom lines as the Company recorded healthy double-digit growths on both fronts during 2022.

PORTFOLIO AND FINANCING PERFORMANCE

IIF succeeded in generating positive revenue and delivering strong business growth in 2022. IIF recorded an total revenue of Rp1,168 billion, an increase of 21% from last year's Rp967 billion, to record an 56.49% growth in net income. IIF also signed 10 new contracts worth Rp1.7 trillion investment commitments in 2022. With the realization of new commitments in 2022, IIF recorded a total asset of Rp14.82 trillion.

As of December 31, 2022, IIF had a total of 56 projects, dominated by financing portfolios in the electricity, transportation infrastructure, and telecommunications sectors. In practice, IIF is committed to providing equal products and services to all clients and explains how the products are tailored to the different needs of its clients.

[OJK F.17]

Kinerja Layanan Advisory**Summary of Advisory Performance**

Keterangan	Hasil Results			Description
	2020	2021	2022	
Jumlah mandat yang aktif (proyek)	9	13	11	Number of active mandates (projects)
Pendapatan (Rp miliar)	9,39	8,86	16,14	Revenues (Rp billion)
Jumlah mandat aktif yang terkait keuangan berkelanjutan (proyek)	8	13	10	Number of sustainable finance-related active mandates (projects)
Pendapatan dari mandat aktif yang terkait keuangan berkelanjutan (Rp miliar)	9,39	8,86	14,19	Revenue from sustainability finance-related active mandates (Rp billion)
Proporsi pendapatan dari proyek terkait keuangan berkelanjutan	100%	100%	88%	Proportion of revenues from sustainable finance-related projects

Komitmen Bersih Portofolio Investasi**Investment Portfolio Commitment (Net)**

Keterangan	Hasil (Rp miliar) Results (Rp billion)			Target 2022 (Rp miliar) Target 2022 (Rp billion)	Pencapaian 2022 Achievement (%)	Description
	2020	2021	2022			
Jalan	3.235	2.491	1.899	3.073	62%	Road
Telekomunikasi dan informatika	1.967	3.886	3.548	3.865	92%	Telecommunications and informatics
Air minum	1.574	1.504	1.255	1.843	68%	Water
Minyak dan gas	572	2.082	1.898	2.855	66%	Oil and gas
Ketenagalistrikan	3.573	4.018	3.971	4.946	80%	Electricity
Bandara	1.208	1.185	1.181	1.521	78%	Airport
Pelabuhan	667	417	702	411	171%	Seaport
Kereta api dan transportasi publik	—	238	211	235	89%	Railway and public transportation
Kawasan industri	500	477	733	727	101%	Industrial estate
Infrastruktur pertanian	—	—	—	—	0%	Agriculture infrastructure
Infrastruktur sosial	—	101	101	700	14%	Social infrastructure
Lainnya	802	680	1.180	1.829	65%	Other infrastructure
Jumlah	14.098	17.079	16.678	22.009	76%	Total

MITIGASI DAMPAK PRODUK/JASA**[OJK F.27][OJK F.28]**

Sesuai dengan persyaratan pedoman IIF (IIF OM SEMS 2019), IIF melakukan uji tuntas sosial dan lingkungan (SEDD) pada semua proyek yang didanai untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan proyek. Uji tuntas juga mencakup penilaian terhadap kemampuan proyek untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang teridentifikasi. SEDD membagi proyek menjadi beberapa kategori risiko: Kategori A (risiko tinggi), B (risiko sedang) dan C (risiko rendah), yang mengacu pada klasifikasi S&E SEMS.

SEDD yang dilakukan oleh IIF, dilaksanakan secara independen oleh *internal safeguards expert* IIF secara mandiri atau dengan bantuan konsultan S&E untuk mengevaluasi proyek yang diusulkan dan menentukan mitigasi dan perlindungan yang sesuai. Hasil SEDD dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam prinsip-prinsip S&E. Hasil analisis manual ini kemudian mengarah pada serangkaian tindakan mitigasi yang disebut rencana tindakan korektif (CAP).

PRODUCT/SERVICE IMPACT MITIGATION**[OJK F.27][OJK F.28]**

Pursuant to its guideline requirements (IIF OM SEMS 2019), IIF does social and environmental due diligence (SEDD) on all projects it finances to identify potential social and environmental risks and impacts associated with project activities. The due diligence includes assessing the project's ability to address identified social and environmental issues. SEDD divides projects into several risk categories: Categories A (high risk), B (moderate risk), and C (low risk), refer to the SEMS S&E classification.

IIF conducts the SEDD solely through its internal safeguards expert, who does the assignments either independently or with the assistance of an S&E consultant to evaluate any proposed project and determine appropriate mitigation and safeguards. SEDD results are then analyzed to identify gaps in S&E principles. The results of this manual analysis will lead to a series of mitigation actions called corrective action plans (CAP).

IIF Raih Berbagai Penghargaan Berbasis ESG

IIF Wins Various ESG-Based Awards



Selama tahun 2022, IIF mendapat berbagai penghargaan berbasis ESG atas kontribusinya dalam mendukung kegiatan-kegiatan usaha berkelanjutan. Pada awal tahun, IIF terpilih sebagai *Best Sustainability Bond for Non-Banking Financial Institution* dalam ajang The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country and Regional Awards 2021.

Tidak hanya itu, IIF kembali meraih empat penghargaan sekaligus untuk kategori model bisnis dan transaksi-transaksi yang dilakukan sepanjang tahun 2022 yaitu *Project Finance House of the Year*, *Digital Infrastructure Deal of the Year*, *Transport Deal of the Year*, dan *Water Deal of the Year* dalam ajang The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Asset Publishing and Research Ltd, sebuah perusahaan multimedia yang berbasis di Hong Kong yang menghubungkan akses ke para pelaku bisnis keuangan terkemuka.

Penghargaan *Digital Infrastructure Deal of the Year* diberikan atas pembiayaan proyek data center pertama IIF yang berlokasi di Jababeka dengan mengusung konsep *green building*. Sementara untuk penghargaan kategori *Transportation Deal of the Year* merupakan pembiayaan IIF dalam proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama di Indonesia untuk pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Sedangkan *Water Deal of the Year* diberikan kepada IIF atas pembiayaan sistem penyediaan air minum untuk 61.000 sambungan rumah tangga di 7 kecamatan dan 31 kelurahan di wilayah Pekanbaru, Riau.

During 2022, IIF received several ESG-based awards for contributing to sustainable business operations. At the beginning of the year, IIF was named the Best Sustainability Bond for Non-Banking Financial Institutions at The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country and Regional Awards 2021.

IIF simultaneously garnered another four awards for the category of business models and transactions carried out throughout 2022, namely Project Finance House of the Year, Digital Infrastructure Deal of the Year, Transport Deal of the Year, and Water Deal of the Year at The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2022 organized by Asset Publishing and Research Ltd, a Hong Kong-based multimedia company that connects access to leading financial businesses.

IIF has been crowned the Digital Infrastructure Deal of the Year award for financing its first data center project in Jababeka with a green building concept. Meanwhile, the Transportation Deal of the Year award is IIF's financing for the first Government Business Entity Cooperation (PPP) project in Indonesia for the construction of the Makassar-Parepare railway line. Meanwhile, the Water Deal of the Year was awarded to IIF for financing the drinking water supply system for 61,000 households in 7 sub-districts and 31 urban villages in Pekanbaru, Riau.

CAP menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian antara IIF dan debitur, di mana IIF mewajibkan debitur untuk mengikuti dan mengamati pelaksanaan CAP sesuai dengan standar IIF.

Pada tahun 2022, tidak ada produk/layanan yang ditarik karena tidak terkait dengan sifat layanan keuangan IIF. Pada akhir periode pelaporan, IIF tidak melakukan survei kepuasan pelanggan atas produk dan layanan yang ditawarkannya. [OJK F.29][OJK F.30]

TANGGUNG JAWAB UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK/JASA YANG BERKELANJUTAN

IIF memiliki prinsip agar selalu menyediakan produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah atau calon nasabah, telah melewati seluruh persyaratan untuk menerima pembiayaan berkelanjutan. Dengan kata lain, mematuhi prinsip-prinsip S&E. Hal ini termasuk perhatian khusus terhadap aspek keselamatan, pencegahan polusi, dan inklusi sosial.

Sebagai komitmen lebih jauh, dalam mendukung pengembangan energi terbarukan, IIF terus membiayai proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) dalam portofolio usahanya, seperti Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sumatera Utara, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sulawesi, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*Geothermal*) (PLTP) di Jawa Barat dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Aceh.

Selain itu, IIF juga membiayai proyek-proyek baru seperti proyek infrastruktur transportasi Jalur kereta api Makassar-Parepare ke Sulawesi, proyek infrastruktur kesehatan lewat pembangunan gedung rumah sakit baru di Tangerang dan Bekasi, serta proyek infrastruktur digital dasar lewat pengembangan pusat data *hyperscale* di Jawa Barat. Proyek-proyek ini merupakan bentuk komitmen IIF untuk memperluas portofolio industrinya.

Highlights Pembiayaan IIF untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2022, IIF terus melanjutkan dan mengembangkan diversifikasi pendanaan di berbagai sektor, seperti yang dirangkum di bawah ini:

CAP is part of the settlement agreement between IIF and its debtors, whereby IIF requires the debtor to follow and observe the implementation of CAP in accordance with IIF standards.

In 2022, none of IIF's products/services was withdrawn for not being related to the nature of IIF's financial services. At the end of the reporting period, IIF did not conduct customer satisfaction surveys for its products and services. [OJK F.29][OJK F.30]

RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABLE PRODUCT/SERVICE DEVELOPMENT

IIF upholds its principle to ensure that the products and services it has offered to customers or prospective customers have met all the requirements to receive sustainable financing. In other words, they do adhere to the S&E principles. This includes special attention to safety, pollution prevention, and social inclusion.

As a further commitment, in its business portfolio where it supports the development of renewable energy, IIF continues to provide financing facilities to new and renewable energy (NRE) power plants projects, such as the Hydroelectric Power Project in North Sumatra, the Solar Power Plant in Gorontalo and East Nusa Tenggara, Wind Power Plant in Sulawesi, Micro Hydro Power Plant in West Java, North Sumatra, North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, Geothermal Power Plant in West Java and a Biomass Power Plant in Aceh.

In addition, IIF is also financing new projects such as the Makassar-Parepare railway line to Sulawesi project, health infrastructure projects through the construction of new hospital buildings in Tangerang and Bekasi, and Basic digital infrastructure project through the development of a hyperscale data center in West Java. These projects form IIF's commitment to expanding its industrial portfolio.

Highlights of IIF Financing for Sustainable Development

In 2022, IIF continued and developed funding diversification in various sectors, as summarized below:

Satelit Nusantara I: Kontribusi Berkelanjutan terhadap Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi [OJK F.26]

Satelit Nusantara I: Sustainable Contribution to Telecommunication Infrastructure Development



photo by: Dewi S. Widyaningrum

Indonesia Infrastructure Finance terus mendukung sektor infrastruktur telekomunikasi melalui kesepakatan pembiayaan kembali (*refinancing*) proyek Satelit Nusantara I. Kesepakatan *refinancing* ini ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2022 di kantor PT PSN Enam Indonesia. Penandatanganan ini antara PSN 6 dengan PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Ketiga institusi keuangan tersebut secara resmi ditunjuk oleh PSN 6 sebagai *Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners*.

Kesepakatan ini merupakan kontribusi berkelanjutan IIF terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Sejak IIF masuk dalam sektor infrastruktur telekomunikasi, IIF terus mendukung sektor ini di berbagai segmen seperti *backbone* serat optik (Palapa Ring), penyedia layanan internet, penyedia menara telekomunikasi, operator telekomunikasi, dan pusat data.

Satelit Nusantara I merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi *High Throughput Satellite* (HTS) yang akan memberikan layanan internet *broadband* dengan kapasitas jauh lebih besar dibandingkan dengan satelit konvensional yang ada saat ini. Area cakupan dari satelit ini menjangkau seluruh pelosok Indonesia sehingga mampu memperluas dan menjangkau internet di wilayah Indonesia Timur. Satelit ini juga sebagai salah satu upaya pemerataan akses internet hingga ke desa-desa dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Satelit Nusantara I adalah satelit komunikasi *geostationary* (GEO) Indonesia yang dimiliki oleh Pasifik Satelit Nusantara yang telah dikembangkan sejak tahun 2017 dan berhasil diluncurkan ke jalur orbit dari Kennedy Space Center di Orlando, AS dan beroperasi penuh sejak Oktober 2019. Satelit ini adalah kelanjutan dari upaya Indonesia menyatukan rakyatnya lewat komunikasi, melalui Satelit Palapa I pada tahun 1976. Satelit dianggap sebagai jawaban dari sulitnya medan Indonesia yang berupa kepulauan dalam mewujudkan kemudahan berkomunikasi.

Indonesia Infrastructure Finance continues to support the telecommunications infrastructure sector through refinancing agreement with the Nusantara I Satellite project. This agreement was signed on June 29, 2022, at the PT PSN Enam Indonesia office. This signing was between PSN 6, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Central Asia Tbk, and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). The three financial institutions were officially appointed by PSN 6 as the Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners.

This agreement is IIF's sustainable contribution to telecommunication infrastructure development in Indonesia. Since first tapping this sector, IIF has supported its various segments, such as fiber optic backbone (Palapa Ring), internet service providers, telecommunication tower providers, telecommunication operators, and data centers.

Nusantara I is the first satellite in Indonesia to use High Throughput Satellite (HTS) technology that provides broadband internet services with a much larger capacity than currently used conventional satellites. The coverage area of this satellite reaches all corners of Indonesia and broadens the reach of the internet in Eastern Indonesia. This satellite is also one of the efforts to distribute internet access to more remote villages and is expected to increase national economic growth.

Nusantara I is an Indonesian geostationary communication satellite (GEO) owned and developed by Pasifik Satelit Nusantara in 2017. It was launched into orbit from the Kennedy Space Center in Orlando, USA, and was fully in operation in October 2019. This satellite is Indonesia's sustained effort to unite its people through communication since the first Palapa I Satellite in 1976. It has answered all the difficulties in facilitating telecommunication across the scattered islands of Indonesia.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo melalui Pelabuhan Anggrek

Increasing Gorontalo's Economic Growth through Anggrek Seaport



photo by: Yayan Indriatmoko

IIF mendukung proyek pembangunan pelabuhan lewat skema program Public Private Partnership (PPP) di Desa Illangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pelabuhan ini sebenarnya telah beroperasi sejak tahun 1997, dan terletak sekitar 65 km dari pusat kota Gorontalo. Saat ini, pelabuhan tersebut berfungsi sebagai tempat pusat bongkar muat barang domestik dan internasional dari jalur laut.

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Anggrek melalui pengembangan beberapa fasilitas baru, termasuk perluasan area pelabuhan dalam dua tahap proyek. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, dan pemerataan tingkat ekonomi di wilayah Sulawesi.

Uji Tuntas Lingkungan Sosial IIF mengklasifikasikan proyek ini sebagai proyek Kategori B dengan dampak sosial dan lingkungan yang dapat dikelola dengan menerapkan Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF. Kontribusi keuangan ini merupakan bagian dari dukungan berkelanjutan IIF untuk pengembangan infrastruktur sektor pelabuhan di Indonesia.

IIF supports seaport development projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme in Illangata Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency, Gorontalo Province. The seaport has been in operation since 1997 and is located about 65 km from downtown Gorontalo. Currently, the seaport serves as a maritime center for the loading and unloading domestic and international goods.

The main objective of this project is to increase the capacity of Anggrek Seaport through the development of several new facilities, including the two-phase expansion of the port area. The project aims to increase economic growth in Gorontalo Province, and equalize economic levels in the Sulawesi region.

IIF's Social Environmental Due Diligence classifies this project as a Category B project with manageable social and environmental impacts through the application of IIF's Social and Environmental Principles. This financial contribution is part of IIF's ongoing support for developing seaport sector infrastructure in Indonesia.

Solusi Pemanfaatan Tandan Buah Kosong untuk PLTBM

Solutions for Utilizing Empty Fruit Bunches for PLTBM



photo by: Yayan Indriatmoko

Pada bulan November 2022, IIF melakukan perubahan struktur fasilitas pinjaman untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa 1×12 MW yang awalnya ditandatangani pada November 2019. Selain itu, terdapat perubahan pada lokasi proyek yang saat ini berada sekitar 3,5 km dari lokasi proyek sebelumnya dan semakin mendekat ke arah gardu induk yang ditentukan.

Sehubungan dengan perubahan lokasi tersebut, dilakukan uji tuntas sosial dan lingkungan kembali pada September 2021 untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang baru. Uji tuntas tersebut menghasilkan rencana tindakan korektif sosial dan lingkungan baru dan menyimpulkan bahwa proyek masih dikategorikan sebagai Proyek Kategori B di mana risiko dan dampak S&E termasuk dalam tingkat medium.

Proyek ini akan memanfaatkan Tandan Buah Kosong (TBK) dari pabrik kelapa sawit untuk menghasilkan energi bersih dan membantu meningkatkan pasokan listrik di kawasan Aceh Tamiang. TBK sebelumnya dibakar dengan menggunakan insinerator sebagai langkah akhir pembuangan. Namun, pada tahun 2016, penggunaan insinerator tidak lagi diperbolehkan dan mengakibatkan adanya penumpukan TBK. Beberapa pabrik mencoba memanfaatkan TBK sebagai pupuk tambahan, namun tingkat penggunaan TBK sebagai pupuk tidak sebanding dengan TBK yang dihasilkan. Oleh karena itu, proyek PLTBM ini memberikan solusi untuk mengatasi tantangan pembuangan akhir TBK.

In November 2022, IIF changed the structure of its loan facility for the 1×12 MW Biomass Power Plant, a project initially signed in November 2019. In addition, the project was also relocated to a different site about 3.5 km away from the previous project location to bring it closer to the designated substation.

Further social and environmental due diligence was conducted in September 2021 to identify new potential social and environmental risks and impacts in relation to the change in location. The due diligence resulted in a new social and environmental risk corrective action plan. It concluded that the project remained under the B Project category, wherein the S&E pathway is included at the medium level.

This project will use Empty Fruit Bunches (TBK) from palm oil mills to produce clean energy and help increase the electricity supply in the Aceh Tamiang area. In the previous method, TBK would be burned using an incinerator as the final disposal step. However, in 2016, incinerators were no longer allowed, and this new regulation resulted in an excessive pile of TBK. Some factories tried to use TBK as additional fertilizer, but TBK produced outgrew the TBK used. Therefore, this PLTBM project gives the best solution to overcoming the challenge of the excessive pile at the final disposal of TBK.



Kinerja Lingkungan

Environmental Performance



Mewujudkan Operasional yang Ramah Lingkungan

Realizing Environmentally Friendly Operations



Perlindungan lingkungan merupakan hal yang bukan lagi menjadi isu biasa di seluruh dunia. IIF bukan hanya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan tapi juga bertanggung jawab serta adaptif atas komitmen ini pada semua proyek infrastruktur yang didanainya demi mencapai tujuan dalam hal pengelolaan lingkungan sesuai dengan prinsip S&E.

Environmental safeguard has developed into something more than just a common global issue. Not only does IIF have a strong commitment to environmental safeguard, but it also is responsible and adaptive to this commitment in all of its portfolio infrastructure projects in order to achieve objectives in terms of environmental management in accordance with S&E principles.



Kegiatan operasional IIF secara umum tidak bersentuhan secara langsung dengan lingkungan, tetapi IIF tetap bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibiayai agar melaksanakan operasional yang ramah lingkungan. IIF meyakini bahwa aspek lingkungan menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan keseimbangan bisnis yang akan berdampak pada keberlanjutan usaha.

Salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab IIF dalam perlindungan lingkungan, IIF menerapkan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip S&E. Prinsip S&E menekankan bagaimana proyek dibangun dan dikelola dengan memerhatikan aspek lingkungan, seperti pencegahan perubahan iklim akibat emisi dan polusi, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam.

Pada tahun 2022, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF memiliki kontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan, seperti transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT), penyerapan karbon dan pengurangan emisi, serta penyediaan air bersih.

In general, IIF's operational activities do not have direct contact with the environment. However, IIF still fulfills its responsibility for the projects it finances so that they always run environmentally friendly operations. IIF believes that environmental aspects are one of the keys to striking a balance to a more sustainable business.

As a form of IIF's commitment and responsibility to environmental safeguard, IIF implements a financing mechanism integrated with S&E principles. The S&E principles emphasize how projects should be built and managed with attention to environmental aspects, such as preventing climate change due to emissions and pollution, biodiversity, and managing natural resources.

In 2022, infrastructure projects financed by IIF contributed to improving environmental quality, such as the energy transition to New and Renewable Energy (NRE), carbon sequestration and emission reduction, and clean water supply.

Pasokan Air ke Masyarakat

Water Supply to Communities

Wilayah	Jumlah Kapasitas (m³) Total Capacity (m³)			Area
	2020	2021	2022	
Jawa Timur	5.000	5.000	5.000	East Java
Lampung	825	825	825	Lampung
Banten	4.750	4.750	1.250	Banten
DKI Jakarta	10.200	10.200	10.200	DKI Jakarta
Riau	–	750	750	Riau
Jumlah	20.775	21.525	18.025	Total

Wilayah	Jumlah Pengguna (Rumah Tangga) Total Users (Household)			Area
	2020	2021	2022	
Jawa Timur	500.000	500.000	500.000	East Java
Lampung	60.000	60.000	60.000	Lampung
Banten	262.768	262.768	62.768	Banten
DKI Jakarta	435.777	435.777	435.777	DKI Jakarta
Riau	-	61.000	61.000	Riau
Jumlah	1.258.545	1.319.545	1.119.545	Total

Kontribusi IIF terhadap Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

IIF's Contribution to the Regional Energy General Plan (RUED)

Wilayah Area	Renewable Energy Types	Total Kapasitas Total Capacity (MW)			Total Regional Produced Target (MW)-RUED	% Kontribusi IIF untuk RUED di 2022 % IIF Contribution to RUED in 2022
		2020	2021	2022		
Sumatera Utara North Sumatra	PLTA	180	180	180	4.935	4,01
	PLTMH	18	18	18		
Sumatera Barat West Sumatra	PLTHM	10	10	10	1.244	0,80
Aceh	PLTBM	12	12	12	2.530	0,47
Sulawesi Utara North Sulawesi	PLTMH	–	4	4	371	0,94
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	PLTMH	21	31	31	1.546	1,69
Sulawesi Selatan South Sulawesi	PLTB	70	70	70	2.411	2,90
Gorontalo	Panel Surya Solar Panel	2	2	2	97	2,06
Jawa Barat West Java	PLTMH	7	7	7	8.767	2,67
	PLTP	227	227	227		
Jawa Timur East Java	PLTP	110	110	110	4.230	2,60
Total		657	671	671	26.131	2,56

PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air | Hydroelectric Power Plant
 PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | Mini Hydro Power Plant
 PLTBM : Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa | Biomass Powerplant
 PLTB : Pembangkit Listrik Tenaga Bayu | Wind Power Plant
 PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | Geothermal Power Plant

Pengurangan Karbon dari Proyek Energi Baru Terbarukan [GRI 305-5] Carbon Reduction from New and Renewable Energy Project [GRI 305-5]

Wilayah Region	Renewable Energy Types	Pengurangan Emisi Emission Reduction (ton CO ₂ -eq)			Total Pelanggan yang Dilayani Number of People Served	
		2020	2021	2022	Rumah Tangga Household	Perorangan Person
Sumatra Utara North Sumatra	PLTA	420.066	456.019	425.292	160.551	802.755
	PLTMH	36.300	42.955	44.210	18.000	90.000
Sumatra Barat West Sumatra	PLTHM	9.125	19.168	19.508	10.000	50.000
Aceh	PLTBM	25.337	25.337	25.337	12.000	60.000
Sulawesi Utara North Sulawesi	PLTMH	—	7.270	7.270	3.500	17.500
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	PLTMH	33.886	60.236	49.009	26.100	130.500
Sulawesi Selatan South Sulawesi	PLTB	66.731	61.680	48.706	70.000	350.000
Gorontalo	Panel Surya Solar Panel	940	871	816	2.000	10.000
Jawa Barat West Java	PLTMH	12.810	14.971	18.345	7.400	37.000
	PLTP	413.674	644.455	650.011	151.099	755.495
Jawa Timur East Java	PLTP	301.130	301.130	301.130	110.000	550.000
Total		1.319.999	1.634.093	1.589.633	570.650	2.853.250

PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air | Hydroelectric Power Plant
 PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | Mini Hydro Power Plant
 PLTBM : Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa | Biomass Powerplant
 PLTB : Pembangkit Listrik Tenaga Bayu | Wind Power Plant
 PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | Geothermal Power Plant

Catatan | Notes:

Terdapat restatement dari perhitungan pengurangan karbon proyek energi terbarukan, yang saat ini menggunakan metode Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
 There is a restatement of the calculation of carbon reduction of renewable energy projects, which currently uses the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) method.

ENERGI DAN EMISI

Energi dan emisi merupakan satu kesatuan dalam operasional sebuah perusahaan. Meski tidak menghasilkan energi dan emisi secara signifikan karena sifat bisnis Perseroan yang merupakan perusahaan jasa, IIF tetap berupaya menggunakan energi secara optimal dan seefisien mungkin di seluruh kegiatan operasionalnya. IIF juga mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan penghematan energi yang berdampak pada penurunan emisi. Upaya ini dievaluasi secara berkala oleh divisi-divisi terkait yang berkoordinasi langsung dengan Direksi. [GRI 3-3]

Dalam menjalankan kegiatan operasional, sumber energi kantor pusat berasal dari energi fosil, yaitu listrik yang dibeli dari PLN dan bahan bakar minyak (BBM). Perseroan belum menggunakan energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk operasional karena sumber energi untuk kantor pusat disediakan dan dikelola langsung oleh pengelola gedung. [GRI 3-3]

Energi listrik digunakan untuk penerangan dan elektronik, kemudian dihitung dengan mengakumulasi jumlah pemakaian listrik dalam kWh yang tertera pada tagihan listrik bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Sedangkan konsumsi BBM yang diakumulasi dari total biaya pembelian BBM dikonversikan ke dalam liter. [GRI 3-3] [GRI 302-1]

ENERGY AND EMISSIONS

Energy and emissions are an integral part of a company's operations. While as a service provider, it never uses a significant amount of energy or produces a significant amount of emission, IIF, to the greatest extent possible, makes every effort to pursue optimum and efficient energy consumption in its entire operations. IIF is also developing various initiatives to increase energy savings and reduce emissions. This energy-saving measure is evaluated regularly by related divisions under direct coordination with the Board of Directors. [GRI 3-3]

In running its operations, IIF uses fossil energy at its head office or from the electricity utility company and fuel oil (BBM) for office cars. The company has not used energy from New and Renewable Energy (NRE) for operations because the energy source for the head office is managed and supplied by the office landlord. [GRI 3-3]

Electrical energy is used for lighting and electronics, then calculated by accumulating the amount of electricity used in kWh charged on the electricity bill from January to December 2022. Meanwhile, the accumulated fuel consumption of the total cost of purchasing fuel is measured by the liter of gasoline consumed. [GRI 3-3][GRI 302-1]

Konsumsi Energi

Pada tahun 2022, total konsumsi energi Perseroan dari listrik dan BBM adalah sebesar 1.719 GJ. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya karena peningkatan jumlah karyawan dan peningkatan rasio *Work from Office* (WFO) di banding dengan tahun sebelumnya. Namun, untuk energi BBM yang berasal dari bensin mengalami penurunan 1.882 liter karena sebagian besar rapat koordinasi bisa dilakukan secara daring. Sedangkan intensitas energi yang dihitung dari total konsumsi energi bahan bakar dan listrik dengan denominator jumlah karyawan adalah 14,10 GJ/karyawan.

Energy Consumption

In 2022, the Company consumed total energy, electricity, and fuel of 1,719 GJ. This figure increased from the previous year due to an increase in the number of employees and the *Work from Office* (WFO) ratio compared to last year. However, IIF recorded a decrease of 1,882 liters in fuel consumption since most of the coordination meetings were held virtually. Meanwhile, the energy intensity calculated from the total energy consumption of fuel and electricity with the denominator number of employees reached 14.10 GJ/employee.

Tren Konsumsi Energi Perseroan [OJK F.6][GRI 302-1] Company Energy Consumption Trend

Energi	Satuan Unit	2020	2021	2022	Perubahan Changes	Energi
BBM	Liter Litre	15.936	15.625	13.743	-1.882	Fuel
	GJ	594	583	513	-70	
Listrik	kWh	217.645	216.263	335.129	+118.866	Electricity
	GJ	784	779	1.206	+427	
Total Penggunaan Listrik dan BBM	GJ	1.378	1.362	1.719	+357	Total Electricity and Fuel Consumption

Keterangan | Notes:

- Konsumsi bahan bakar dalam liter dihitung berdasarkan jumlah bahan bakar yang dibeli (Rp) dibagi dengan harga bahan bakar per liter (asumsi 1 liter = Rp9.000)
Fuel consumption in litres is calculated based on the amount of fuel purchased (Rp) divided by the price of fuel per litre (assume 1 litre = Rp9,000)
1 liter = 10,36 kWh | 1 litre = 10,36 kWh
- Penggunaan listrik kWh diperoleh berdasarkan pengukuran tagihan listrik kWh gedung kantor IIF
kWh electricity usage is obtained based on the IIF office building kWh electricity bill measurement
- Konsumsi listrik dikonversi dari kWh ke Gigajoule menggunakan *Greenhouse Gas Protocol Initiatives* (2005), di mana 1 kWh = 3.600.000 Joule = 0,0036 GJ
Electricity consumption is converted from kWh to Gigajoules using the *Greenhouse Gas Protocol Initiatives* (2005), where 1 kWh = 3,600,000 Joule = 0,0036 GJ

Rasio Intensitas Energi per Karyawan [OJK F.6][GRI 302-3] Energy Intensity Ratio per Employees

Tahun Year	Total Energi (GJ) Total Energy (GJ)	Jumlah Karyawan Total Employees	GJ/Karyawan GJ/Employee
2020	1.378	106	13,00
2021	1.361	116	11,74
2022	1.719	122	14,10

Rasio Intensitas Energi Listrik per Luas Area Kantor [OJK F.6][GRI 302-3] Energy Intensity Ratio per Office Area

Tahun Year	Total Konsumsi Listrik (GJ) Total Electricity Consumption (GJ)	Luas Area Kantor (m ²) Office Area (m ²)	GJ/m ²
2020	784	2.600	0,30
2021	779	2.600	0,30
2022	1.206	2.600	0,46

Selain menghitung konsumsi energi, IIF juga menghitung dan mencatat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari energi BBM (Cakupan 1) dan energi listrik yang dibeli dari PLN (Cakupan 2) pada operasional Perseroan. Perhitungan emisi dari energi BBM mengacu pada *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* (2006). Sedangkan perhitungan emisi dari energi listrik menggunakan Faktor Emisi (FE) GRK Sistem Interkoneksi Tenaga Listrik Tahun 2019 Jakarta (ESDM, 2019).

Besides energy consumption, IIF also calculates and records Greenhouse Gas (GHG) (Scope 1) and electricity purchased from PLN (Scope 2) in its operations. The calculation of emissions from fuel energy usage refers to the *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* (2006). Meanwhile, emissions from electrical energy are calculated using the 2019 Jakarta Electricity Interconnection System GHG Emission Factor (EF) (ESDM, 2019).

Melihat sifat bisnis yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, IIF tidak memperhitungkan emisi non-CO₂ sebagai emisi bahan perusak ozon (Ozon Depleting Substance–ODS). [GRI 305-6][GRI 305-7]

Given the nature of its business as a financial services provider, IIF does not calculate non-CO₂ emissions as emissions of ozone-depleting substances (ODS). [GRI 305-6][GRI 305-7]

Total Emisi GRK yang Dihasilkan (ton CO₂-eq) (Cakupan 1 dan 2) [OJK F.11][GRI 305-1][GRI 305-2] Total GHG Emissions Generated (ton CO₂-eq) (Scope 1 and 2)

Sumber Emisi	2020	2021	2022	Source of Emission
BBM (Cakupan 1)	33,04	32,40	28,50	Fossil Fuel (Scope 1)
Listrik (Cakupan 2)	189,35	188,15	291,53	Electricity (Scope 2)
Jumlah	222,39	220,55	320,03	Total

Catatan | Notes:

- Perhitungan Emisi Konsumsi Listrik (Cakupan 2) menggunakan Faktor Emisi (FE) GRK Sistem Interkoneksi Tenaga Listrik Tahun 2019 Jakarta (ESDM, 2019); FE (ex-Post) 0,87 ton CO₂/MWH Electricity Consumption Emissions (Scope 2) is calculated the GHG Emission Factor (FE) of the 2019 Jakarta Electric Power Interconnection System (ESDM, 2019); FE (ex-Post) 0,87 ton CO₂/MWH
- Perhitungan Emisi Konsumsi BBM (Cakupan 1) mengacu pada IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006) dengan rincian sebagai berikut:
The calculation of BBM Consumption Emissions (Scope 1) refers to the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006) with the following details:

Jenis Type	Faktor Konversi (kg/TJ) Conversion Factor (kg/TJ)	Berat Jenis (ton/L) Density (ton/L)	Net Calorific Value (TJ/ton)
BBM Fossil Fuel	69.300	0,00068	0,044

Rasio Intensitas Emisi per Karyawan [OJK F.11][GRI 305-4] Emission Intensity Ratio per Employees

Tahun Year	Total Emisi (ton CO ₂ -eq) Total Emission (ton CO ₂ -eq)	Jumlah Karyawan Total Employees	ton CO ₂ -eq/Karyawan ton CO ₂ -eq/Employee
2020	222,39	106	2,10
2021	220,55	116	1,90
2022	320,03	122	2,62

Catatan | Notes:

- Total emisi yang digunakan dalam perhitungan adalah kombinasi emisi BBM (Cakupan 1) dan listrik (Cakupan 2)
Total emission used in the calculation is a combination of fuel (Scope 1) and electricity (Scope 2) emission

Rasio Intensitas Emisi per Luas Area Kantor [OJK F.11][GRI 305-4] Emission Intensity Ratio per Office Area

Tahun Year	Total Konsumsi Listrik Total Electricity Consumption (ton CO ₂ -eq)	Luas Area Kantor (m ²) Office Area (m ²)	ton CO ₂ -eq/m ²
2020	189,35	2.600	0,073
2021	188,15	2.600	0,072
2022	291,53	2.600	0,112

Catatan | Notes:

- Total emisi yang digunakan dalam perhitungan adalah kombinasi emisi BBM (Cakupan 1) dan listrik (Cakupan 2)
Total emission used in the calculation is a combination of fuel (Scope 1) and electricity (Scope 2) emission

Tren Konsumsi Energi dan Emisi [OJK F.7][OJK F.12][GRI 302-4][GRI 302-5][GRI 305-5] Trends of Energy Consumption and Emissions

Tahun Year	Tren Konsumsi Energi (GJ) Trends of Energy Consumption (GJ)	Tren Emisi Trends of Emissions (ton CO ₂ -eq)
2020	-484	-56,81
2021	-16	-1,84
2022	+357	+99,48

Konsumsi Energi dan Emisi Proyek

Selain menghitung energi yang digunakan untuk operasional Perseroan, IIF juga mulai melakukan upaya untuk mencatat konsumsi energi dan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek yang dibiayai. Sesuai dengan Prinsip S&E Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim, IIF telah mewajibkan setiap proyek yang dibiayai untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan

Project Energy Consumption and Emissions

In addition to calculating the energy used for the Company's operations, IIF has also initiated efforts to record energy consumption and emissions resulting from the projects it finances. In accordance with the S&E Principles of Prevention and Reduction of Pollution and Climate Change, IIF has required all projects financed to increase efficiency in energy, water, and other resource consumption so that

sumber daya lainnya dengan tujuan melestarikan sumber bahan baku, serta mewajibkan klien untuk menghitung emisi dari setiap aktivitas proyek dengan menggunakan IIF GHG Tools dan melaporkan hasil perhitungannya setiap tahun kepada IIF sebagai bagian dari Laporan Perlindungan Sosial dan Pemantauan Lingkungan.

IIF telah menetapkan ambang batas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 25.000 ton CO₂-eq per tahun untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pengurangan emisi proyek yang dibiayai IIF. Apabila ambang batas tidak terpenuhi, maka klien harus menyiapkan langkah-langkah pengurangan emisi GRK yang kemudian dipantau oleh IIF. Pada tahun 2022, IIF mencoba mengambil sampel perhitungan konsumsi energi dan emisi dari tiga sektor di tiga lokasi proyek.

Konsumsi Energi dan Emisi Proyek 2022

Project Energy Consumption and Emissions in 2022

Sektor Sector	Sampel Proyek Project Sample	Lokasi Location	Konsumsi Listrik Electricity Consumption (MWh)	Emisi Cakupan 1 Emission Scope 1 (ton CO ₂ -eq)	Emisi Cakupan 2 Emission Scope 2 (ton CO ₂ -eq)	Total Emisi Total Emission (ton CO ₂ -eq)
Air Minum Drinking Water	Processed Drinking Water	Sumatera	2.017,6	11,7	1.769	1.781
Telekomunikasi dan Informatika Telecommunication and Informatics	Telecommunication Network Provider	Jawa Java	384	0,42	1.094,5	1.094,9
Lainnya Others	Multi Infrastructure Projects	Sulawesi	133,4	185,6	4.516,8	4.702,4

PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH

IIF selalu berupaya untuk menggunakan sumber daya air secara efisien dan mengelola limbah sesuai dengan praktik pengelolaan limbah perkantoran. Pada tahun 2022, IIF menggunakan air dari PDAM yang disediakan pengelola gedung sehingga pengelolaan air ditangani langsung pengelola gedung. Mengingat penggunaan air terintegrasi dalam fasilitas sewa gedung, IIF tidak melakukan perhitungan volume air yang ditarik, dibuang, dan dikonsumsi. [\[OJK F.8\]\[GRI 303-1\]\[GRI 303-2\]\[GRI 303-3\]\[GRI 303-4\]\[GRI 303-5\]](#)

Dalam pengelolaan limbah, kegiatan usaha IIF yang bergerak di sektor jasa keuangan tidak menghasilkan limbah beracun dan berbahaya yang signifikan. IIF hanya menghasilkan limbah perkantoran seperti kertas, tinta bekas, plastik, dan sampah sisa makanan. Limbah perkantoran tersebut langsung dikelola oleh pengelola gedung untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan demikian, IIF tidak mengelola dan menghitung limbah atau efluen berskala industri.

Meskipun demikian, Perseroan tetap melakukan perhitungan pada penggunaan kertas yang dapat berdampak pada sampah kertas. IIF berupaya mengurangi penggunaan kertas dan menggunakan kertas daur ulang dalam kegiatan perkantoran. Pada 2022, penggunaan kertas Perseroan sebanyak 205 rim, naik dari tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan peningkatan rasio *Work from Office* (WFO).

each one of them can help conserve sources of raw materials and requires clients to calculate emissions from each project activity by using the IIF GHG Tools and reporting the calculation results annually to IIF as part of the Social Safeguard and Environmental Monitoring Report.

IIF has set a threshold for Green House Gas (GHG) emissions at 25,000 tons CO₂-eq per year to help raise awareness and reduce emissions of its financed projects. Upon failing to meet the threshold, the client must prepare GHG emission reduction measures which are then monitored by IIF. In 2022, IIF tried to take a sample calculation of energy consumption and emissions from three sectors in three project locations.

WATER AND WASTE MANAGEMENT

IIF always strives to use water resources efficiently and manage waste according to office waste management practices. In 2022, IIF used water from the local water utility company, meaning that water is supplied by the landlord. Given that water is part of the services provided by the landlord, IIF does not calculate the volume of water it pumps, consumes, and disposes of. [\[OJK F.8\]\[GRI 303-1\]\[GRI 303-2\]\[GRI 303-3\]\[GRI 303-4\]\[GRI 303-5\]](#)

In waste management, IIF's business activities in the financial services sector produce a significant amount of neither toxic nor hazardous waste. The only waste IIF produces is office waste, such as paper, used ink, plastic, and food leftovers. The landlord manages this office waste and takes it to the Final Disposal Site. This means that IIF does not manage and quantify industrial-scale waste or effluent.

Still, the Company does calculate how much paper it normally uses to see its environmental impacts. IIF is looking for ways to reduce paper use and use recycled paper in office activities. In 2022, the Company used 205 reams of paper, up from the previous year, due to an increase in the number of employees and the *Work from Office* (WFO) ratio.

Konsumsi Kertas [OJK F.4]**Paper Usage**

Tahun Year	Jumlah Penggunaan (Rim) Total Usage (Reams)	Perubahan (%) Changes (%)
2020	150	-79,87
2021	140	-6,67
2022	205	46,43

Konsumsi Toner/Tinta Printer [OJK F.4]**Toner/Ink Consumption**

Tahun Year	Jumlah Penggunaan (Rp) Total Usage (Rp)	Perubahan (%) Changes (%)
2020	46.118.268	-71,79
2021	38.506.148	-16,51
2022	51.955.523	34,93

IIF juga sudah menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan operasional, seperti galon air isi ulang dan kertas bekas untuk keperluan pencetakan internal dan draf kerja. IIF juga menghindari air kemasan sekali pakai untuk para tamu dan keperluan internal, dan menggantinya dengan botol air berbahan gelas yang dapat dikembalikan ke penjual. IIF juga menyediakan botol air (*tumbler*) yang dapat digunakan kembali untuk seluruh karyawan. [OJK F.5]

IIF has also started using recyclable and environmentally friendly materials in its operational activities, such as gallons of water refill and used paper for internal printing and work drafts. IIF has stopped using single-use bottled water for guests and internal use and replaced it with glass water bottles that can be returned to the seller for a refill. IIF also provides reusable water bottles (*tumblers*) for all employees. [OJK F.5]

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Operasional IIF dilakukan di kantor pusat di Jakarta, sehingga tidak ada operasi IIF yang berlokasi di dekat atau di dalam cagar alam yang dilindungi pemerintah atau kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu, kegiatan komersial IIF tidak berdampak langsung terhadap keanekaragaman hayati. [OJK F.9][GRI 304-1]

BIODIVERSITY

IIF is running operations at its head office in Jakarta, meaning that none of IIF's operations is located near or within government-protected nature reserves or areas of high biodiversity. Therefore, IIF's commercial activities do not have a direct impact on biodiversity. [OJK F.9][GRI 304-1]

Namun, IIF tetap memperhatikan aspek keanekaragaman hayati dari setiap proyek yang akan dibiayai maupun yang sedang berjalan. Konservasi keanekaragaman hayati merupakan aspek penting dari strategi keberlanjutan IIF, yang diwujudkan dalam Prinsip S&E, khususnya konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam. [GRI 3-3]

However, IIF continues to pay attention to the biodiversity aspect of each project currently underway or those in the pipeline. Biodiversity conservation is an important aspect of IIF's sustainability strategy, which is embodied in the S&E Principles, particularly biodiversity conservation and natural resource management. [GRI 3-3]

Perlindungan ini secara spesifik dipandu pada Prinsip S&E Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Untuk menghindari, meminimalkan dan mengelola dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati di wilayah proyek, salah satu aksi yang dilakukan oleh klien IIF adalah melakukan kajian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Penerapan S&E dan penentuan cakupan dan kedalaman kajian tergantung pada hasil Uji Tuntas Sosial Lingkungan (SEDD) yang dilakukan tim SED IIF pada semua proyek baru. [GRI 3-3]

These safeguards are specifically guided by the S&E Principles of Biodiversity Conservation and Natural Resource Management. To avoid, minimize and manage negative impacts on biodiversity in project areas, IIF clients make biodiversity and ecosystem service assessments. The application of S&E and determining the scope and depth of the assessment depend on the results of the Social Environmental Due Diligence (SEDD) that the IIF SED team does for all new projects. [GRI 3-3]

Pengelolaan Dampak dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) terhadap Keanekaragaman Hayati

Managing Biodiversity Impacts of Mini Hydro Power Plant (MHPP) Project

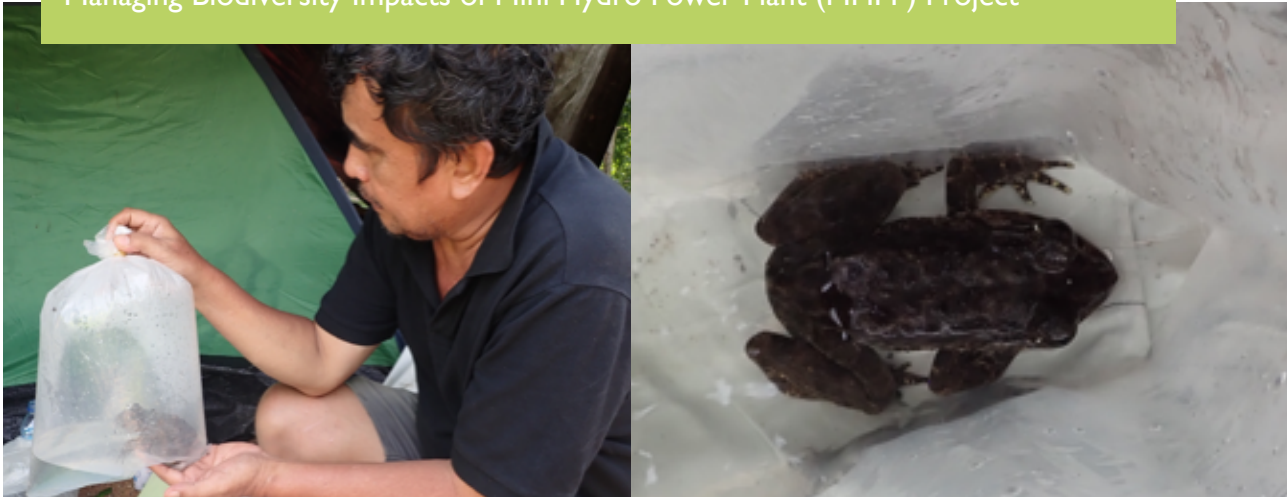


photo by: Dicka Andila Vebri

Pada tahun 2022, salah satu proyek PLTMH yang dibiayai oleh IIF yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah telah melakukan Studi Keanekaragaman Hayati sebagai bagian dari rencana tindakan perbaikan untuk mematuhi Prinsip S&E IIF No. 6 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Studi ini dilakukan dengan dukungan dari pakar universitas lokal dan pengawasan ketat dari IIF yang bekerja sama dengan World Bank Group. Studi ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak dari pembangunan dan operasi proyek terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di wilayah proyek. Secara umum, studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi habitat kritis dan alami di area proyek, mengkonfirmasi status spesies endemik dan dilindungi, mengembangkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, dan menyiapkan prosedur operasional standar untuk pembukaan lahan dan larangan perburuan satwa liar, baik di area lokasi proyek dan jalur transmisi.

In 2022, one of IIF's Mini Hydro Power Plant in Poso, Central Sulawesi conducted a Biodiversity Study as part of corrective action plan to comply with IIF S&E Principles No. 6 on Biodiversity Conservation and Natural Resources Management. The study was conducted with support from local university experts and close supervision from IIF in collaboration with World Bank Group. The study aims to avoid or minimize adverse impacts of project development and operations on biodiversity and natural resources in the project area. In general, the study is expected to elaborate identification of critical and natural habitats of the project, confirm the status of endemic and protected species, develop a biodiversity management plan, and prepare standard operational procedures for land clearing and prohibition of hunting of wildlife, both in the project site area and transmission lines.

Pada 2022, SED IIF melakukan SEDD yang mencakup aspek potensi dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan untuk beberapa proyek baru. Seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di Lampung dan Sumatera Utara, Kabel Bawah Laut Jakarta-Singapura, *Industrial Estate* di Subang, Pengelolaan Limbah di Kalimantan Timur, Sistem Penyediaan Air Bersih di Dumai, dan sebagainya. [OJK F.10]

Pada 2022, SED IIF juga membantu beberapa klien untuk melakukan kajian lebih detail serta menyusun *Biodiversity Action Plans* serta langkah-langkah mitigasi untuk pengelolaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Salah satu proyek IIF di sektor kelistrikan di Sulawesi Tengah melakukan kajian atas kondisi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di lingkungan proyek. OJK F.10]

Kajian dilakukan oleh tim ahli dari universitas lokal berdasarkan rekomendasi IIF yang tertulis pada Rencana Tindakan Perbaikan Sosial & Lingkungan yang disetujui di dalam Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan. Kajian tersebut nantinya akan memaparkan identifikasi atas *critical area*, area dilindungi, dan spesies terancam serta merekomendasikan mekanisme pengelolaan keanekaragaman hayati melalui *Biodiversity Action Plan*. Di Kalimantan Tengah, SED IIF juga membantu satu proyek pipa kondensat dan kilang mini untuk melakukan kajian detail terkait keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan serta menyusun *Biodiversity Action Plan*.

Setiap proyek yang dibiayai oleh IIF wajib untuk patuh terhadap peraturan nasional, salah satunya kewajiban rehabilitasi dan konservasi Kawasan hutan yang menjadi kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Guna memastikan kepatuhan masing-masing klien atas peraturan nasional tersebut maka IIF mewajibkan klien yang memiliki kewajiban rehabilitasi dan konservasi mengirimkan laporan rutin kepada IIF.

Salah satu contohnya adalah pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sulawesi Selatan. Burung dan kelelawar yang bertabrakan dengan turbin angin telah lama dianggap sebagai salah satu dampak lingkungan yang negatif dari turbin angin. Sebagai tindakan mitigasinya, klien IIF telah mengubah pencahayaan di sekitar turbin angin untuk mencegah burung, kelelawar, dan serangga mendekat. Klien juga memasang perangkat pendeteksi ekolokasi kelelawar untuk membantu menentukan jenis kelelawar yang sering mendekati turbin angin, sehingga klien dapat mengetahui kebiasaan kelelawar dan mengembangkan tindakan mitigasi lanjutannya.

Dengan strategi pengelolaan yang holistik, IIF dapat mendukung langkah yang diambil klien untuk mengadopsi praktik pengelolaan yang adaptif dalam pelaksanaan tindakan mitigasi, serta pengelolaan yang responsif terhadap perubahan kondisi dan hasil dari pemantauan selama siklus hidup proyek.

In 2022, IIF's SED did SEDD, which covered aspects of potential project impacts on biodiversity and environmental services for several new projects. Amongst the new projects were the Mini Hydro Power Plant in Lampung and North Sumatra, the Jakarta-Singapore Underwater Cable, an Industrial Estate in Subang, Waste Management in East Kalimantan, the Clean Water Supply System in Dumai. [OJK F.10]

In 2022, IIF's SED also assisted some clients in conducting more detailed studies and preparing Biodiversity Action Plans and mitigation measures for managing biodiversity and environmental services. One of IIF's projects in the electricity sector in Central Sulawesi made an assessment of the condition of biodiversity and ecosystem services in the project environment. [OJK F.10]

The study was conducted by a team of experts from a local university based on IIF recommendations as stated in the Social & Environmental Improvement Action Plan and to be approved in the Financing Facility Cooperation Agreement. The study will describe the identification of critical areas, protected areas, and threatened species and recommend mechanisms for managing biodiversity through the Biodiversity Action Plan. In Central Kalimantan, the SED also assisted a condensate pipeline project and a mini-refinery in conducting detailed studies on biodiversity and environmental services and developing a Biodiversity Action Plan.

IIF makes it mandatory for each project under its portfolio to comply with national regulations e.g., to rehabilitate and conserve forest areas which are the obligations of the holder of a Borrow-To-Use Permit for Forest Areas regulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry. In order to ensure the compliance of each client with these national regulations, IIF requires clients with rehabilitation and conservation obligations to send their regular reports.

One example is the Wind Power Plant project in South Sulawesi. Birds and bats' collision with wind turbines has long been considered one of this more eco-friendly type of power generator's negative environmental impacts. As a mitigation measure, IIF's client has changed the lighting around the wind turbines to keep birds, bats, and insects from flying nearby. The client also installs a bat echolocation detection device to help determine the type of bat that often flies near the wind turbine for the clients to learn their habits and develop further mitigation measures.

With a holistic management strategy, IIF can support its clients' measures to adopt adaptive management practices in implementing mitigation actions and run responsive management to changing conditions while monitoring results throughout the project life cycle.

PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN [GRI 2-27]

Pada tahun 2022, IIF tidak menerima pengaduan dari masyarakat tentang kejadian pencemaran lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan yang timbul langsung dari bisnis atau operasional kantor IIF.

Selain itu, IIF juga melacak dan mencatat pengaduan yang diterima oleh setiap proyek yang didanai IIF dari pihak eksternal, termasuk masyarakat. IIF juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa klien menyelesaikan keluhan yang diterima, termasuk melakukan investigasi, menentukan tindakan lanjutan yang diperlukan, dan mengkomunikasikan hasilnya. Pada tahun 2022, mayoritas keluhan yang tercatat terkait dengan keluhan terkait aspek sosial proyek.

ENVIRONMENTAL-RELATED COMPLAINTS [GRI 2-27]

In 2022, IIF did not have any complaints from the public regarding environmental pollution incidents and non-compliance with environmental regulations arising directly from IIF's business or office operations.

In addition, IIF also tracks and records complaints received by each IIF funded project from external parties, including the community. IIF also fulfills its responsibility to ensure that clients resolve complaints received, including making investigations, deciding follow-up actions, and communicating the results. By 2022, the majority of complaints recorded were on or related to the social aspects of projects.

IIF Berperan Aktif dalam Meningkatkan Pengetahuan terkait Sosial dan Lingkungan

IIF Plays an Active Role in Enhancing Social and Environmental Knowledge



Sebagai katalis pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, IIF secara aktif berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang perlindungan sosial dan lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022, IIF diundang sebagai pembicara dalam beberapa acara seperti Green Economy Outlook 2022 dan Webinar PSLH UGM. IIF juga menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia dengan menyediakan enam (6) sesi perkuliahan terkait *Social Safeguards* pada Program Indonesia Mengajar. Pada sesi perkuliahan tersebut, IIF memberikan wawasan tentang bagaimana aspek teoritis dalam ilmu sosial diterapkan ke dalam pengembangan proyek infrastruktur dan proses bisnis secara keseluruhan melalui penerapan *S&E Safeguards*.

As a catalyst of sustainable infrastructure financing in Indonesia, IIF actively contributes to raising awareness and knowledge on the social and environmental safeguards of infrastructure development. In 2022, IIF was invited as a speaker on several events such as the Green Economy Outlook 2022 and PSLH UGM Webinar. IIF also made a collaboration with University of Indonesia by providing a six (6) sessions of Social Safeguards lectures in the Indonesia Teaching Program for undergraduate student, Anthropology Department, Faculty of Social and Political Sciences. The lectures provide insight on how the theoretical aspect of social science is applied into the infrastructure project development and business process through the *S&E Safeguards* application.



Ketenagakerjaan

Employment



Meningkatkan Produktivitas, Memastikan Kesehatan dan Keselamatan

Increasing Productivity, Ensuring Health and Safety



Sumber daya manusia merupakan aset dan kunci penting bagi IIF untuk dapat terus maju dan berkembang di tengah-tengah tantangan industri yang semakin tinggi. Untuk itu, IIF berkomitmen dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas di bidangnya masing-masing.

Human resources are IIF's important asset and key to its ability to develop and progress amidst the industry's increasingly heavy challenges. For this reason, IIF is committed to developing a qualified and competent pool of human resources with strong integrity in their respective fields.



PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Perseoran menyadari pentingnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas di bidangnya masing-masing, seperti di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai aset penting dalam keberlanjutan Perseoran, khususnya dalam mencapai target bisnis dan menghasilkan produk serta layanan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat, IIF mengembangkan SDM dengan melaksanakan program-program yang mendukung karyawan dalam mengembangkan diri.

Demi mewujudkan tujuan dan cita-cita Perseroan tersebut, peran SDM tentulah sangat dibutuhkan. Maka, Perseroan memberikan prioritas pada program pengembangan SDM guna tercapainya kinerja keberlanjutan. Hal ini juga selaras dengan visi misi Perseroan dalam mengembangkan SDM yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas. **[GRI 3-3]**

LABOR PRACTICES

The Company recognizes the importance of having a qualified and competent Human Resources (HR) pool with strong integrity in their respective fields, such as the economic, social, and environmental fields. As an important asset that plays a key role in the Company's sustainability, especially in achieving business targets and producing sustainable products and services that benefit society, IIF develops human resources by running employee self-development programs.

In order to meet its stated goals and aspirations, the Company needs the role of HR. Therefore, the Company places a priority on HR development programs in order to achieve sustainable performance. This approach is consistent with the Company's vision and mission of developing quality, competent, and integrity human resources. **[GRI 3-3]**

Pada tahun 2022, Perseroan memfokuskan pengelolaan SDM pada peningkatan kesejahteraan karyawan khususnya penyesuaian dalam remunerasi dan manfaat, peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas terkait ESG, peningkatan *soft skill knowledge*, peningkatan *employee engagement*, dan proses otomatisasi untuk *employee on boarding* dan *exit & clearance*.

Adapun program pengembangan dan pengelolaan SDM tersebut berada di bawah tanggung jawab Divisi SDM. Tak hanya itu, Divisi SDM juga bertanggung jawab pada kegiatan SDM lainnya, seperti rekrutmen, remunerasi, kesejahteraan, dan penilaian kinerja SDM di lingkungan kerja IIF.

KEBIJAKAN SDM

Dalam perumusan kebijakan SDM, Perseroan memiliki tiga nilai inti yang juga dijadikan pedoman bagi seluruh karyawan. Diharapkan dengan adanya tiga nilai utama ini, semua karyawan bisa menerapkannya dengan baik di lingkungan kerja dan bidang kerjanya masing-masing, termasuk menjadi landasan karyawan saat berinteraksi dengan para mitra bisnis IIF.

Nilai Utama Kebijakan SDM Core Values of HR Policy

KOLABORASI Collaborate



IIF berkomitmen dalam menumbuhkan rasa kepercayaan, rasa hormat, komunikasi terbuka, pengakuan atas prestasi, pemahaman atas tujuan organisasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

IIF is committed to fostering trust, respect, open communication, recognition of achievements, understanding of organizational goals, and team work to achieve these goals.

KEUNGGULAN Superiority



IIF berkomitmen meningkatkan keunggulan, seperti ketelitian hingga ke hal-hal yang mendetail, tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan, akurat, mampu memenuhi harapan, mengedepankan sikap profesionalisme dalam pekerjaan, dan mampu memecahkan masalah.

IIF is committed to enhancing excellence, such as accuracy down to details, zero tolerance for mistakes, accuracy, ability to meet expectations, prioritizing work professionalism, and ability to solve problems

KOMITMEN TERHADAP BISNIS INFRASTRUKTUR Commitment to Infrastructure Business



IIF berkomitmen untuk menjadi pakar bisnis infrastruktur di Indonesia.

IIF is committed to becoming an expert in Indonesian infrastructure business.

In 2022, the Company focused its HR management on how to improve employee welfare, especially by making adjustments to employee remuneration and benefits, raising employee awareness, ability, and capacity on ESG, improving their soft skills knowledge, engaging them more in sustainability, and developing employee boarding and exit & clearance automation processes.

The HR division is responsible for the HR development and management program. The HR Division is also responsible for other HR activities, such as recruitment, remuneration, welfare, and HR performance appraisal in IIF's work environment.

HR POLICY

The Company builds its HR policies on three core values that offer guidelines to all employees. The hope is that all employees can live up to the values in their respective work environment and field of work and use them as the basis for employees when interacting with IIF's business partners.

Kinerja sebuah perusahaan tentu juga tak lepas dari pembinaan hubungan baik antara Perseroan dengan karyawannya. Untuk itu, dalam merangkul seluruh karyawan, IIF sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Perseroan selalu membuka kesempatan bagi seluruh SDM untuk bisa mengembangkan karier dan mendapat promosi tanpa memandang suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Sepanjang tahun 2022 ini, IIF tidak terdapat tindakan diskriminasi yang terjadi dalam lingkungan kerja di Perseroan.

[OJK F.18][GRI 406-1]

Selain prinsip kesetaraan, IIF juga tidak memperkerjakan anak di bawah umur dan kerja paksa. Hal ini adalah aksi nyata Perseroan dalam mengikuti aturan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 13 tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan yang melarang perusahaan mempekerjakan anak dan UU No. 19 tahun 1999 tentang Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa. Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan pemantauan ke seluruh proyek dan rantai pasokan yang tersebar di seluruh wilayah operasional di Indonesia yang berpotensi memperkerjakan anak dan mempraktikkan kerja paksa. Hal ini juga sejalan dengan 8 Prinsip S&E dalam mengurangi dampak dan risiko yang muncul karena masalah sosial dan lingkungan dari proyek infrastruktur yang dibiayai IIF. [OJK F.19][GRI 408-1][GRI 409-1]

IIF telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Peraturan Perusahaan IIF juga telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja No. 766/PP/L/X/35/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 31 Januari 2022. Peraturan Perusahaan IIF berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja.

DEMOGRAFI KARYAWAN [OJK C.3][GRI 2-7]

Hingga akhir tahun 2022, jumlah karyawan IIF sebanyak 122 karyawan di mana 53% diisi oleh karyawan perempuan. Hal ini merupakan wujud inklusivitas IIF dalam memberikan kesempatan kepada karyawan perempuan untuk berkarya di IIF.

Profil Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin Employee Profile based on Gender

Jenis Kelamin	Jumlah Total	Percentase Percentage	Gender
Laki-laki	62	51%	Male
Perempuan	60	49%	Female
Jumlah	122	100%	Total

The performance of any company depends mainly on how it builds relations with all its employees. Therefore, to make employees feel they are part of the Company, IIF embraces equality. The Company always gives its employees the opportunities to develop their careers and get promotions without prejudice to ethnicity, race, religion, and gender. Throughout 2022, there were no discriminatory acts in the Company's work environment. [OJK F.18][GRI 406-1]

In addition to the principle of equality, IIF never employs underage children, nor does it practice forced labor, reflecting the Company's real action in complying with government regulations contained in Law No.13 of 2003 Article 68 on Manpower which prohibits corporations from employing children and Law No. 19 of 1999 on the ILO Convention Regarding the Abolition of Forced Labor. The Company monitors all of its ongoing projects and supply chains across all operational areas in Indonesia, where children employment and forced labor practice tend to take place. This is also in line with the 8 S&E Principles in reducing the impacts and risks arising from social and environmental issues inherent in IIF infrastructure projects. [OJK F.19][GRI 408-1][GRI 409-1]

IIF already has Internal Regulations as required in Law No. 13 of 2003 on Manpower (Labor Law). IIF's Company Regulations have been ratified based on the Decree of the Head of the Jakarta Province Manpower and Transmigration Office, Head of Industrial Relations and Workers' Welfare Division No. 766/PP/L/X/35/2019 on the Ratification of Company Regulations dated January 31, 2022. IIF's Company Regulations are valid for 2 (two) years from the said date and approved by the Head of the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Service Office, Head of Industrial Relations and Workers' Welfare Division.

EMPLOYEE DEMOGRAPHY [OJK C.3][GRI 2-7]

By the end of 2022, IIF had a total of 122 headcounts, 53% of whom were female employees. This is a form of IIF's inclusivity in providing opportunities for female employees to work at IIF.

Profil Karyawan berdasarkan Jenjang Kepangkatan Employee Profile based on Rank Level

Jabatan	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Percentase Percentage	Position
Eksekutif	8	19	27	22%	Executive
Manajer Madya	20	17	37	30%	Mid Manager
Staf	32	26	58	48%	Staff
Jumlah	60	62	122	100%	Total

Profil Karyawan berdasarkan Status Ketenagakerjaan Employee Profile based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Percentase Percentage	Employment Status
Tetap	56	54	110	89%	Permanent
Kontrak	4	8	12	11%	Contract
Jumlah	60	62	122	100%	Total

Profil Karyawan berdasarkan Tipe Ketenagakerjaan Employee Profile based on Employment Type

Status Ketenagakerjaan	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Percentase Percentage	Employment Status
Full-time	60	62	122	100%	Full-time
Part-time	0	0	0	0%	Part-time
Jumlah	60	62	122	100%	Total

Profil Karyawan berdasarkan Kelompok Usia Employee Profile based on Age Group

Usia (Tahun)	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Percentase Percentage	Age (Years Old)
22–30	21	18	39	32%	22–30
31–40	21	23	44	36%	31–40
41–50	10	13	23	19%	41–50
51–55	8	8	16	13%	51–55
Jumlah	60	62	122	100%	Total

Profil Karyawan berdasarkan Pendidikan Employee Profile based on Education

Pendidikan	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Percentase Percentage	Education
Diploma	3	3	6	5%	Diploma
Sarjana	41	34	75	67%	Undergraduate
Master atau lebih tinggi	16	25	41	28%	Graduate or higher
Jumlah	60	62	122	100%	Total

Profil Pekerja Bukan Karyawan [GRI 2-8] Profile of Non-employee Workers

Pendidikan	Jumlah Total	Education
Outsourcing	18	Outsourcing
Part-time/Magang	13	Part-time/Volunteer
Jumlah	31	Total

REKRUTMEN

Semakin besar tuntutan aspek keberlanjutan dan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur mengharuskan Perseroan untuk merekrut tenaga profesional muda yang berkompeten dan memiliki kapabilitas dalam menghadapi kondisi industri terkini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan melakukan seleksi yang komprehensif pada tahap rekrutmen. Perseroan juga melibatkan masing-masing unit kerja untuk menilai tingkat kompetensi dan karakter para kandidat.

Adapun proses perekrutan karyawan IIF akan dimulai dari identifikasi kebutuhan karyawan, spesifikasi karyawan yang diharapkan, pelaksanaan proses perekrutan, hingga masa pelatihan pengenalan organisasi (*induction training*). Seluruh proses ini harus dilakukan oleh seluruh karyawan baru sebagai jaminan bagi Perseroan agar mendapat SDM yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam melakukan proses perekrutan karyawan, IIF berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial, hubungan politik, dan aspek lainnya yang rentan mengalami diskriminasi.

Keseluruhan proses perekrutan SDM ini dilakukan secara internal oleh IIF dan juga oleh pihak luar, seperti konsultan SDM dan organisasi yang secara independen melakukan analisis kebutuhan pegawai serta melaksanakan proses perekrutan pegawai tersebut. Sepanjang tahun 2022, IIF telah merekrut 20 karyawan laki-laki dan 12 karyawan perempuan dengan jumlah total karyawan mencapai 32 karyawan.

Profil Karyawan berdasarkan Kelompok Usia Employee Profile based on Age Group

Usia (Tahun)	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Age (Years Old)
22–30	7	6	13	22–30
31–40	5	12	17	31–40
41–50	0	0	0	41–50
51–55	0	2	2	51–55
Jumlah	12	20	32	Total

Catatan | Note:
Seluruh karyawan bekerja di Kantor Pusat IIF
All IIF employees work at the Head Office

Tak hanya fokus merekrut karyawan berkualitas dan berintegritas, Perseroan juga berupaya mempertahankan karyawan yang sudah berdedikasi pada perusahaan dengan memberikan berbagai fasilitas pendidikan, pelatihan, hingga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Meski demikian, Perseroan tidak berhak memaksa karyawan untuk terus bekerja di perusahaan.

Selama tahun 2022, terdapat 23 karyawan yang keluar dari perusahaan, sehingga tingkat *turnover* karyawan selama periode pelaporan adalah sebesar 19,3%.

RECRUITMENT

The increasingly rapid infrastructure development and stronger demand for sustainability have prompted the Company to recruit young professionals who are competent and capable of facing the latest development in the infrastructure financing industry. To meet this growing need, the Company conducts a comprehensive selection at the recruitment stage. The Company also involves each work unit to assess the competency level and character of the candidates.

At IIF, the employee recruitment process starts with identifying the current need for employees, determining what specifications are expected, running the recruitment process, and ends with providing a period of induction training. All new employees must undergo the entire recruitment process to ensure the Company hires only quality human resources with strong integrity.

In running the employee recruitment process, IIF is committed to providing equal opportunities to all prospective employees regardless of gender, ethnicity, race, religion, social status, political relations, and other aspects that are prone to discrimination.

IIF runs the entire HR recruitment process internally and with the help of external parties, such as independent HR consultants and organizations that do an employee needs analysis and carry out the recruitment process. Throughout 2022, IIF recruited 20 male and 12 female employees, totaling 32 new recruits in the year.

Not only does it focus on recruiting employees with quality and integrity, but the Company also seeks to retain its dedicated employees by providing various educational and training facilities to improve their welfare. However, the Company has no right whatsoever to ask the employees to keep working for the Company when they wish otherwise.

In 2022, 23 IIF employees resigned, so our employee turnover rate during the reporting period was 19.3%.

Demografi Karyawan yang Meninggalkan Perusahaan [GRI 401-1]**Demography of Employees who Resigned**

Usia (Tahun)	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Age (Years Old)
22–30	0	4	4	22–30
31–40	8	9	17	31–40
41–50	0	2	0	41–50
51–55	0	0	2	51–55
Jumlah	8	20	23	Total

Catatan | Note:
Seluruh karyawan bekerja di Kantor Pusat IIF
All IIF employees work at the Head Office

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Untuk dapat terus berkembang dan bersaing di tengah-tengah tantangan industri yang semakin tinggi dan dinamis, Perseroan menyadari perlunya gagasan-gagasan segar untuk berinovasi. Demi mewujudkannya, Perseroan perlu meningkatkan keahlian karyawan dalam melaksanakan kegiatan operasional melalui program pendidikan dan pelatihan. Mengingat dari waktu ke waktu, tugas yang harus dilaksanakan juga semakin meningkat dan beragam sesuai dengan tingkat kesulitan yang semakin lama juga semakin tinggi.

Sejalan dengan pengembangan kemampuan karyawan, peningkatan jenjang karier dan pengembangan SDM tak lepas dari upaya Perseroan untuk mempertahankan para karyawan yang ada. Oleh karena itu, Divisi SDM tidak hanya melakukan proses seleksi dan rekrutmen, tetapi juga menyediakan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi baik secara teknis maupun non-teknis. [GRI 3-3]

Adapun sebagai wujud nyata komitmen IIF di bidang pengembangan sumber daya manusia, IIF telah mendorong karyawannya untuk mengikuti program-program pelatihan untuk melengkapi SDM dengan kompetensi teknis, manajerial, *soft skill*, dan *leadership skill* khusus *team leader* yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan usaha di masa depan. Selain itu, seiring meningkatnya perhatian dari pemangku kepentingan mengenai ESG, IIF juga berupaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan ESG kepada seluruh karyawan, tidak hanya pada tim Social & Environment. [GRI 3-3]

Mengingat di tahun 2022 kondisi pandemi COVID-19 sudah semakin membaik dan menurun kasusnya, pelatihan dan pengembangan untuk karyawan mulai dilakukan sebagian secara luring. Program pelatihan ini juga dimasukkan sebagai KPI, di mana seluruh karyawan diwajibkan untuk memenuhi minimal jam pelatihan perusahaan selama 64 jam per orang per tahun. Sepanjang tahun 2022, program pelatihan karyawan telah memenuhi 108% dari target program pelatihan perusahaan.

EDUCATION AND TRAINING

The Company recognizes the need for fresh, innovative ideas to keep advancing and stay ahead of the competition in the increasingly high and dynamic industry challenges. In order to accomplish that particular objective, it has become necessary for the Company to improve the skills of its employees as they are running business operations through programs of education and training. This is because, over time, the employees' tasks are becoming more complex, even with increasingly greater technical difficulties.

Employee capability development goes hand in hand with increasing career paths and developing human resources as an inseparable part of the Company's efforts to retain its employees. Therefore, the HR Division pairs the selection and recruitment process with education, training, and competency development programs in technical and non-technical areas. [GRI 3-3]

As a concrete manifestation of its commitment to human resource development, IIF has encouraged its employees to participate in training programs to equip them with technical, managerial, soft skills, and leadership skills specifically for team leaders needed so they can better face future business challenges. And as shareholders pay more and more attention to ESG, IIF is also working to raise ESG awareness and capabilities for all employees, not only the Social & Environment team. [GRI 3-3]

Given the reduced impacts of the COVID-19 pandemic and the much lower number of covid cases, the Company has begun to partially resume its offline training and development for the employees. This training program is also included as a KPI, in which all employees are required to fulfill a minimum of 64 hours of the Company's mandatory training hours per person per year. Throughout 2022, the employee training program met 108% of the target.

Jam Pelatihan Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Jabatan [OJK F.22][GRI 404-1] Employee Training Hours based on Gender and Position Level

Keterangan	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)			Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
Senior Manager (ex. ExCom)	793,4	575,9	1.369,3	Senior Manager (ex. ExCom)
Middle Manager	1.184,5	1.289	2.473,5	Middle Manager
Officer	1.813,5	2.101,5	3.915	Officer
Jumlah	3.791,4	3.966,4	7.757,8	Total

Jam Pelatihan berdasarkan Jenis Pelatihan [GRI 404-2] Training Hours based on Type of Training

1. Pelatihan Internal | In-house Training

Keterangan	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)			Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
Senior Manager (ex. ExCom)	514	299,5	813,5	Senior Manager (ex. ExCom)
Middle Manager	773,5	833,5	1.607	Middle Manager
Officer	1.194,5	1.363	3.357,5	Officer
Jumlah	3.282	2.496	5.578	Total
Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan	57,57	38,4	49,80	Average Training Hours per Employee

2. Pelatihan Umum | Public Training

Keterangan	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)			Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
Senior Manager (ex. ExCom)	279,4	276,4	555,8	Senior Manager (ex. ExCom)
Middle Manager	411	455,5	866,5	Middle Manager
Officer	619	738,5	1.357,5	Officer
Jumlah	1.309,4	1.470,4	2.779,5	Total
Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan	22,97	22,62	22,78	Average Training Hours per Employee

Jam Pelatihan berdasarkan Tujuan Pelatihan [GRI 404-2] Training Hours based on Training Objective

1. Pelatihan Soft Skill | Training on Soft Skills

Keterangan	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)			Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
Senior Manager (ex. ExCom)	268,5	156	424,5	Senior Manager (ex. ExCom)
Middle Manager	322	397	719	Middle Manager
Officer	569,5	620	1.189,5	Officer
Jumlah	1.160	1.173	2.333	Total
Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan	20,35	18,05	19,12	Average Training Hours per Employee

2. Pelatihan Technical Skill | Training on Technical Skills

Keterangan	Jumlah Jam Pelatihan (Jam) Total Training Hours (Hours)			Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
Senior Manager (ex. ExCom)	524,9	419,9	944,8	Senior Manager (ex. ExCom)
Middle Manager	862,5	892	1.754,5	Middle Manager
Officer	1.244	1.481,5	2.725,5	Officer
Jumlah	2.631,4	2.793,4	5.424,8	Total
Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan	46,16	42,98	44,47	Average Training Hours per Employee



7.757,8

Jam | Hours

Total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang terdiri dari pelatihan *soft skill* dan *technical skill*.
Total training hours provided to employees on both soft skills and technical skills.



63,59

Jam | Hours

Rata-rata jam pelatihan *soft skill* dan *technical skill* per karyawan.
Average hours of soft skills and technical skills training per employee.

PENILAIAN KINERJA

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi Perseroan, IIF secara rutin melakukan pemantauan dan penilaian kinerja karyawan oleh Divisi SDM melalui program manajemen kinerja yang dikembangkan menggunakan modul penilaian berbasis *Key Performance Indicators* (KPI). Dalam jangka waktu satu tahun, Divisi SDM telah melakukan dua kali penilaian KPI yang diikuti oleh 100% karyawan, termasuk karyawan kontrak. **[GRI 404-3]**

PERFORMANCE APPRAISAL

To ensure its corporate vision and mission are achieved, IIF regularly monitors and evaluates employee performance by the HR Division through a performance management program developed using an assessment module based on *Key Performance Indicators* (KPI). Within one year, the HR Division makes two KPI assessments on all of its employees (100%), including contract employees. **[GRI 404-3]**

REMUNERASI DAN KOMPENSASI

IIF menyadari bahwa untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, maka diperlukan pemberian remunerasi dan kesejahteraan yang layak bagi seluruh karyawan. Diharapkan melalui pemberian remunerasi dan kesejahteraan terhadap karyawannya, bisa membantu Perseroan dalam mencapai target bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan.

REMUNERATION AND COMPENSATION

IIF realizes that to improve employee performance, productivity, and loyalty to the Company, it needs to provide the proper remuneration and welfare package for all employees. IIF hopes that by providing remuneration and welfare for its employees, the Company will achieve better and more sustainable business targets.

Dalam hal remunerasi, IIF memberikan paket remunerasi bagi karyawan, manajemen, dan komisaris dengan disusun sedemikian rupa menggunakan tolok ukur pasar, serta ditinjau dan disesuaikan secara berkala tanpa melibatkan konsultan remunerasi, pemangku kepentingan, dan pihak ketiga lainnya. IIF meyakini penentuan remunerasi ini sudah pada tingkat yang kompetitif, sehingga diharapkan bisa membawa dampak positif bagi Perseroan sebagai perusahaan pilihan, baik untuk talenta eksternal maupun karyawan yang telah bergabung.

In terms of remuneration, IIF provides remuneration packages for employees, the management, and its board commissioners, which are prepared using market benchmarks, and reviewed and adjusted periodically without involving remuneration consultants, stakeholders, and other third parties. IIF is convinced that its remuneration package is already competitive and will positively impact IIF as a company of choice, both for prospective external talents and talents that have joined as employees.

Dalam hal kompensasi, IIF meyakini telah menetapkan paket kompensasi yang kompetitif di industrinya, sehingga dapat menarik bakat terbaik (*best talent*) dari pasar. Paket kompensasi yang diberikan meliputi gaji pokok yang dibayarkan kepada karyawan setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), asuransi kesehatan, manfaat yang terkait dengan jabatan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan bonus prestasi.

IIF also believes that it has established a competitive compensation package in the industry in that it can attract the best talents from the market. The compensation package provided includes the basic salary paid to employees at the end of each month pursuant to the provisions of the Provincial Minimum Wage (UMP), the Social Security Administration Agency (BPJS), health insurance, rank allowance, Holiday Allowance (THR), and performance bonuses.



40%

Standar gaji yang diberikan Perseroan juga sudah memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di mana imbalan jasa karyawan tetap golongan terendah lebih tinggi 40% dari UMP. UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.640.000. [OJK F.20]

The standard salary provided by the Company also meets Jakarta Provincial Minimum Wage (UMP) where the compensation for its permanent employee is 40% higher than the UMP. Jakarta UMP in 2022 was Rp4,640,000. [OJK F.20]

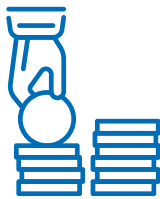
Program Kesejahteraan untuk Seluruh Karyawan (Tetap dan Kontrak)

Welfare Program for All Employees (Permanent and Contract)

Gaji dan Bonus Kinerja Salary and Performance Bonus

Besaran gaji dan bonus kinerja yang diterima karyawan berdasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan, ditambah dengan prestasi yang telah dicapai serta kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan.

Employees receive salary and performance bonuses whose amount is based on their respective levels or ranks; plus, the achievements and contributions they have respectively made to the Company.



Fasilitas dan Tunjangan Facilities and Allowances

- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit, serta bersalin untuk karyawan dan anggota keluarganya;
- Tunjangan komunikasi dan transportasi;
- Tunjangan keanggotaan olahraga;
- Dana pensiun karyawan.
- Employment Social Security Administration Agency (BPJS);
- Health Social Security Administration (BPJS);
- Holiday Allowance (THR) which is given once a year in accordance with applicable regulations;
- Reimbursement for medical expenses for outpatient and inpatient in hospital, as well as maternity for employees and their family members;
- Communication and Transportation Allowance;
- Sports membership;
- Employee pension fund.



CUTI MEMILIKI ANAK

Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hak pekerja/buruh untuk menggunakan hak waktu istirahat hamil dan melahirkan serta hak untuk mendapatkan upah penuh selama waktu tersebut, IIF memberikan fasilitas cuti melahirkan untuk karyawan perempuan (*maternity leave*) dan cuti memiliki anak untuk karyawan laki-laki bagi istrinya yang melahirkan (*paternity leave*). Selama tahun 2022, terdapat sembilan karyawan yang telah mengambil cuti melahirkan dan cuti memiliki anak.

MATERNITY LEAVE

In accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor regarding the right of workers/laborers to use their right to rest during pregnancy and childbirth and the right to receive full wages during this time, IIF also provides maternity leave facilities for female and paternity leave for male employees whose wives give birth. In 2022, nine IIF employees took maternity leave.

Keterangan	Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total	Description
	Laki-laki Male	Perempuan Female		
Jumlah karyawan yang mengambil cuti melahirkan dan cuti memiliki anak	6	3	9	Number of employees taking maternity and parental leave
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan cuti memiliki anak	6	3	9	Number of employees returning to work after maternity leave and parental leave
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan cuti memiliki anak, yang masih bekerja 12 bulan setelahnya*	6	2	8	Number of employees who returned to work after maternity leave and parental leave, and continue working over the following 12*
Tingkat pekerja kembali bekerja (%)	100%	100%	100%	Return to work rate (%)
Tingkat retensi (%)	100%	66,6%	88,9%	Retention rate (%)

Catatan | Note:

* Dihitung dari data cuti melahirkan dan memiliki anak di 2021.
Calculated from maternity leave and childbearing data in 2021.

LINGKUNGAN BEKERJA YANG AMAN DAN NYAMAN [OJK F.21]

Memberikan lingkungan bekerja yang aman dan nyaman kepada seluruh karyawan tentunya sudah menjadi kewajiban dan fokus Perseroan dengan memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), khususnya selama masa pandemi COVID-19. Ada beberapa fasilitas dan kebijakan tambahan yang perlu diberikan oleh Perseroan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja, seperti: [GRI 403-2][GRI 403-6]

- Klaim vitamin untuk menguatkan daya tahan tubuh tanpa harus disertai dengan resep dokter;
- Klaim biaya transportasi dengan kendaraan umum yang bersifat pribadi (taksi) sebagai upaya untuk mencegah karyawan menggunakan kendaraan umum yang bersifat masal dan mengurangi potensi paparan COVID-19;
- Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi dan booster bagi karyawan, keluarga, dan lingkungan terdekatnya;
- Pemeriksaan COVID-19 secara berkala sebelum karyawan masuk kantor, serta sebelum dan setelah kepulangan dari site visit ke proyek-proyek yang dikunjungi;
- Pemberian vitamin dan suplemen bagi karyawan dan keluarganya yang terpapar COVID-19;
- Penyediaan paket karantina mandiri, apabila diperlukan;
- Klaim biaya komunikasi bagi karyawan yang mengalami kesulitan jaringan ketika bekerja dari rumah; dan
- Lain-lain seperti penyediaan masker serta pelaksanaan disinfektan secara reguler dan menyeluruh di kantor pada kondisi WFO.

Selama masa pandemi COVID-19, IIF juga telah membentuk Tim Gugus Tugas COVID-19 Perseroan. Tim Gugus Tugas COVID-19 akan memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait kebijakan yang perlu diambil untuk memitigasi risiko COVID-19 di tempat kerja. Beberapa kebijakan K3 dilakukan sebagai upaya Perseroan dalam menghindari risiko paparan COVID-19 di lingkungan kerja, seperti memberlakukan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan kerja dan menyediakan swab antigen karyawan. Bahkan, sebelum melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek klien, karyawan juga diminta untuk melakukan penilaian risiko COVID-19 di wilayah tujuan dengan mengisi lembar Penilaian Risiko Perjalanan (PRP) yang akan diperiksa oleh Divisi SDM dan disetujui oleh Direktur terkait. [GRI 3-3]

Adapun pada tahun 2022, tidak terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatalitas maupun penyakit akibat kerja di IIF. [GRI 403-9][GRI 403-10]

SAFE AND COMFORTABLE WORKING ENVIRONMENT [OJK F.21]

Providing a safe and comfortable work environment for all employees has become the Company's obligation and focus where the Company pays heed to Occupational Health and Safety (K3) aspects, especially during the COVID-19 pandemic. There are several additional facilities and policies that the Company must add in order to break the chain of transmission of COVID-19 in the work environment, such as: [GRI 403-2][GRI 403-6]

- Reimbursement for vitamins that employees can claim without doctor prescription, to strengthen their immune system;
- Reimbursement for transportation costs when employees have to take private public transportation (taxi) to keep them from taking a more mass public transportation and reduce potential exposure to COVID-19;
- Vaccination and booster activities for employees, their immediate families, and closest neighborhood;
- Periodic COVID-19 checks before employees enter the office, as well as before and after returning from visits to project site;
- Provision of vitamins and supplements for employees and their families who were exposed to COVID-19;
- Provision of self-quarantine packages, if necessary;
- Reimbursement for communication costs for employees who had difficulties in accessing internet network when working from home; and
- Other facilities such as the provision of masks and regular and thorough disinfection in the office under WFO conditions.

During the COVID-19 pandemic, IIF also formed the Company's COVID-19 Task Force Team. The Team would give recommendations to management on policies that need to be taken to mitigate the risk of COVID-19 in the workplace. Several K3 policies were executed as part of the Company's efforts to avoid the risk of exposure to COVID-19 in the work environment e.g. enforcing strict health protocols and providing employee antigen swabs. In fact, before making a field trip to a client's project location, employees should also assess the COVID-19 risk in the project by filling out a Travel Risk Assessment (PRP) sheet, which will be checked by the HR Division and approved by the relevant Director. [GRI 3-3]

In 2022, there were no work accidents resulting in fatalities or work-related illnesses at IIF. [GRI 403-9][GRI 403-10]

MEKANISME PENGADUAN KETENAGAKERJAAN

Beberapa masalah ketenagakerjaan mungkin saja terjadi di kalangan karyawan, namun Perseroan akan bertindak cepat dan tepat dalam menangani masalah tersebut. Secara terbuka, Perseroan memberi wadah bagi karyawan untuk melaporkan melalui mekanisme sarana pengaduan pada sistem penilaian *Performance Appraisal*. Sistem ini mencakup *direct coaching* dan mekanisme *whistleblowing* yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Untuk melaporkan masalah intimidasi, diskriminasi, pelecehan, hingga dugaan penipuan/perbuatan melanggar hukum, Perseroan menyediakan jalur bagi karyawan lewat mekanisme *whistleblowing*. Selain itu, Perseroan melalui manajemen terkait juga rutin mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk membahas strategi atau solusi dari masalah-masalah yang ada secara *top-down* setiap empat bulan sekali.

EMPLOYMENT COMPLAINT MECHANISM

Some employment issues may occur among employees, so that the Company will respond quickly and appropriately. Openly, the Company provides a forum for employees to report through a complaint facility mechanism in the Performance Appraisal assessment system. This system includes direct coaching and a whistleblowing mechanism governed by Company Regulations.

To report cases from intimidation, discrimination, and harassment to allegations of fraud/unlawful acts, the Company provides a channel for employees through a whistleblowing mechanism. In addition, the Company, through related management, also routinely holds meetings with employees to discuss strategies or solutions to existing problems on a top-down basis every four months.



Kinerja Sosial

Social Performance



Memberikan Manfaat Positif untuk Masyarakat

Giving Positive Benefits for the Community



Meski sifat bisnis IIF tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek, tetapi IIF memiliki tanggung jawab sosial melalui penerapan Prinsip S&E dan mendorong upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

While the financing nature of its business does have direct issues with the project surrounding communities, IIF still fulfils its social responsibility by applying S&E Principles and encouraging community development and empowerment efforts.



IIF berkomitmen untuk memberikan manfaat positif melalui program-program pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan. Program pemberdayaan diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar proyek, bukan hanya selama proyek pembangunan berjalan tetapi juga setelah proyek itu selesai dan beroperasi, sekaligus menjaga hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan sekitar. Selain itu, dampak ekonomi tidak langsung yang ditimbulkan dari proyek infrastruktur juga diharapkan dapat memudahkan aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perseroan memahami bahwa setiap kegiatan proyek infrastruktur berpotensi memberikan dampak sosial kepada masyarakat yang berada di sekitar proyek. Meski sifat bisnis IIF tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek, tetapi IIF memiliki tanggung jawab sosial melalui penerapan Prinsip S&E dan mendorong upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

IIF is committed to giving positive social benefits through its need-based community empowerment programs. IIF hopes this program will provide added value to the communities residing near the projects both when the projects are still underway and after they are completed and have commenced operations while maintaining harmonious relationships with the surrounding stakeholders. IIF also hopes the indirect economic impacts of its infrastructure projects will make their life easier and their quality of life better.

The Company recognizes the social impacts that every infrastructure project has or will have on the project surrounding communities. While the financing nature of its business does not cause it to have direct issues with the communities, IIF still fulfills its social responsibility by applying S&E Principles and encouraging community development and empowerment efforts.

Prinsip S&E memastikan adanya pengelolaan terhadap aspek sosial dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai IIF, di antaranya yaitu, tetapi tidak terbatas pada:

- Mendorong penyediaan sarana pelibatan pemangku kepentingan;
- Memastikan keluhan dari masyarakat terdampak proyek (*Project Affected People*–PAP) dan komunikasi eksternal dengan pemangku kepentingan terkait ditanggapi dan dikelola dengan tepat;
- Menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang terdampak proyek;
- Menghindari pengusuran atau pemukiman kembali secara paksa;
- Mengantisipasi dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari proses pembebasan lahan;
- Meningkatkan atau memulihkan penghidupan dan standar hidup masyarakat terdampak;
- Menghindari atau meminimalkan dampak negatif proyek terhadap Masyarakat Adat;
- Memastikan proses pembangunan menghormati hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan penghidupan berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat;
- Menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik-praktik yang dimiliki Masyarakat Adat serta membangun dan menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat adat selama siklus berjalan;
- Melindungi dan melestarikan warisan budaya dari dampak negatif kegiatan proyek.

DAMPAK KEGIATAN OPERASIONAL TERHADAP LINGKUNGAN [OJK F.23][GRI 413-2]

Kegiatan operasional yang dilakukan di kantor pusat IIF secara umum tidak memberikan dampak sosial negatif yang signifikan terhadap masyarakat di sekitar area kantor. Namun, IIF bertanggung jawab untuk mengelola dampak sosial yang ditimbulkan di semua lokasi proyek yang dibiayai oleh IIF dan mendukung pengembangan masyarakat di sekitar wilayah proyek.

IIF melakukan proses uji tuntas untuk mengidentifikasi dampak sosial dari proyek dan memastikan bahwa proyek mampu menerapkan 8 prinsip S&E. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip S&E yang berstandar internasional terbaik dan menerapkan tata kelola yang baik, diharapkan dapat tercapainya proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melindungi lingkungan di sekitar area proyek. Dengan kata lain, menghidupkan proyek dan masyarakat sekitarnya menjadi lebih harmonis.

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG [GRI 203-1]

Produk dan layanan IIF berupa pembiayaan proyek infrastruktur memiliki dampak ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap komunitas di lokasi proyek. Efek ganda dari investasi infrastruktur meliputi pembangunan jalan penghubung di sekitar lokasi proyek yang mempermudah transportasi warga lokal, pembangunan sistem air bersih yang juga bisa dirasakan oleh warga sekitar, fasilitas kesehatan yang tentunya juga melayani semua pihak di lokasi proyek dan penciptaan lapangan kerja di sekitar lokasi proyek.

The S&E principles ensure that there is a management of social aspects in infrastructure development projects financed by IIF, including, but not limited to:

- Encouraging the provision of stakeholder engagement facilities;
- Ensuring that complaints from Project Affected People (PAP) and external communications with relevant stakeholders are responded to and managed appropriately;
- Avoiding or minimizing negative risks and impacts on the health, safety, and security of project-affected communities;
- Avoiding forced evictions or involuntary resettlement;
- Anticipating and minimizing the social and economic impacts of the land acquisition process;
- Improving or restoring the welfare and livelihood of relocated communities;
- Avoiding or minimizing the project's negative impacts on Indigenous Peoples;
- Ensuring that the development process fosters respect for the human rights, dignity, aspirations, culture, and natural resource-based livelihoods of Indigenous Peoples;
- Respecting and preserving the culture, knowledge, and practices of Indigenous Peoples and building while maintaining sustainable relationships with Indigenous Peoples throughout the cycle;
- Protecting and preserving cultural heritage from the negative impacts of project activities.

IMPACT OF OPERATIONAL ACTIVITIES ON THE ENVIRONMENT [OJK F.23][GRI 413-2]

The operational activities that IIF carries out at the head office do not have a direct and significant negative social impact on the communities that reside near the office. However, IIF still bears the responsibility to help manage the social impacts caused by the projects it finances and assist the development of communities around the projects.

IIF does due diligence in each project to identify the social impacts the project may cause and ensure the project has the capacity to implement the 8 S&E Principles. By applying international standards in S&E management and implementing good corporate governance, IIF hopes to achieve a sustainable infrastructure development, which will not only focus on the physical infrastructure development but also on how to improve the quality of life of the nearby community and preserve the surrounding, or put differently, how to make the projects run more harmoniously with the surroundings.

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS [GRI 203-1]

IIF's products and services in infrastructure project financing have direct or indirect economic impacts on the communities in project sites. The multiple effects of infrastructure investment include the construction of connecting roads around the project site which facilitate residents' transportation, the construction of clean water systems for the residents, and health facilities, which of course, also serve all parties at the project site, and the creation of jobs around the project site.

Pembangunan Jalan Tol Toll Road construction	Hingga akhir tahun 2022, sebanyak 5 proyek jalan tol dibiayai secara aktif oleh IIF, dengan total panjang 244,29 km. Proyek pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	By the end of 2022, IIF was an active financier of 5 toll road projects, with a total length of 244.29 km. This toll road construction project aims to increase the mobility of goods and services and accelerate economic growth in the developed area.
Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Airport and Seaport Development	IIF memiliki 4 lokasi proyek bandara dan 2 proyek pelabuhan yang dibiayai secara aktif hingga akhir tahun 2022. Kedua jenis pembiayaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar transportasi antar pulau atau antar negara, juga membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, meratakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antar pulau dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	IIF had 4 airport projects and 2 seaport projects that were actively financed until the end of 2022. These two types of infrastructure financing are expected to facilitate inter-island or inter-country transportation and also help boost the Indonesian economy, equalize economic growth, reduce inter-island economic gaps and ultimately increase society's welfare.
Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) Development of Drinking Water Supply Facilities (SPAM)	Hingga akhir tahun 2022 tercatat 7 proyek SPAM yang didanai secara aktif oleh IIF dengan total kapasitas sekitar 18.025 liter per detik. Proyek ini diperkirakan akan memasok air minum ke 1.119.545 rumah tangga. Ketersediaan sumber air bersih yang cukup dan aman sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.	By the end of 2022, there were 7 SPAM projects that were actively financed by IIF with a total capacity of around 18,025 liters per second. This project is expected to supply drinking water to 1,119,545 households. Access to sufficient and safe sources of clean water is crucial to improving the quality of life and public health.
Pengembangan Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan Generation from Renewable Energy	Sebanyak 19 proyek energi terbarukan dengan total output sekitar 671 MW dibiayai secara aktif oleh IIF pada akhir tahun 2022, lebih dari setengahnya akan menjadi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau Mikro Hidro (PLTMH). Ketersediaan tenaga listrik memegang peranan penting dalam pembangunan daerah untuk menunjang kelancaran kehidupan dan perekonomian daerah.	A total of 19 renewable energy projects with a total output of around 671 MW were still actively financed by IIF by the end of 2022, more than half of which will be hydroelectric power (PLTA) or micro hydro (PLTMH) projects. The availability of electricity plays an important role in regional development to support people's life and the regional economy.
Pengembangan Sarana Telekomunikasi Telecommunication Facilities Development	Pada akhir tahun 2022, 8 proyek telekomunikasi yang secara aktif dibiayai oleh IIF. IIF telah mendukung sektor ini di berbagai segmen seperti <i>backbone</i> serat optik (Palapa Ring), penyedia layanan internet, penyedia menara telekomunikasi, operator telekomunikasi, dan pusat data. Berkas trafik data dan koneksi jaringan internet yang memadai, hal ini dapat mendukung proses belajar mengajar siswa dan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonominya.	By the end of 2022, 8 telecommunications projects were still actively financed by IIF. IIF has supported this sector in various segments such as fiber optic backbone (Palapa Ring), internet service providers, telecommunication tower providers, telecommunication operators, and data centers. Adequate data traffic and internet network connection support students' learning process and make it easier for people to carry out their economic activities.

INISIATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022 [OJK F.25][GRI 413-1]

Pada tahun 2022, IIF mengimplementasikan sejumlah inisiatif yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat. IIF memfokuskan pada pendanaan program yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat agar dapat dirasakan langsung manfaatnya.

Total biaya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp495.745.169, meningkat sekitar 8,5% dari tahun sebelumnya. Biaya tersebut difokuskan untuk 7 program, program-program ini berfokus pada kegiatan amal, pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan sosial, dan pelestarian budaya, yakni sebagai berikut:

- Pelestarian Barong Landong Bengkulu
- Kuliah umum di Universitas Indonesia
- IIF Qurban 2022: IIF bekerja sama dengan klien dan menyumbangkan hewan kurban di sekitar lokasi proyek di Jawa dan Sulawesi
- Chemical Engineering in Charity 2022
- Turut serta dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat dari Kemenkeu Mengajar 7
- Akuakultur SECURE dan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan
- Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan

COMMUNITY EMPOWERMENT INITIATIVES IN 2022 [OJK F.25][GRI 413-1]

In 2022, IIF made some initiatives that involved and empowered the community. In general, IIF focuses on financing programs related to the local community's livelihood so they can feel the program benefits immediately.

The total cost of Environmental Social Responsibility (TJSL) in 2022 was Rp495,745,169, an increase of around 8.5% from the previous year. The fund was allocated to the following 7 programs, which focused on charitable activities, education, environmental preservation, social safeguard, and cultural preservation:

- Preservation of Barong Landong Bengkulu
- Public lectures at the University of Indonesia
- IIF Qurban 2022: IIF worked with clients and donated sacrificial animals around project sites in Java and Sulawesi
- Chemical Engineering in Charity 2022
- Participation in community empowerment initiatives from the Ministry of Finance Teaching 7
- SECURE Aquaculture and Sustainable Mangrove Ecotourism
- National Movement to Protect Vulnerable Workers

Pelestarian Barong Landong

Barong Landong Preservation



Pelestarian Barong Landong merupakan program kerja sama CSR PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang berfokus pada pelestarian warisan budaya. Program ini berupaya melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan Barong Landong sebagai salah satu warisan budaya provinsi Bengkulu. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini menggunakan sebagian besar sumber daya untuk merevitalisasi kehadiran Barong Landong dengan menerapkannya pada kurikulum daerah, saluran iklan media daring dan cetak, dan mengadakan pameran Barong Landong untuk masyarakat setempat.

Pelestarian Barong Landong is a collaborative CSR program between PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), and Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia which focuses on cultural heritage preservation. The program seeks to preserve, develop, and utilize Barong Landong as one of the cultural heritages of Bengkulu province. As a mean to reach these objectives, the program utilized most of its resources to revitalize the presence of Barong Landong by implementing it in the regional curriculum, featuring in online and printed advertising channels, and holding Barong Landong exhibitions for the local people.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

[OJK F.24]

Untuk menanggapi pengaduan oleh masyarakat tentang operasional proyek-proyek yang didanai Perseroan tetapi memiliki gangguan dalam kehidupan sehari-hari warga lokal, IIF telah membentuk Mekanisme Pengaduan (*Grievance Redress Mechanism—GRM*). Melalui GRM, pemangku kepentingan IIF dapat menghubungi IIF secara langsung untuk menyampaikan keluhan.

GRM dapat diakses melalui situs web IIF dan semua pengaduan yang diterima dicatat dan diperbarui secara berkala. Mekanisme penanganan pengaduan IIF meliputi:

- Menerima dan mencatat pengaduan,
- Menanggapi pengaduan dalam waktu 2x24 jam dengan menyatakan bahwa pengaduan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti oleh tim,
- Penyelesaian proses peninjauan dan validasi pengaduan dalam waktu 14 hari,

COMPLAINT HANDLING MECHANISM

[OJK F.24]

To respond to complaints by the public about the operations of projects financed by the Company but which have disruptions in the daily lives of residents, IIF has established a Grievance Redress Mechanism (GRM). Through the GRM, IIF stakeholders can contact IIF directly to express their grievances.

The GRM can be accessed through IIF official website, and all complaints received will be recorded and updated regularly. The following is the IIF handling mechanism:

- Receive and record complaints,
- Respond to the complaint within 2x24 hours by providing information that the complaint has been received and will be followed up by the team,
- Carry out the complaint verification and validation process within 14 days,

- iv. Setelah pengaduan dikonfirmasi, harus diselesaikan dalam waktu 30 hari baik secara langsung atau dengan meneruskan pengaduan tersebut ke pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengaduan tersebut;
- v. Mengawasi proses penyelesaian pengaduan;
- vi. Menutup pengaduan jika dinyatakan telah selesai dan menyiapkan memorandum kesepakatan antara pihak pengadu dan juga IIF.

Setiap tahun, dokumen pengaduan dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Kinerja Sosial dan Lingkungan IIF dan diberikan status penyelesaiannya.

Selain itu, IIF juga menerapkan hal yang sama untuk semua proyek yang dibiayai. Proyek harus memiliki mekanisme penanganan yang serupa, menangkap semua jenis aduan yang diterima dan tindakan yang diambil untuk menyelesaikannya. Proyek kemudian harus dapat melaporkan hasil pencatatan tersebut kepada IIF setiap tahun. Mekanisme ini memastikan bahwa proyek di semua tahapan dapat menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan, terutama dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak proyek, di semua tahapan proyek.

Hingga akhir tahun 2022, terdapat satu pengaduan yang diterima Perseroan dan ditujukan kepada proyek yang dibiayai IIF. Sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, Perseroan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengkomunikasikan aduan kepada pemilik proyek dan memastikan bahwa aduan diselesaikan dengan *Grievance Redress Mechanism* di level proyek tersebut.

Selain kanal aduan di atas, pada 2022 perseroan memiliki kanal aduan tambahan di level korporasi untuk aduan-aduan yang ditujukan kepada perseroan, aduan-aduan ini secara periodik dilaporkan kepada OJK. Hingga akhir tahun 2022, terdapat 0 pengaduan yang diterima Perseroan melalui kanal aduan di level korporasi.

- iv. Directly or indirectly settle the complaint within 30 days once it is validated or forward the complaint to the relevant party responsible for resolving the complaint;
- v. Monitor the complaint resolution process;
- vi. Close the case if the complaint has been declared settled and prepare a memo that contains an agreement from the complainant and IIF.

Each year, the complaint record will be reported as part of the IIF Annual Social and Environmental Performance Report, along with its resolution status.

In addition, IIF has the same method applied in each project it finances. Projects are required to have a similar complaint handling mechanism and record all types of complaints that they receive, including its resolution measures. After that, the project shall report the grievance redress results annually to IIF. This mechanism ensures that the project at all stages maintains good relations with all its stakeholders, especially with the surrounding communities affected by the project, through the entire project phases.

Until the end of 2022, there was 1 grievance received by the Company and addressed to an IIF-financed project. As per the established mechanism, IIF followed up the complaint by communicating it to the project owner and ensuring that the complaint was resolved in accordance with the *Grievance Redress Mechanism* at the project level.

In addition to the above complaint channels, in 2022, the Company has additional grievance channels at the corporate level for complaints addressed to the Company, these complaints are periodically reported to OJK. Until the end of 2022, there were 0 complaints received by the Company through the grievance channel at the corporate level.

Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017

List of Disclosure Based on POJK No. 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

Nomor Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation on Sustainability Strategies	6
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Overview of Sustainability Aspects Performance		
B.1	Aspek Ekonomi Economy Aspects	21
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspects	22
B.3	Aspek Sosial Social Aspects	23
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, Sustainable Values	26
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	25
C.3	Skala Usaha: a. Total aset atau kapitalisasi dan total kewajiban; b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. Wilayah operasional Business Scale: a. Total assets or assets capitalization and total liabilities; b. Total employee based on gender, position, age, education and employment status; c. Percentage of share ownership; and d. Operational area.	25, 27, 87
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Product, Service and Business Activities	25, 28
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Member Association	30
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes	30
Penjelasan Direksi Director Explanation		
D.1	Penjelasan Direksi Director Explanation	32
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Corporate Governance		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Person in Charge Responsibility for Sustainable Finance	43
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Competency Development	47
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Risk Assessment Implementation	47, 48
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholders Relations	55, 56
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Implementation Problems	32, 49

Nomor Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Kinerja Keberlanjutan Sustainable Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan The Activities of Building a Culture of Sustainability	60
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit	65
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line With the Implementation of Sustainable Finance	65
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environment Cost Incurred	79
Aspek Material Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	79
Aspek Energi Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan The Amount and Intensity of Energy Used	76
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievement of Energy Efficiency Including Use of Renewable Energy Sources	77
Aspek Air Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air Water Used	78
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts from Operational Areas Close to or in Conservation Areas or Having Biodiversity	79
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	81
Aspek Emisi Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan berdasarkan Jenisnya The Amount and Intensity of Emissions Produced by Type	77
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievement Emission Reduction Carried Out	77
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspect		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Produced by Type	Tidak relevan Not relevant
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Mechanism of Waste and Effluent Management	Tidak relevan Not relevant
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spills that Occur (if any)	Tidak relevan Not relevant
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Environmental Complaint Aspect		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan The Amount and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	Tidak ada None

Nomor Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Kinerja Sosial Social Aspect		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Provide Services for Equivalent Products and/or Services to Consumers	65
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equality of Employment Opportunities	87
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	87
F.20	Upah Minimum Regional The Regional Minimum Wage	93
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	94
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Capacity Building of Employees	91
Aspek Masyarakat Society Aspect		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to the Surrounding Community	98
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	100
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities	99
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibilities for Developing Sustainable Products/Services		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products and/or Services	69
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services that have been Evaluated for Safety for Customers	66
F.28	Dampak Produk/Jasa Products/Service Impacts	66
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recalled	68
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey of Sustainable Finance and/or Services	68
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	Tidak ada None
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	109
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Feedback on Previous Year's Sustainability Report	Tidak ada None
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Disclosure List Based on POJK No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Listed Companies and Public Companies	102

Indeks Isi GRI

GRI Content Index – WITH REFERENCE

Pernyataan penggunaan	PT Indonesia Infrastructure Finance telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks GRI ini untuk periode 1 Januari–31 Desember 2022 dengan mengacu pada Standar GRI
Statement of use	PT Indonesia Infrastructure Finance has reported the information cited in this GRI content index for the period January 1–December 31, 2022 with reference to the GRI Standards.
GRI I used	GRI I: Foundation 2021

Standar GRI GRI Standards	Pengungkapan Index Disclosure	Halaman Page
GRI 2	2-1 Informasi Organisasi Organization Details	25
	2-2 Entitas yang Termasuk dalam Laporan Keuangan Dikonsolidasi Entities Included in the Consolidated Financial Statement	3
	2-3 Periode Pelaporan, Frekuensi, dan Titik Kontak Reporting Period, Frequency, and Contact Point	2, 5
	2-4 Pernyataan Kembali Informasi Restatement of Information	3
	2-5 Verifikasi Pihak Eksternal External Assurance	3
	2-6 Kegiatan, Rantai Pasokan, dan Hubungan Bisnis Lainnya Activities, Value Chain and Other Business Relationships	28, 31
	2-7 Karyawan Employees	87
	2-8 Pekerja Bukan Karyawan Workers Who are Not Employees	88
	2-9 Struktur Tata Kelola dan Komposisi Governance Structure and Composition	40, 41
	2-10 Nominasi dan Seleksi Badan Tata Kelola Tertinggi Nomination and Selection of the Highest Governance Body	41
	2-11 Ketua Badan Tata Kelola Tertinggi Chair of the Highest Governance Body	41
	2-12 Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Mengawasi Pengelolaan Dampak Role of the Highest Governance Body in Overseeing the Management of Impacts	43
	2-13 Delegasi Tanggung Jawab untuk Mengelola Dampak Delegation of Responsibility for Managing Impacts	43
	2-14 Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Laporan Keberlanjutan Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting	44
	2-15 Konflik Kepentingan Conflict of Interest	50
	2-16 Komunikasi Hal-hal Kritis Communication of Critical Concern	43
	2-17 Pengetahuan Kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi Collective Knowledge of the Highest Governance Body	47
	2-18 Evaluasi Kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi Evaluation of the Performance of the Highest Governance Body	43
	2-19 Kebijakan Remunerasi Remuneration Policies	42
	2-20 Proses Menentukan Remunerasi Process to Determine Remuneration	42
	2-22 Pernyataan tentang Strategi Pembangunan Berkelanjutan Statement on Sustainable Development Strategy	32
	2-23 Komitmen Kebijakan Policy Commitments	45
	2-24 Menerapkan Komitmen Kebijakan Embedding Policy Commitments	45
	2-25 Proses untuk Memulihkan Dampak Negatif Processes to Remediate Negative Impacts	46, 47

Standar GRI GRI Standards		Pengungkapan Index Disclosure	Halaman Page
	2-26	Mekanisme untuk Mencari Saran dan Menyampaikan Kekhawatiran Mechanism for Seeking Advice and Raising Concern	54
	2-27	Kepatuhan terhadap Regulasi dan Hukum Compliance with Laws and Regulations	61, 82
	2-28	Keanggotaan Asosiasi Membership Associations	30
	2-29	Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Approach to Stakeholder Engagement	55
GRI 3	3-1	Proses Menentukan Topik Material Process to Determine Material Topics	3
	3-2	Daftar Topik Material List of Material Topics	4
EKONOMI ECONOMIC			
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	98
GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	203-1	Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan Infrastructure Investments and Services Supported	98
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	53
GRI 205 Anti Korupsi Anti-corruption	205-1	Operasi-operasi yang Dinilai Memiliki Risiko Terkait Korupsi Operations Assessed for Risks Related to Corruption	49, 53
	205-2	Komunikasi dan Pelatihan tentang Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi Communication and Training About Anti-corruption Policies and Procedures	53
	205-3	Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil Confirmed Incidents of Corruption and Action Taken	53
LINGKUNGAN ENVIRONMENT			
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	76
GRI 302 Energi Energy	302-1	Konsumsi Energi dalam Organisasi Energy Consumption within the Organization	75, 76
	302-3	Intensitas Energi Energy Intensity	76
	302-4	Pengurangan Konsumsi Energi Reduction of Energy Consumption	77
	302-5	Pengurangan pada Energi yang Dibutuhkan untuk Produk dan Jasa Reduction in Energy Requirements of Products and Services	77
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	78
GRI 303 Air dan Efluen Water and Effluents	303-1	Interaksi dengan Air sebagai Sumber Daya Bersama Interactions with Water as a Shared Resource	78
	303-2	Manajemen Dampak yang Berkaitan dengan Pembuangan Air Management of Water Discharge-related Impacts	78
	303-3	Pengambilan Air Water Withdrawal	78
	303-4	Pembuangan Air Water Discharge	78
	303-5	Konsumsi Air Water Consumption	78
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	79
GRI 304 Keanekaragaman Hayati Biodiversity	304-1	Lokasi Operasi yang Dimiliki, Disewa, Dikelola, atau Berdekatan dengan, Kawasan Lindung dan Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Lindung Operational Sites Owned, Leased, Managed in, or Adjacent to, Protected Areas and Areas of High Biodiversity Value Outside Protected Areas	79
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	76

Standar GRI GRI Standards		Pengungkapan Index Disclosure	Halaman Page
GRI 305 Emisi Emission	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) Direct GHG Emissions (Scope 1)	77
	305-2	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions	77
	305-4	Intensitas Emisi GRK GHG Emissions Intensity	77
	305-5	Pengurangan Emisi GRK Reduction of GHG Emissions	77
	305-6	Emisi Zat Perusak Ozon (ODS) Emissions of Ozone-Depleting Substance (ODS)	77
	305-7	Nitrogen Oksida (NO _x), Sulfur Oksida (SO _x), dan Emisi Udara Signifikan Lainnya Nitrogen Oxides (NO _x), Sulfur Oxides (SO _x), and Other Significant Air Emissions	77
SOSIAL SOCIAL			
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	83
GRI 401 Ketenagakerjaan Employment 2016	401-1	Perekrutan Karyawan Baru dan Pengantian Karyawan New Employee Hires and Employee Turnover	90
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	94
	403-2	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Investigasi Insiden Hazard Identification, Risk Assessment, and Incident Investigation	94
	403-6	Peningkatan Kualitas Kesehatan Pekerja Promotion of Worker Health	94
	403-9	Kecelakaan Kerja Work-related Injuries	94
	403-10	Penyakit Akibat Kerja Work-related Ill Health	94
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material Management of Material Topics	90
GRI 404 Pelatihan & Pendidikan Training & Education	404-1	Rata-rata Jam Pelatihan per Tahun per Karyawan Average Hours of Training per Year per Employee	91
	404-2	Program untuk Meningkatkan Keterampilan Karyawan dan Program Bantuan Peralihan Programs for Upgrading Employee Skills and Transition Assistance Programs	91
	404-3	Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Rutin terhadap Kinerja dan Pengembangan Karier Percentage of Employees Receiving Regular Performance and Career Development Reviews	92
GRI 406 Non-diskriminasi Non-discrimination	406-1	Insiden Diskriminasi dan Tindakan Perbaikan yang Dilakukan Incidents of Discrimination and Corrective Actions Taken	87
GRI 408 Pekerja Anak Child Labor	408-1	Operasi dan Pemasok yang Berisiko Signifikan terhadap Insiden Pekerja Anak Operations and Suppliers at Significant Risk for Incidents of Child Labor	87
GRI 409 Kerja Paksa atau Wajib Kerja Forced or Compulsory Labor	409-1	Operasi dan Pemasok yang Berisiko Signifikan terhadap Insiden Pekerja Kerja Paksa atau Wajib Kerja Operations and Suppliers at Significant Risk for Incidents of Forced or Compulsory Labor	87
GRI 413 Masyarakat Lokal Local Community	413-1	Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak, dan Program Pengembangan Operations with Local Community Engagement, Impact Assessments, and Development Programs	99
	413-2	Operasi yang secara Aktual dan yang Berpotensi Memiliki Dampak Negatif Signifikan terhadap Masyarakat Lokal Operations with Significant Actual and Potential Negative Impacts on Local Communities	98

Daftar Singkatan

List of Abbreviation

Singkatan Abbreviation	Nama Lengkap	Full Name
ADB	Asian Development Bank	Asian Development Bank
BBM	Bahan Bakar Minyak	Fuel
BEI	Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun	Hazardous and Toxic
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	State Owned Enterprise
DEG	Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
EBT	Energi Baru Terbarukan	New and Renewable Energy
ESG	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola	Environmental, Social, and Governance
GCG	Good Corporate Governance	Good Corporate Governance
GIIP	Good International Industry Practice	Good International Industry Practice
GJ	Giga Joule	Giga Joule
GRI	Global Reporting Initiative	Global Reporting Initiative
GRK/GHG	Gas Rumah Kaca	Green House Gas
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank for Reconstruction and Development
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	Intergovernmental Panel on Climate Change
IFC	International Finance Corporation	International Finance Corporation
IIF	Indonesia Infrastructure Finance	Indonesia Infrastructure Finance
JETP	Just Energy Transition Partnership	Just Energy Transition Partnership
K3/OHS	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Occupational Health and Safety
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	Public Private Partnership
KPI	Indikator Kinerja	Key Performance Indicator
LPEM UI	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia	Institute of Economic and Social Research University of Indonesia
MW	Megawatt	Megawatt
NRC	Komite Nominasi dan Remunerasi	Nomination and Remuneration Committee
ODS	Bahan Perusak Ozon	Ozone Depleting Substance
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Financial Services Authority
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	Regional Drinking Water Company
PGII	Partnership for Global Infrastructure and Investment	Partnership for Global Infrastructure and Investment
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Hydroelectric Power Plant

Singkatan Abbreviation	Nama Lengkap	Full Name
PLTB	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	Wind Power Plant
PLTBm	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa	Biomass Power Plant
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	Micro Hydro Power Plant
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Geothermal Power Plant
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Solar Power Plant
PT SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
POJK	Peraturan OJK	OJK Regulation
PPP	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	Public Private Partnership
PSN	Proyek Strategis Nasional	National Strategic Project
RAKB	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Sustainable Finance Action Plan
RUED	Rencana Umum Energi Daerah	Rencana Umum Energi Daerah
RUPS/GMS	Rapat Umum Pemegang Saham	General Meeting of Shareholders
S&E	Sosial dan Lingkungan	Social & Environmental
SDGs	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia	Human Resources
SED	Social and Environment Division	Social and Environmental Division
SEDD	Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Due Diligence
SEMS	Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Management System
SEOJK	Surat Edaran OJK	OJK Circular Letter
SFWG	Sustainable Finance Working Group	Sustainable Finance Working Group
SPAM	Sarana Penyediaan Air Minum	Water Supply Facility
SMBC	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMV	Special Mission Vehicle	Special Mission Vehicle
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum	Drinking Water Supply System
TJSL / CSR	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Corporate Social Responsibility
TPA	Tempat Pembuangan Akhir	Final Disposal Site
UMP	Upah Minimum Provinsi	Provincial Minimum Wage
USD	Dolar Amerika Serikat	United States Dollar
WB	Bank Dunia	World Bank
WBS	Whistleblowing System	Whistleblowing System
WFO	Work from Office	Work from Office
3P	People, Planet, Profit	People, Planet, Profit

Lembar Umpan Balik [OJK G.2]

Feedback Form

Laporan Keberlanjutan IIF Tahun 2022 IIF Sustainability Report 2022

Silakan pilih salah satu kelompok pemangku kepentingan yang paling mewakili Anda:

Please tick the box for the stakeholder group that best describes you:

☐

Pegawai | Employee

☐

Regulator

☐

Lain-lain | Others:

☐

Contractor/Sub-contractor/Vendor/Supplier

☐

NGO

☐

Konsumen | Customer

☐

Media

☐

Investor/Financial Analyst/Shareholders

☐

Student/Academics

Bagaimana penilaian Anda terhadap laporan ini:

Please rate the report for:

(1 SANGAT TIDAK BAIK sampai dengan 5 SANGAT BAIK | 1 being POOR up to 5 being EXCELLENT)

Parameter Parameter	1	2	3	4	5
Dapat memenuhi kebutuhan informasi yang anda butuhkan Meeting your information needs					
Konten yang lengkap Content completeness					
Transparan Transparency					
Jelas dan mudah dimengerti Clarity and easy to understand					
Kemudahan dalam mencari informasi tertentu Ease in finding information					
Keseluruhan laporan Overall report					

Laporan ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

The report has these following sections:

Bagian Section	Apakah Anda mengakses bagian ini? Did you access this section?	Apakah bagian ini bermanfaat/memuat informasi yang mencukupi? Is it useful/insightful?
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Overview		
Profil Perusahaan Company Profile		
Laporan Direksi Report of the Board of Directors		
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
Kinerja Operasional Operational Performance		
Kinerja Lingkungan Environmental Performance		
Ketenagakerjaan Employment		
Kinerja Sosial Social Performance		



Material aspek apa yang menurut Anda paling informatif dan bermanfaat:
Which of our most material aspect did you find informative or useful:

Aspek Keberlanjutan Material Material Sustainability Aspects	Apakah data dan informasi yang disajikan cukup untuk kebutuhan informasi Anda? Is data and information presented sufficient for you?		
	Terlalu banyak Too much	Mencukupi Sufficient	Terlalu sedikit Too little
Dampak ekonomi tidak langsung Indirect economic impact			
Antikorupsi Anti-corruption			
Energi Energy			
Air dan efluen Water and effluent			
Keanekaragaman hayati Biodiversity			
Emisi Emission			
Ketenagakerjaan Employment			
Kesehatan dan keselamatan kerja Occupational health and safety			
Pelatihan dan pendidikan Training and education			

Mohon penjelasan, apakah laporan ini telah menjawab pertanyaan Anda tentang kinerja keberlanjutan kami?
Please elaborate, does the report address your main concerns about our sustainability performance?

Mohon berikan saran kepada kami untuk meningkatkan kualitas laporan berikutnya?
How could we improve this report in the future?

== THANK YOU ==



Creating Greater Contributions towards Sustainable Development



PT Indonesia Infrastructure Finance
Prosperity Tower Floor 53rd-55th
Lot 28, Sudirman Centra Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

CONTACTS

Tel. : (62-21) 5082 6600

Fax. : (62-21) 5082 6601

E-mail : info@iif.co.id

Linkedin : Indonesia Infrastructure Finance

Instagram : [@pt_iif](https://www.instagram.com/pt_iif)